

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 100 Bayuwangi 68411
<http://banyuwangikab.go.id>
BANYUWANGI



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

22. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peneetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
30. Perturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DAN

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah;
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
16. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan perencanaan penganggaran;
- (2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan kabupaten sekitar yang berbatasan.

BAB II
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN
Pasal 4

Sistematika RPJMD terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran umum kondisi daerah;
- c. BAB III : Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. BAB IV : Isu-isu strategis;
- e. BAB V : Visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. BAB VI : Strategi dan arah kebijakan;
- g. BAB VII : Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. BAB VIII : Indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan;
- i. BAB IX : Penetapan indikator kinerja daerah;
- j. BAB X : Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan terhadap ketentuan dalam BAB VII dan BAB VIII dituangkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

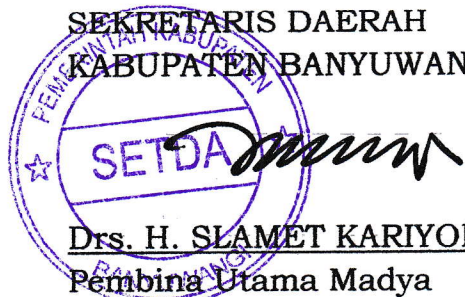
Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Agustus 2016
BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 12

NOMOR REGISTER : 203 - 7/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016-2021

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2016 hingga tahun 2021.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
1.5. Maksud dan Tujuan	7
BAB II	GAMBARAN UMUM
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	9
2.1.1. Letak Wilayah	9
2.1.2. Topografi.....	10
2.1.3. Geologi dan Jenis Tanah.....	11
2.1.4. Iklim.....	11
2.1.5. Hidrologi.....	12
2.1.6. Penggunaan Lahan.....	13
2.1.7. Demografi.....	16
2.1.8. Potensi Pengembang Wilayah	17
2.1.9. Wilayah Rawan Bencana	20
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	22
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	22
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat	26
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	32
2.3. Aspek Pelayanan Umum	33
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	33
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	46
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	48
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	48
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur.....	51
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	54

	2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	56
BAB III	GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	
	3.1. Kinerja Keuangan Daerah	59
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	60
	3.1.2. Neraca Daerah.....	65
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2011-2015.....	68
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	69
	3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	70
	3.3. Kerangka Pendanaan	75
	3.3.1. Proyeksi Pendapatan 2016-2021.....	77
	3.3.2. Kebijakan Alokasi Anggaran.....	80
BAB IV	ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN	
	4.1. Analisis Tahapan RPJP Berjalan.....	85
	4.2. Analisis RPJMN dan RPJMD Provinsi	89
	4.2.1. RPJM Nasional	89
	4.2.2. RPJMD Provinsi Jawa Timur.....	90
	4.3. Platform Bupati Terpilih.....	91
	4.4. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi	92
	4.4.1. Visi dan Misi Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi	93
	4.4.2. Arah Kebijakan Pembangunan.....	94
	4.4.3. Strategi Pembangunan.....	95
	4.5. Permasalahan Pembangunan.....	97
	4.6. Isu-Isu Strategis	100
	4.6.1. Rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang berkualitas....	100
	4.6.2. Belum optimalnya penguatan modal sosial dan penangan PMKS.....	101
	4.6.3. Belum kuatnya <i>bergaining position</i> UMKM dan Sumberdaya Wirausahawan	101
	4.6.4. Pertumbuhn ekonomi yang belum fokus pada sektor unggulan.....	102
	4.6.5. Disparitas pendapatan dan infrastruktur yang masih harus diselesaikan.....	102
	4.6.6. Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB	102
	4.6.7. Belum optimalnya penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung perekonomian.....	102



4.6.8. Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat serta berkualitas	103
4.6.9. Belum terbangunnya sistem penanggulangan bencana.....	103
4.6.10. Baiknya kualitas penataan ruang namun belum diiringi dengan luasan RTH Publik yang proporsional.....	103
4.6.11. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di pedesaan	103
4.6.12. Meningkatnya afirmasi terhadap perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender.....	104
4.6.13. Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam.....	104
4.6.14. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan	105
4.6.15. Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi.....	105

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Pembangunan Daerah	107
5.2. Misi Pembangunan Daerah	109
5.2.1. Misi 1.....	110
5.2.2. Misi 2.....	111
5.2.3. Misi 3.....	112
5.2.4. Misi 4.....	113
5.2.5. Misi 5.....	114
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	116
5.4. Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	121

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi Pembangunan Daerah.....	127
6.2. Arah Kebijakan	136

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum.....	141
7.2. Program Prioritas	149

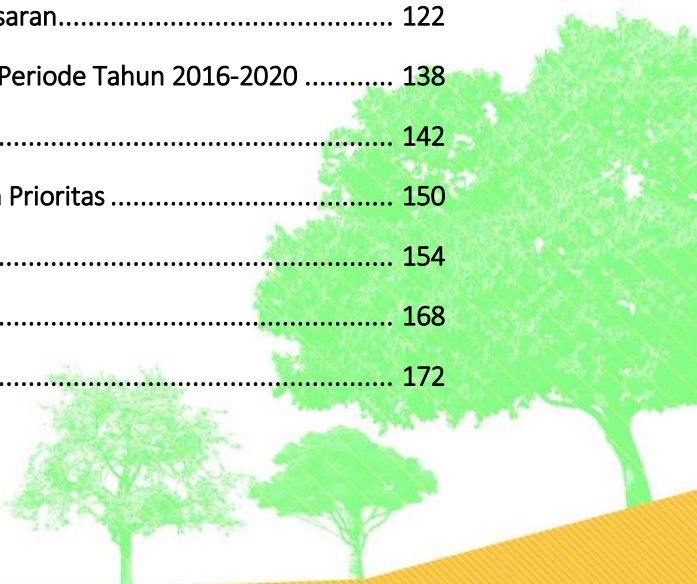
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	167
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	247
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN	
	10.1. Pedoman Transisi.....	251
	10.1. Kaidah Pelaksanaan	251



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.....	10
Tabel 2.2. Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi	11
Tabel 2.3. Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi.....	11
Tabel 2.4. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Banyuwangi.....	12
Tabel 2.5. Luas Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaan	13
Tabel 2.6. Prosentase penduduk yang memiliki lahan.....	13
Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014	16
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.....	16
Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015....	17
Tabel 2.10. Data Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015	20
Tabel 2.11. PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.....	22
Tabel 2.12. Inflasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	23
Tabel 2.13. 3 Dimensi IPM Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014	26
Tabel 2.14. Realisasi Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015.....	28
Tabel 2.15. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014.....	32
Tabel 2.16. Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	33
Tabel 2.17. Realisasi Indikator Bidang Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	35
Tabel 2.18. Realisasi Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014.....	41
Tabel 2.19. Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan.....	44
Tabel 2.20. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB.....	44
Tabel 2.21. Prosentase Lahan Bersertifikat.....	44
Tabel 2.22. Penyelesaian kasus tanah Negara.....	44
Tabel 2.23. Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	45
Tabel 2.24. Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011-2014	46
Tabel 2.25. Realisasi Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	47
Tabel 2.26. Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011-2014.	47
Tabel 2.27. Realisasi Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015.....	48

Tabel 2.28. Realisasi Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	53
Tabel 2.29. Iklim berinvestasi tahun 2011-2014	56
Tabel 2.30. Faktor Sumberdaya Mananusia tahun 2011-2014	57
Tabel 3.1. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	61
Tabel 3.2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	63
Tabel 3.3. Perbandingan Proporsi	64
Tabel 3.4. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	65
Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	66
Tabel 3.6. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015	67
Tabel 3.7. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015	70
Tabel 3.8. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	72
Tabel 3.9. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	74
Tabel 3.10. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	75
Tabel 3.11. Pengeluaran Wajib, Periodik dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2015	76
Tabel 3.12. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020	78
Tabel 3.13. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015	80
Tabel 3.14. Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020	81
Tabel 3.15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020	82
Tabel 3.16. Kerangka PendanaanAlokasi Keuangan Daerah	84
Tabel 5.1. Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021	108
Tabel 5.2. Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	122
Tabel 6.1. Tema Pembangunan Pertahun Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2016-2020	138
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan	142
Tabel 7.2. Definisi Agenda Politik Kepala Daerah kedalam Program Prioritas	150
Tabel 7.3. Indikator Program Pembangunan Daerah	154
Tabel 8.1. Pagu Indikatif Program Prioritas I	168
Tabel 8.2. Pagu Indikatif Program Prioritas II	172



Tabel 8.3. Pagu Indikatif Program Prioritas III	176
Tabel 8.4. Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan	177
Tabel 8.5. Kinerja Program Prioritas II dan Kerangka Pendanaan	201
Tabel 8.6. Kinerja Program Prioritas III dan Kerangka Pendanaan	223
Tabel 9.1. Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	248
Tabel 9.2. Proyeksi Capaian Indikator Sasaran (Impact) Tahun 2016-2020 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2016-2020	248





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	6
Gambar 2.1 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2014	18
Gambar 2.2 Wilayah Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	19
Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Kabupaten Banyuwangi	21
Gambar 2.4 PDRB Per Kapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014	23
Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015.....	24
Gambar 2.6 Indeks Gini di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014.....	25
Gambar 2.7 Perkembangan Angka IPM Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015.....	27
Gambar 2.8 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015.....	30
Gambar 2.9 Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan Tahun 2010-2014	39
Gambar 2.10 Prosentase Gizi Buruk Tahun 2010-2014.....	40
Gambar 2.11 Usia Harapan Hidup Tahun 2010-2014.....	41
Gambar 2.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015.....	42
Gambar 2.13 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015	43
Gambar 2.14 Realisasi 4 Indikator Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	45
Gambar 3.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015	62
Gambar 5.1 Logframe Perencanaan Terintegratif Misi 1.....	110
Gambar 5.2 Logframe Perencanaan Terintegratif Misi 2.....	111
Gambar 5.3 Logframe Perencanaan Terintegratif Misi 3.....	112
Gambar 5.4 Logframe Perencanaan Terintegratif Misi 4.....	113
Gambar 5.5 Logframe Perencanaan Terintegratif Misi 5.....	114
Gambar 5.6 Pondasi dan Pilar Misi dalam Pencapaian Visi.....	115
Gambar 5.7 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1	117
Gambar 5.8 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-2	118
Gambar 5.9 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3	118
Gambar 5.10 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-4	119
Gambar 5.11 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5	120
Gambar 6.1 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT	128

Gambar 6.2 Analisis SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	129
Gambar 6.3 Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan.....	137
Gambar 7.1 Ilustrasi Transformasi Agenda Politik Kepala Daerah	149
Gambar 7.2 Arsitektur Pemetaan Strategi dalam Kebijakan Umum Kabupaten Banyuwangi	165



WELCOME to BANYUWANGI



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2015, telah dilantik kepala daerah terpilih H. Abdullah Azwar Anas, M.Si sebagai Bupati dan Yusuf Widiyatmoko, S.Sos sebagai Wakil Bupati Banyuwangi periode 2016-2021 oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2016.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi kepala daerah terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Banyuwangi juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama.

Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. *Kedua*, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. *Ketiga*, pendekatan partisipatif.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan

ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. *Keempat*, pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan tiga pendekatan utama lain, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi program lintas perangkat daerah, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik, proses penyusunannya mau tidak mau harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan penyusunan, terlebih dahulu dilakukan

pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks gini, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Banyuwangi. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Banyuwangi ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

- a. Peraturan perundangan yang berlaku:
 1. Landasan idiil Pancasila
 2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- b. Landasan operasional sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

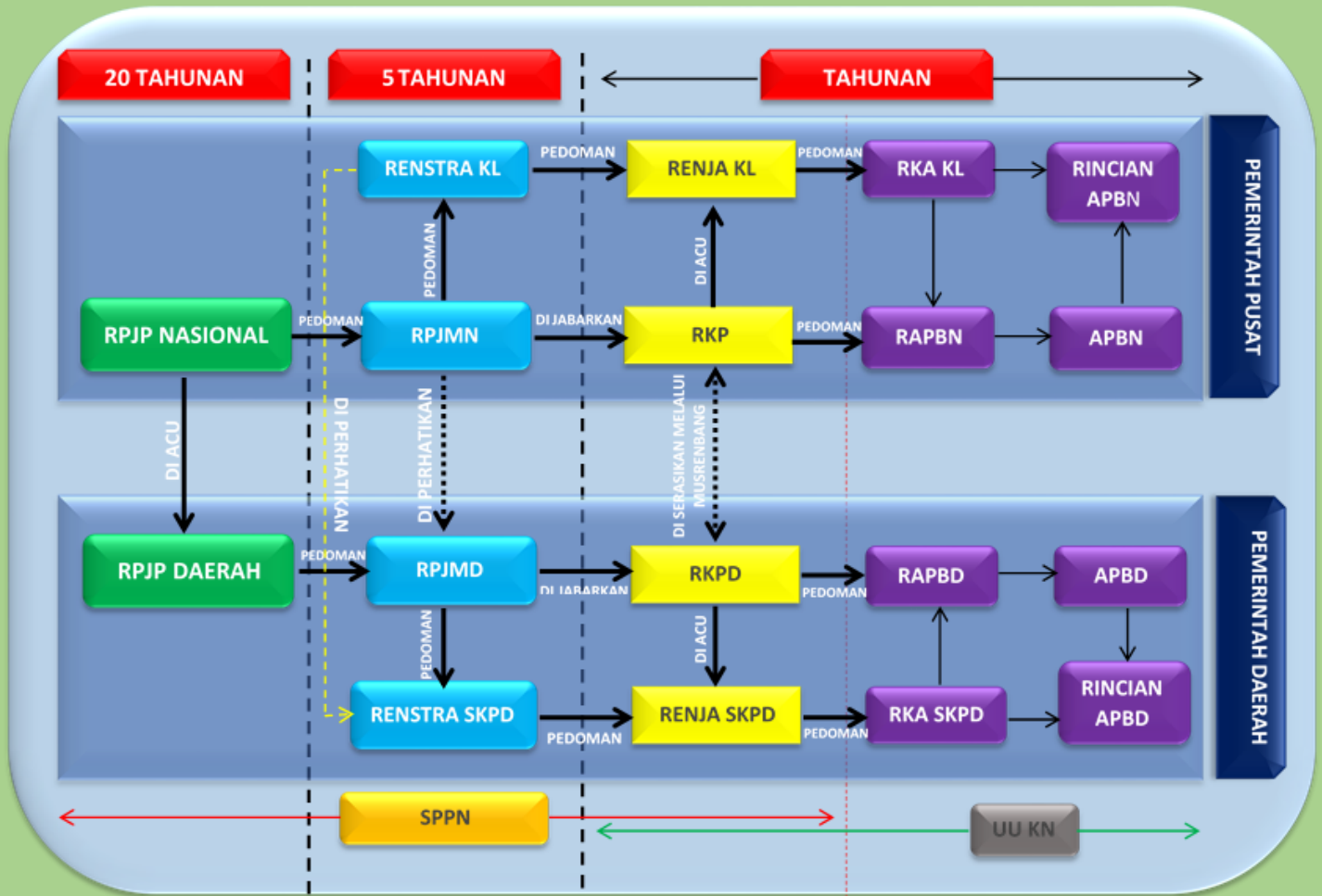
- Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
 31. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dan Perdagangan Orang;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1.1. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010 (Diolah dari berbagai Sumber)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen;
- 1.4. Sistematika Penulisan;
- 1.5. Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi;
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

2.3 Aspek Pelayanan Umum;

2.4 Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1 Kinerja Keuangan Daerah;
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan ;2016-2021;
- 3.3 Kerangka Pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

- 4.1 Analisis Tahapan RPJP Berjalan;
- 4.2 Analisis RPJM dan RPJMD Provinsi;
- 4.3 Platform Bupati Terpilih;
- 4.4 Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- 4.5 Permasalahan Pembangunan;

4.6	Isu-Isu Strategis.
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1	Visi Pembangunan Daerah;
5.2	Misi Pembangunan Daerah;
5.3	Tujuan dan Sasaran;
5.4	Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
6.1	Strategi Pembangunan Daerah;
6.2	Arah Kebijakan.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
7.1	Kebijakan Umum;
7.2	Program Prioritas.
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	
10.1	Pedoman Transisi;
10.2	Kaidah Pelaksanaan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud

RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan

jangka panjang (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Termasuk juga rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, semua dokumen operasional dalam perencanaan periode 2016-2021 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi harus mengacu pada RPJMD ini.

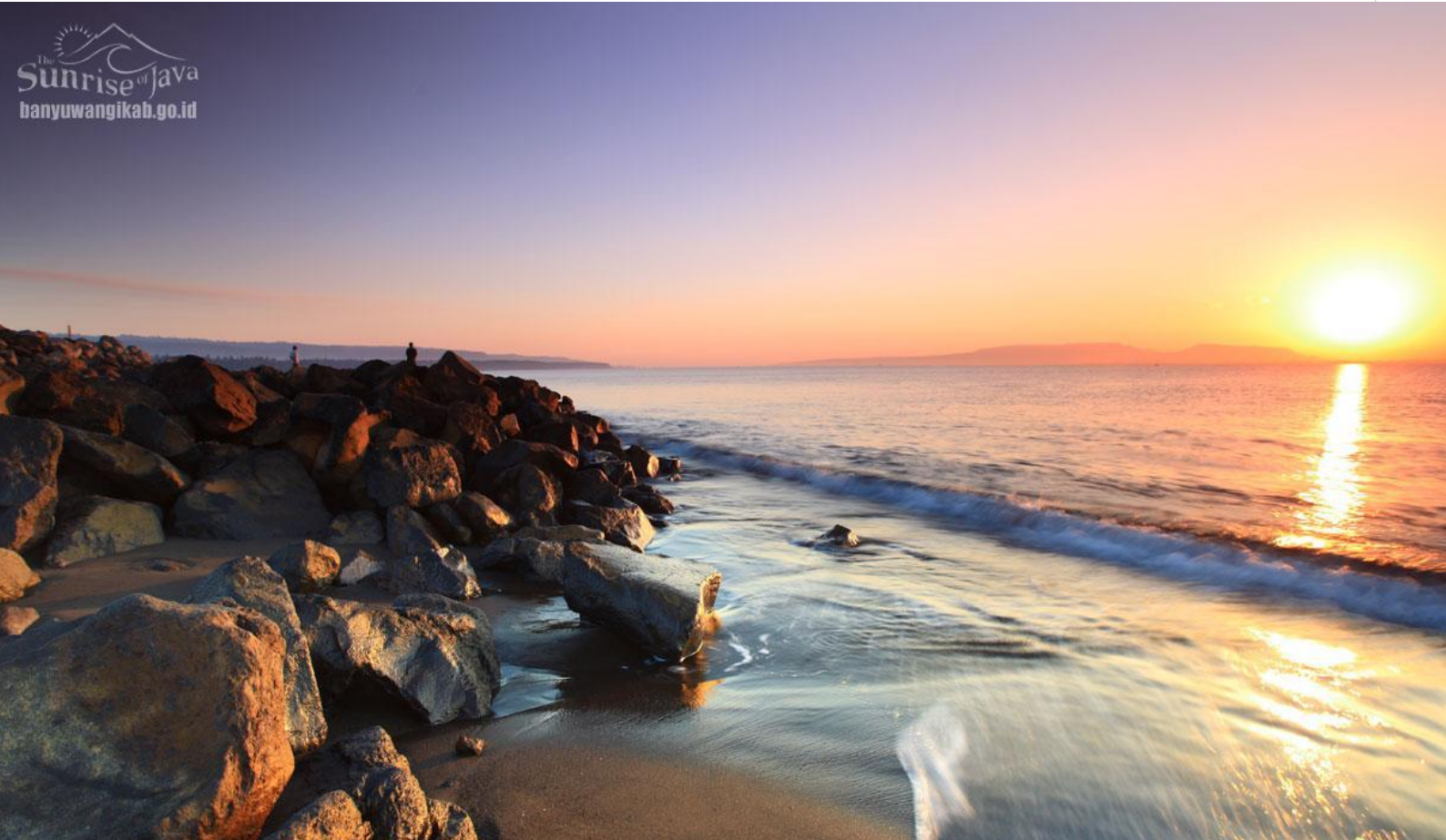
Tujuan

dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini antara lain:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Pembangunan daerah tahun 2016-2021;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis antara tahun 2016 sampai tahun 2021, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD antara tahun 2016 sampai tahun 2021;
4. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara tahun 2016 sampai tahun 2021;

5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan

memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia.





BAB II

GAMBARAN UMUM

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Banyuwangi, meliputi aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, untuk memberikan gambaran tentang potensi dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi guna menjadi sumber daya pokok bagi pengembangan di masa depan, berikut kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Dengan demikian, apa yang dibahas di bab ini merupakan fondasi tentang perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi lima tahun ke depan.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Letak Wilayah

Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa, memiliki luas wilayah 5.782,50 km² atau 578.250 Ha

dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut; sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak antara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur yang terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah pegunungan, merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkebunan. Dataran rendah dengan berbagai potensi yang berupa produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari sepanjang kurang lebih 175 km arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut dengan panjang pantai 175,8 Km.

Secara administratif Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 24 Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Pesanggaran	5	-
2	Siliragung	5	-
3	Bangorejo	7	-
4	Purwoharjo	8	-
5	Tegaldlimo	9	-
6	Muncar	10	-
7	Cluring	9	-
8	Gambiran	6	-
9	Tegalsari	6	-
10	Glenmore	7	-
11	Kalibaru	6	-
12	Genteng	5	-
13	Srono	10	-
14	Rogojampi	18	-
15	Kabat	16	-
16	Singojuruh	11	-
17	Sempu	7	-
18	Songgon	9	-
19	Glagah	8	2
20	Licin	8	-
21	Banyuwangi	-	18
22	Giri	2	4
23	Kalipuro	5	4
24	Wongsorejo	12	-
JUMLAH		189	28

Sumber: Banyuwangi Dalam Angka (BDA) Tahun 2015

2.1.2 Topografi

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya pegunungan dan bagian selatan sebagian besar dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Daratan rendah sebagaimana besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0–2.500 meter dari permukaan

laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas:

- Ketinggian 0-50 meter diatas permukaan laut (mdpl), merupakan wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang berada pada ketinggian tersebut meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Muncar, Purwoharjo, Tegaldlimo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran;
- Ketinggian 50-100 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi, Srono, Cluring, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran;
- Ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah Licin, Kabat, Cluring, Singojuruh, Rogojampi, Genteng, Sempu, Songgon, Glenmore, Kalibaru, Tegaldlimo, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Gambiran, Tegalsari;
- Ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah berbukit yang meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Licin, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Siliragung, Pesanggaran;
- Ketinggian 1000-2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan daerah pegunungan terletak di sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore, dan Kalibaru;
- Ketinggian diatas 2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi

sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore dan Kalibaru.

2.1.3 Geologi Dan Jenis Tanah

Kondisi geologi setiap wilayah bervariasi, serta memiliki peran bagi terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah tersebut. Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai susunan/struktur geologi seperti pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi		
Struktur Geologi	Luas	
	Ha	%
Aluvium	134.525,00	23,27
Hasil Gunung Api kwarter muda	170.310,50	29,43
Hasil Gunung Api kwarter tua	59.283,00	10,26
Andesit	47.417,75	8,20
Miosen falses semen	89.177,25	15,43
Miosen falsen batu gamping	77.536,50	13,41

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Adapun keadaan jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi		
Jenis Tanah	Luas	
	Ha	%
Regosol	138.490,87	23,96
Lithosol	39.031,88	6,75
Lathosol	14.109,30	2,44
Podsolik	384.684,75	60,3

Tabel 2.3 Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi

Jenis Tanah	Luas	
	Ha	%
Lain-Lain	37.433,70	6,55

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Tanah regosol terdapat pada wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Glenmore, Gambiran, Bangorejo, Cluring, Muncar, Purwoharjo dan Tegaldlimo. Tanah lithosol terdapat pada wilayah Kecamatan Kalibaru, Glenmore dan Pesanggaran. Tanah lathosol terdapat pada wilayah Kecamatan Purwoharjo dan Tegaldlimo. Tanah podsolik hampir terdapat pada seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali wilayah Kecamatan Cluring, Purwoharjo dan Muncar hanya sebagian kecil terdapat tanah podsolik.

2.1.4 Iklim

Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan equator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2015 mencapai 81,45 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan September, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret sebesar 225,9 mm;
2. Presentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2015 mencapai 82 %, terendah pada Bulan Januari

sebesar 57 % dan tertinggi pada Bulan September dan Oktober sebesar 998 %

3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2015 diperkirakan mendekati 78 %. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan Nopember dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 72 %. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan April dengan besaran 82 %;
4. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Juli dan Agustus 2015 sebesar 25,6 derajat celcius. Sedang tertinggi pada Bulan Nopember sebesar 29,60 derajat celcius.

2.1.5 Hidrologi

Ditinjau dari kondisi hidrologi Kabupaten Banyuwangi memiliki 35 Daerah Aliran Sungai (DAS). Berikut ini merupakan daftar DAS di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Banyuwangi

No	Nama DAS	Panjang (m)
1	Daerah Aliran Sungai Bajulmati	48.906
2	Daerah Aliran Sungai Sodong	2.850
3	Daerah Aliran Sungai Widoro Porong	6.869
4	Daerah Aliran Sungai Curah Alas Buluh	2.222
5	Daerah Aliran Sungai Selogiri	6.173
6	Daerah Aliran Sungai Sebani	2.782
7	Daerah Aliran Sungai Paleran	6.086
8	Daerah Aliran Sungai Dani	5.391
9	Daerah Aliran Sungai Ketapang	14.492
10	Daerah Aliran Sungai Kali Klatak	25.832
11	Daerah Aliran Sungai Sukowidi	31.252

Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Banyuwangi

No	Nama DAS	Panjang (m)
12	Daerah Aliran Sungai K. Banyuwangi	37.041
13	Daerah Aliran Sungai Bendo	36.257
14	Daerah Aliran Sungai Pakis	7.043
15	Daerah Aliran Sungai Tambong	100.403
16	Daerah Aliran Sungai Donosuka	13.773
17	Daerah Aliran Sungai Lungun	16.666
18	Daerah Aliran Sungai Binau	68.244
19	Daerah Aliran Sungai Bomo	49.007
20	Daerah Aliran Sungai Blambangan	128.634
21	Daerah Aliran Sungai Komis	10.250
22	Daerah Aliran Sungai Setail	189.540
23	Daerah Aliran Sungai Blambangan	222.128
24	Daerah Aliran Sungai Kaliagung	15.000
25	Daerah Aliran Sungai Sarongan	17.000
26	Daerah Aliran Sungai Kandangan	20.000
27	Daerah Aliran Sungai Lembu	1.250
28	Daerah Aliran Sungai Trembelang	6.000
29	Daerah Aliran Sungai Bangorejo	33.000
30	Daerah Aliran Sungai Besaran	10.000
31	Daerah Aliran Sungai Kedungrejo	8.000
32	Daerah Aliran Sungai Karang bendo	19.000
33	Daerah Aliran Sungai Kemut	20.000
34	Daerah Aliran Sungai Gambiran	65.000

Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Banyuwangi

No	Nama DAS	Panjang (m)
35	Daerah Aliran Sungai Bulu Agung	55.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

2.1.6 Penggunaan Lahan

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah ±5.782.50 km² yang sebagian berupa kawasan hutan seluas 183.396,34 ha atau 31,72 %, areal persawahan sekitar 65.457 ha atau 11,39%, kawasan perkebunan mencapai sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 %. Sedangkan areal permukiman sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%, selebihnya berupa jalan, ladang dan lain sebagainya.

Tabel 2.5 Luas Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaan

Penggunaan Wilayah	Luas
Hutan	31,72%
Permukiman	22,04%
Perkebunan	14,21%
Sawah	11,39%
Ladang	2,80%
Tambak	0,31%
Lain-Lain	17,53%

Sumber: BDA Tahun 2015 dan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

Sedangkan prosentase penduduk yang memiliki lahan dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah. Penduduk yang memiliki lahan setiap tahunnya cenderung meningkat. Pada tabel dibawah dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2011 prosentase kepemilikan tanah oleh masyarakat hanya sebesar 19% dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 24% pada tahun 2015.

Tabel 2.6: Prosentase penduduk yang memiliki lahan

No	Tahun	Persentase (%)
1	2011	19
2	2012	20
3	2013	22
4	2014	23
5	2015	24

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Banyuwangi 2010-2015

a. Kawasan budidaya

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Adapun Kawasan budidaya di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi, dengan luas 56.890 ha yang meliputi Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Licin, Kecamatan Glagah, Kecamatan Songgon, Kecamatan Sempu, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Siliragung, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Glenmore dan Kecamatan Kalibaru;
- 2) Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 18.375 ha, dan pengembangan kurang lebih 7.032 ha berada diseluruh kecamatan;
- 3) Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan;
- 4) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas kawasan peruntukan

- perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan; kawasan peruntukan pengolahan ikan, dan pengembangan fungsi pelabuhan perikanan;
- 5) Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan panas bumi;
 - 6) Kawasan peruntukan industri, terdiri dari industri besar, industri kecil dan menengah serta sentra industri;
 - 7) Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri dari daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata alam, dan daya tarik wisata buatan;
 - 8) Kawasan peruntukan permukiman, terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan;
 - 9) Kawasan andalan, terdiri dari kawasan andalan perikanan dan kawasan andalan pertanian;
 - 10) Kawasan peruntukkan sektor informal, terdiri dari penyediaan ruang kegiatan sektor informal /pedagang kaki lima dalam kawasan perkotaan serta penataan dan revitalisasi kawasan PKL pada pusat kegiatan perkotaan;
 - 11) Kawasan peruntukkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 12) Kawasan peruntukkan kawasan pertahanan dan keamanan.

b. Kawasan Lindung

Fungsi utama kawasan lindung adalah melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan. Kabupaten Banyuwangi memiliki 7 kawasan lindung, diantaranya:

- 1) Kawasan Hutan Lindung, dengan luas 57.079 ha, meliputi Kecamatan Wongsorejo; Kecamatan Kalipuro; Kecamatan Licin; Kecamatan Songgon; Kecamatan Sempu; Kecamatan Glenmore; Kecamatan Kalibaru; Kecamatan Pesanggaran; Kecamatan Siliragung; Kecamatan Bangorejo; Kecamatan Purwoharjo; dan Kecamatan Tegaldlimo;
- 2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, dengan luas kurang lebih 150.653 ha berupa kawasan resapan air meliputi Kecamatan Wongsorejo; Kecamatan Kalipuro; Kecamatan Licin; Kecamatan Songgon; Kecamatan Sempu; Kecamatan Glenmore; Kecamatan Kalibaru; Kecamatan Pesanggaran; dan Kecamatan Tegaldlimo;
- 3) Kawasan Perlindungan Setempat meliputi sempadan pantai; sempadan sungai; sempadan jaringan irigasi; kawasan sekitar danau atau waduk; kawasan rawa; kawasan sekitar mata air; dan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;
- 4) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya meliputi Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup dan Cagar Alam Jangganan Rogojampi. Kawasan suaka alam laut meliputi perairan sekitar pantai Pulau Tabuhan berada di Kecamatan Wongsorejo dan perairan sekitar pantai Pulau Merah berada di Kecamatan Pesanggaran. Kawasan suaka alam darat. Kawasan pantai meliputi Kecamatan Wongsorejo; Kecamatan Banyuwangi; Kecamatan Muncar;

Kecamatan Tegaldlimo; Kecamatan Purwoharjo; dan Kecamatan Pesanggaran. Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, kawasan Taman Nasional Meru Betiri, dan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas kawasan lingkungan non bangunan (kawasan Taman Sri Tanjung, kawasan Taman Blambangan, kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR), kawasan permukiman Suku Osing); kawasan lingkungan bangunan non gedung (makam Datuk Ibrahim, makam Buyut Wongsokarjo, makam Sayid Yusuf, situs Macan Putih, situs Ompak Songo, gumuk Klinting, gumuk Kantong berada di Kecamatan Muncar; dan situs Sitihinggil); kawasan lingkungan bangunan gedung dan halamannya (Masjid Agung Baiturrahman, Pendopo Kabupaten, Makam Bupati Banyuwangi kedua sampai dengan kelima, Klenteng Ho Tong Bio, Pura Giri Nathadan Bangunan yang memiliki nilai sejarah berupa Kantor Pos, Gedung Inggris, Gedung Juang, GedungLoji (SD Negeri Kepatihan), Markas Kodim 0825, Rumah Dinas Kodim 0825, dan Rumah Dinas Polres);

- 5) Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan rawan bencana alam meliputi, kawasan rawan gempa, kawasan rawan banjir, kawasan rawan kerentanan gerakan tanah, kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami, dan kawasan rawan kebakaran hutan;

- 6) Kawasan Lindung Geologi meliputi, Kawasan cagar alam geologi berupa situs geologi Teluk Grajagan berada. Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gempa dan kawasan rawan tsunami. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa Daerah Imbuan Air Tanah untuk cekungan air tanah (CAT) meliputi CAT Wonorejo merupakan CAT lintas kabupaten dengan luas 543 km², CAT Banyuwangi dengan luas 1.737 km², dan CAT Blambangan dengan luas 413 km²;
- 7) Kawasan Lindung Konservasi Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan meliputi: perairan Kayu Aking berada di Kecamatan Tegaldlimo; perairan Takatbulan berada di Kecamatan Wongsorejo; dan perairan Pulau Tabuhan berada di Kecamatan Wongsorejo.



2.1.7 Demografi

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014

No	Kelompok Umur (Tahun)	2011	2012	2013	2014	2015
1	0 – 4	87.395	89.041	87.677	92.796	95.832
2	5 – 9	114.590	114.385	110.355	113.441	123.023
3	10 – 14	127.444	128.982	128.930	128.688	130.707
4	15 – 19	120.511	119.676	117.620	123.820	127.551
5	20 – 24	125.380	126.121	122.739	123.469	122.544
6	25 – 29	141.489	135.113	130.009	135.022	115.820
7	30 – 34	142.633	147.044	145.131	139.454	127.818
8	35 – 39	142.464	139.389	137.234	136.243	132.157
9	40 – 44	132.122	138.655	137.514	137.525	136.970
10	45 – 49	116.701	113.825	118.729	126.812	127.632
11	50 – 59	94.321	174.124	179.796	187.327	114.716
13	60 – 64	74.653	63.275	64.405	66.734	95.788
14	65 – 69	61.238	48.027	49.452	51.860	69.830
15	70 – 74	50.180	42.116	43.904	41.430	56.005
16	> 75	83.360	47.696	53.635	49.554	41.766
JUMLAH		1.614.482	1.627.469	1.627.130	1.654.175	1.668.438

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2015

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 mencapai 1.668.438 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 838.856 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 829.582 jiwa.

Penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar berada di daerah pedesaan. Meskipun demikian, pada tahun 2015 secara rinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian, maka sebagian besar mata pencaharian yang dominan adalah swasta dari keseluruhan jumlah penduduk yaitu mencapai 462.956 jiwa atau 27,75%. Secara terperinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1.	Belum / Tidak Bekerja	443.342	26,57
2.	Pelajar / Mahasiswa	251.937	15,10
3.	Pertanian / Peternakan / Perikanan	308.092	18,47
4.	Perdagangan	30.419	1,82
5.	Industri	1.164	0,07
6.	Jasa Masyarakat	284	0,02
7.	Konstruksi	730	0,04
8.	Pemerintah	28.025	1,68
9.	Swasta	93.003	5,57
10.	Wiraswasta	462.956	27,75
11.	Lainnya	48.486	2,91
JUMLAH		1.668.438	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015



Sedangkan menurut kelompok tingkat pendidikan hingga tahun 2015 masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SD/Sederajat yaitu sebesar 586.501 atau 35,15 % dari jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 sebesar 1.668.438 jiwa, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Belum / Tidak Sekolah	466.184	27,94
2.	SD / Sederajat	586.501	35,15
3.	SLTP / Sederajat	287.110	17,21
4.	SLTA / Sederajat	272.767	16,35
5.	Diploma	14.319	0,86
6.	Strata I	39.628	2,38
7.	Strata II	1.775	0,11

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

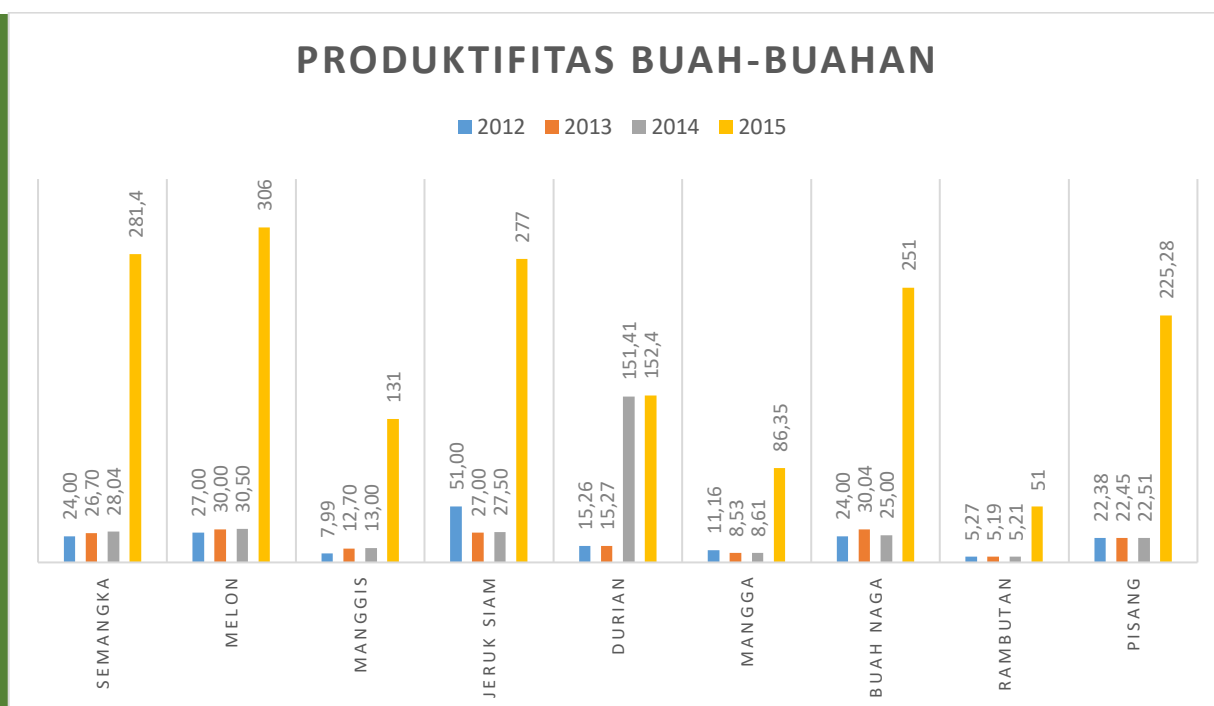
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
8.	Strata III	154	0,01
Jumlah		1.668.438	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pertanian dengan luas lahan sawah 65.547 Ha atau 11,39% dari luas total Kabupaten Banyuwangi. Potensi produksi pangan terutama dapat di lihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Jawa Timur, karena letak geografisnya yang bersebelahan dengan Pulau Bali, memiliki sumber daya alam yang sangat indah serta



Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2015

seni budaya serta adat istiadat yang khas, beragam dan terpelihara dengan baik. Sehingga pariwisata menjadi salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui konsep “ecotourism” serta *Diamond Triangel* dalam konsep Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP).

Konsep “ecotourism”, yaitu konsep pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan mengoptimalkan dan sekaligus melestarikan potensi alam dan budaya khas Banyuwangi secara berkelanjutan, pengembangan pariwisata menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Melindungi lingkungan yang dimanfaatkan;
- b. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pariwisata;
- c. Menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan dan

rekreasi dari nilai-nilai karakteristik (alam dan budaya setempat);

- d. Memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan ekonomi daerah;
- e. Menekan sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan pariwisata. (Sumber : Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA 2012).

Salah satu program pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah adanya pemetaan wilayah pengembangan pariwisata. *Diamond Triangle* dalam Konsep Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) terbagi menjadi tiga, diantaranya:

Keterangan :

- Batas WPP (didasarkan atas batas administrasi kecamatan, daya tarik dan kegiatan)
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Pantai
- Jalan Arteri
- Jalan Local
- Rel KA



Gambar 2.2: Wilayah Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA 2012)

a. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I

Merupakan wilayah kawasan hutan yang sesuai untuk kegiatan wisata "adventure" (petualangan) dan menikmati pemandangan alam, yaitu Kawah Ijen berada di Kecamatan Licin 45 km dari Kota Banyuwangi yang merupakan kawah danau terbesar di Pulau Jawa dengan kawah belerang berada dalam sulfatara di kedalaman sekitar 200 meter dan mengandung kira-kira 36 juta kubik air asam beruap. Kawah ijen didukung ekowisata *hinterland* meliputi Desa Wisata Kemiren, Perkebunan Kaliklatak, Perkebunan Selogiri dan Perkebunan Kalibendo.

b. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) II

Merupakan wilayah dengan jenis objek wisata yang sebagian besar berada di sekitar perairan pantai dan mempunyai aksesibilitas rendah, yaitu Pantai Plegkung terletak di pantai selatan Banyuwangi dan berada di wilayah Kecamatan Tegaldimo dengan jarak dari Banyuwangi sekitar 86 km. Pantai Plegkung sebagai pantai terbaik untuk *surfing* dan biasa disebut *G-Land*. Bulan Mei-Oktober adalah bulan terbaik untuk *surfing*. Pantai Plegkung didukung ekowisata *hinterland* meliputi *G-Land* (Grajagan Land), Alas Purwo (Goa Istana), Padang Savana Sadengan dan Pantai Mangrove Bedul.

c. Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) III

Merupakan wilayah dengan objek wisata yang sebagian besar mempunyai keunikan sumber daya alam yaitu Pantai Sukamade yang berada di wilayah Kecamatan Pesanggaran berjarak sekitar 97 km ke arah barat daya Banyuwangi. Pantai Sukamade merupakan hutan lindung di Jawa Timur yang terkenal dengan penangkaran penyu, dimana penyu betina yang biasa bertelur hingga ratusan butir diletakkan di dalam pasir pantai. Bulan November hingga Maret adalah musim penyu bertelur. Pantai Sukamade didukung ekowisata *hinterland* meliputi Pantai Rajegwesi, Teluk Hijau, Pantai Pancer dan Pulau Merah serta Taman Nasional Meru Betiri

Pengembangan kawasan wisata alam dan pengembangan wisata budaya melalui penyelenggaraan kegiatan Banyuwangi Festival dalam rangka memperingati Hari Jadi Banyuwangi ke-243 Tahun 2014, tentunya berpengaruh pada kenaikan jumlah pengunjung wisatawan domestik maupun wisatawan asing pada tahun 2014. Pengunjung obyek wisata domestik (wisatawan domestik) di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 mencapai 540.669 orang yang menginap di hotel dan 1.926.179 yang melakukan kunjungan obyek wisata. Sedangkan pengunjung obyek wisata asing (wisatawan asing) di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 mencapai 59.597 orang yang menginap di hotel dan 46.214 orang yang melakukan kunjungan obyek wisata.

Tabel 2.10 Data Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

Wisatawan	Jumlah (orang)	
	Hunian Hotel	Kunjungan Obyek Wisata
Wisatawan domestik	540.669	1.926.179
Wisatawan asing	59.597	46.214
JUMLAH	600.266	1.972.393

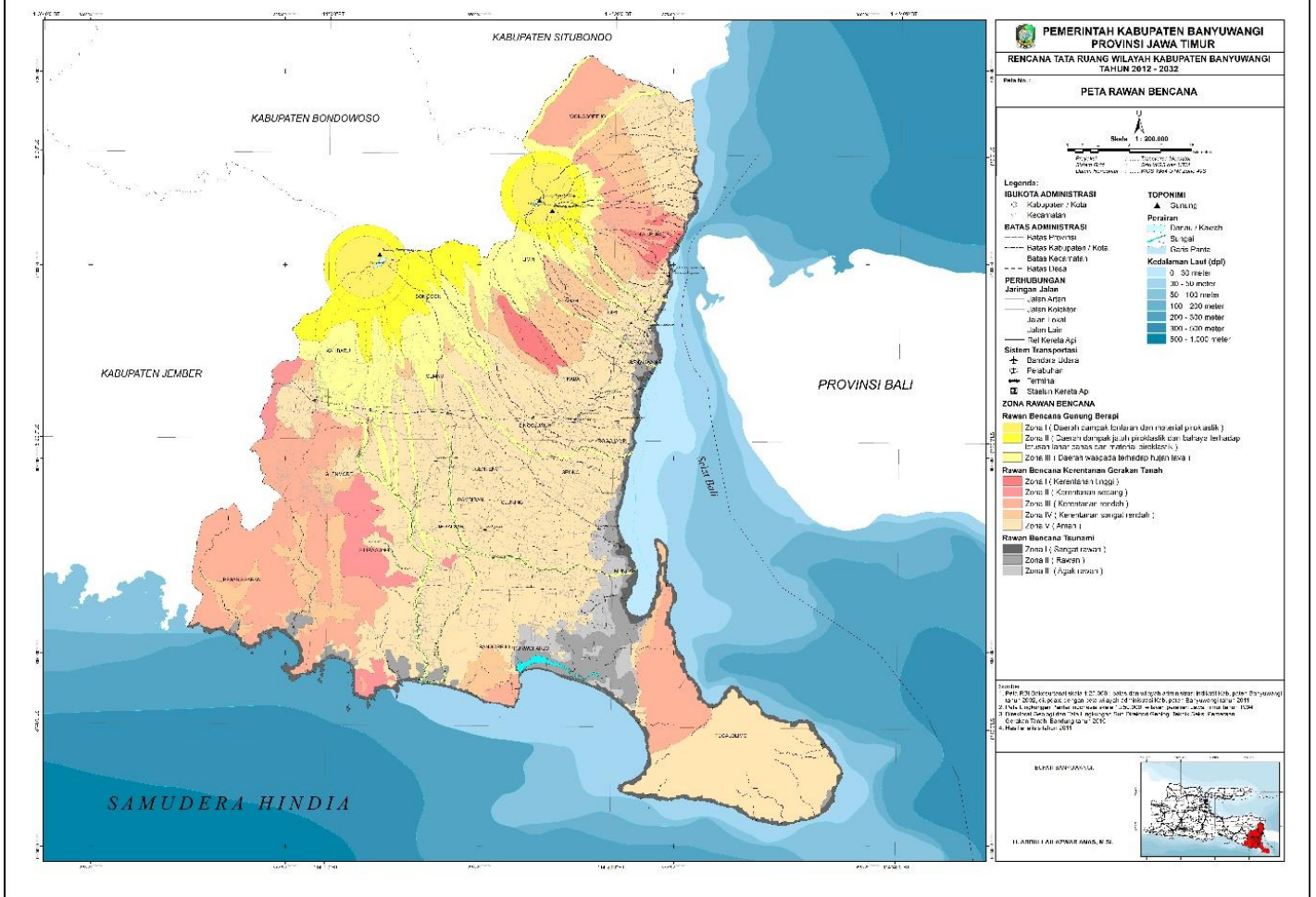
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

2.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi meliputi bencana tsunami, gunung berapi, banjir, dan tanah longsor, dapat dilihat pada gambar 2.3.

Dari semua potensi bencana yang ada, bencana letusan gunung api dari Gunung Ijen merupakan bencana yang rawan terjadi di kabupaten Banyuwangi. Gunung tersebut hingga saat ini masih aktif dan memiliki sebaran lahar yang cukup luas. Kawasan rawan bencana secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Kawasan rawan gempa meliputi:
 - a. Kecamatan Pesanggaran;
 - b. Kecamatan Siliragung;
 - c. Kecamatan Bangorejo;
 - d. Kecamatan Purwoharjo;
 - e. Kecamatan Tegaldlimo;
 - f. Kecamatan Kalibaru;
 - g. Kecamatan Glenmore;
 - h. Kecamatan Genteng;
 - i. Kecamatan Gambiran;
 - j. Kecamatan Cluring;
 - k. Kecamatan Srono;
 - l. Kecamatan Singojuruh;
 - m. Kecamatan Muncar;
 - n. Kecamatan Rogojampi;



Gambar 2.3: Peta Rawan Bencana Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi 2013

- o. Kecamatan Kabat; dan
- p. Kecamatan Banyuwangi.
2. Kawasan rawan banjir meliputi:
 - a. Kecamatan Banyuwangi;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Muncar;
 - d. Kecamatan Purwoharjo; dan
 - e. Kecamatan Kalibaru.
3. Kawasan rawan kerentanan gerakan tanah meliputi:
 - a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Licin;
 - c. Kecamatan Glagah;
 - d. Kecamatan Kalipuro;
 - e. Kecamatan Kabat;
 - f. Kecamatan Songgon;
 - g. Kecamatan Siliragung;
 - h. Kecamatan Pesanggaran;
 - i. Kecamatan Kalibaru; dan
 - j. Kecamatan Glenmore.
4. Kawasan rawan letusan gunung api meliputi:
 - a. Kecamatan Songgon;
 - b. Kecamatan Licin;
 - c. Kecamatan Glagah;
 - d. Kecamatan Kalipuro;
 - e. Kecamatan Wongsorejo;
 - f. Kecamatan Glenmore;
 - g. Kecamatan Sempu; dan
 - h. Kecamatan Kalibaru.
5. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami,
 - a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Banyuwangi;
 - d. Kecamatan Kabat;
 - e. Kecamatan Rogojampi;
 - f. Kecamatan Muncar;
 - g. Kecamatan Tegaldlimo.
 - h. Kecamatan Purwoharjo;
 - i. Kecamatan Bangorejo;
 - j. Kecamatan Siliragung; dan
 - k. Kecamatan Pesanggaran.

6. Kawasan rawan kebakaran hutan meliputi:
 - a. Kecamatan Wongsorejo;
 - b. Kecamatan Kalipuro;
 - c. Kecamatan Licin;
 - d. Kecamatan Glagah;
 - e. Kecamatan Songgon;
 - f. Kecamatan Sempu;
 - g. Kecamatan Purwoharjo;
 - h. Kecamatan Tegaldlimo;
 - i. Kecamatan Bangorejo.
 - j. Kecamatan Tegalsari;
 - k. Kecamatan Kalibaru;
 - l. Kecamatan Glenmore;
 - m. Kecamatan Siliragung; dan
 - n. Kecamatan Pesanggaran.

Selama kurun waktu tahun 2010-2015 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010-2015, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil.

Tabel 2.11 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015

Tahun	ADHB (dalam triliun)	ADHK (dalam triliun)
2010	32,46	32,46
2011	36,95	34,72
2012	42,11	37,24
2013	47,36	39,73
2014	53,41	41,99
2015	60,22	44,52

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2015

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) daerah. Di akhir 2010 PDRB ADHB Banyuwangi Rp 32,46 triliun, tahun 2011 meningkat menjadi 36,95 triliun, meningkat Rp 42,11 triliun pada tahun 2012, meningkat Rp 47,36 triliun pada tahun 2013, meningkat Rp 53,41 triliun pada tahun 2014, dan menjadi sebesar 60,22 triliun pada akhir 2015. Sedangkan capaian PDRB ADHK pada tahun 2011 sebesar Rp 34,72 triliun, meningkat Rp 37,24 triliun pada tahun 2012, meningkat Rp 39,73 triliun di 2013, naik menjadi 41,99 di tahun 2014, pada tahun 2015 mencapai 44,52 Trilyun. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Sedangkan untuk Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode

ke periode atau dari tahun ke tahun, sedangkan Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik.

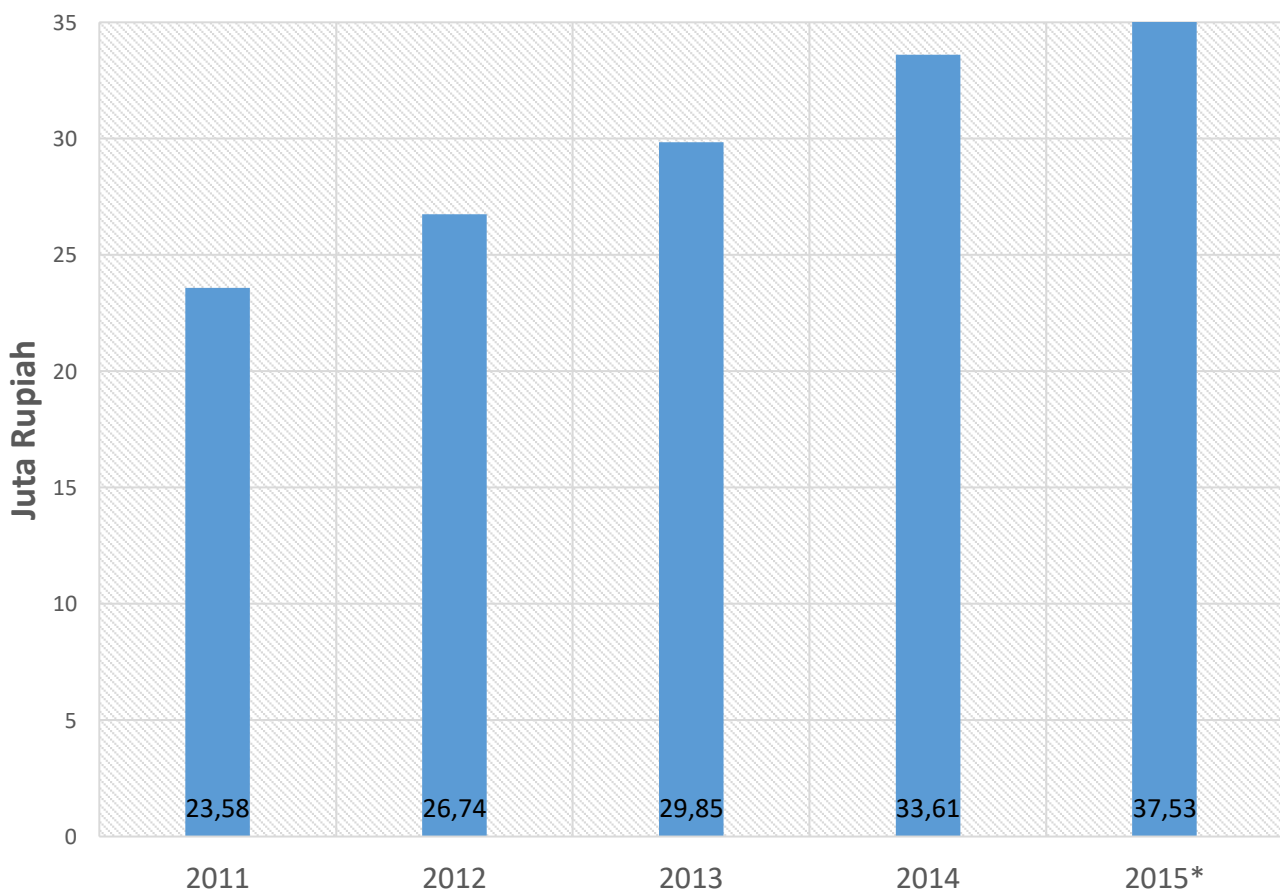
Banyuwangi pada tahun 2015 mengalami inflasi sebesar 2,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,59% (yoy) maupun dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebesar 3,08% dan 3,35% (yoy). Penyumbang utama inflasi pada tahun 2015 berasal dari kelompok bahan makanan 2,42%, makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 0,19%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,38%, kelompok kesehatan sebesar 0,04% dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,22%.

Tabel 2.12 Inflasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

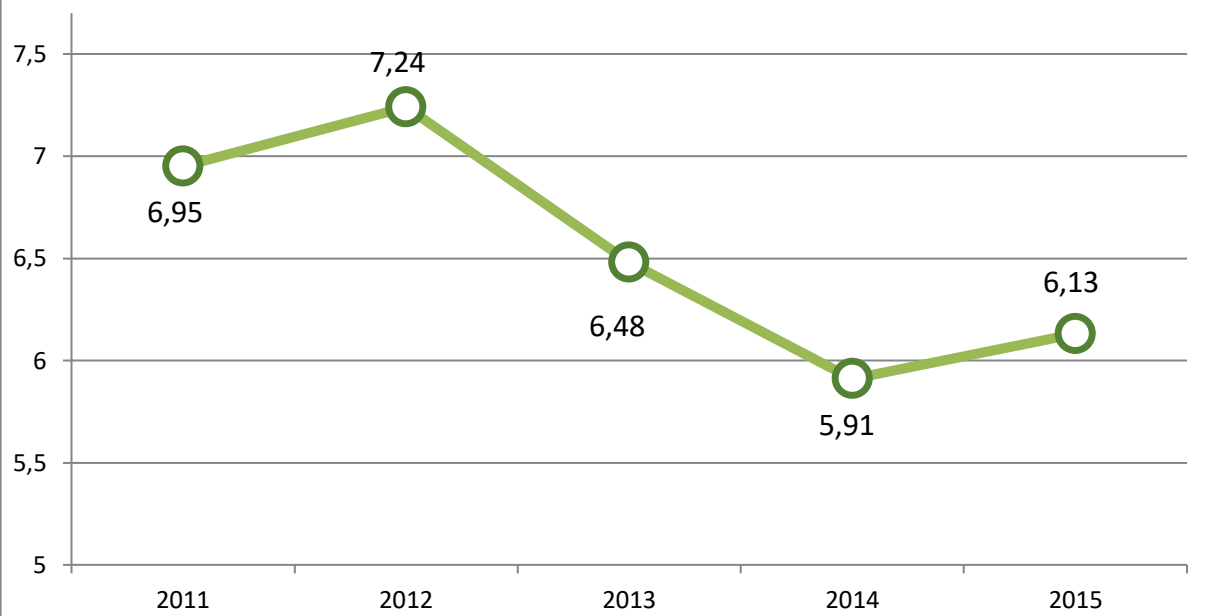
Tahun	Inflasi
2011	4,90
2012	6,24
2013	7,10
2014	6,59
2015	2,15

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2015

Sementara kelompok sandang dan kelompok pendidikan, rekreasi, olah raga terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,66% dan 0,01%. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur, laju inflasi Banyuwangi menempati urutan kedua terendah setelah Kediri 1,71% (yoy).



Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2015



Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2015

Sementara itu tingginya inflasi kelompok makanan dan minuman,, rokok dan tembakau, selain itu dampak lanjutan kenaikan harga bahan makanan terhadap makanan jadi, juga karena kenaikan rokok yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Capaian indikator PDRB per kapita Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2011 sebesar Rp 23,58 juta, tahun 2012 sebesar Rp 26,74 juta, tahun 2013 meningkat menjadi Rp 29,85 juta dan tahun 2014 meningkat menjadi Rp 33,61 juta.

Lonjakan tajam PDRB per kapita Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu empat tahun terakhir dipengaruhi oleh sektor pariwisata dan menjangkau investor untuk berinvestasi di kabupaten Banyuwangi. Pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Tahun 2011 pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 23,6 juta kemudian meningkat di tahun 2012

sebesar Rp 26,7 juta, tahun 2013 meningkat sebesar Rp 29,8 juta dan tahun 2014 mengalami peningkatan hingga Rp33,6 juta.

Meskipun PDRB Perkapita mengalami kenaikan setiap tahunnya, Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi cenderung sedikit mengalami penurunan karena pengaruh ekonomi global, tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi sebesar 6,95%, mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 7,24%, di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,48%, di tahun 2014 capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,91% dan tahun 2015 naik kembali menjadi sebesar 6,13 %. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami fluktuasi, namun rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap tahun di atas rata-rata nasional.

Pergerakan ekonomi Banyuwangi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dikonstruksi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata 34,47 persen. Sektor pertanian tidak hanya menjadi

andalan Banyuwangi, namun juga sektor yang diandalkan di level Jawa Timur. Pertumbuhan dan kontribusi sektor ini di Banyuwangi melampaui Jawa Timur. Sektor pertanian termasuk didalamnya sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, merupakan sektor yang menghidupi mayoritas penduduk Banyuwangi (*market share*) paling besar, yang menjadi hajat hidup orang banyak.

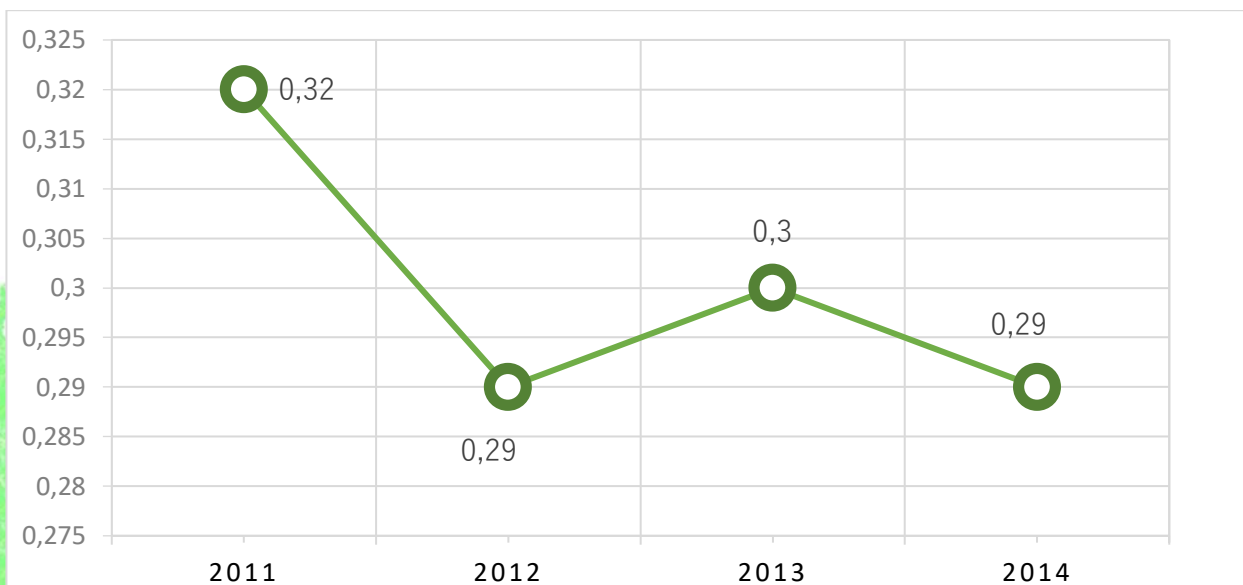
Sementara itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, meskipun tidak dominan dalam memberi kontribusi ekonomi Banyuwangi, namun menjadi lokomotif utama yang mengangkat tumbuhnya perekonomian. Sektor ini pada tahun 2011 tumbuh 9,08 persen dan pada tahun 2014 mencapai posisi 10,33 persen dan pada tahun 2015 mencapai 11,40 persen melampaui total pertumbuhan ekonomi Banyuwangi. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi unggulan utama, hanya tumbuh rata-rata 5,27 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini Banyuwangi dalam proses transformasi, dari Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan ke sektor jasa. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, di samping pertumbuhannya lambat, kontribusinya terhadap total PDRB semakin tahun semakin menurun. Pada tahun 2011-2013 kontribusi sektor pertanian pada posisi diatas 34,62 persen, maka pada tahun 2010 turun menjadi 46 persen dan turun lagi pada posisi 33,71 persen pada tahun 2014-2015.

Sedangkan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Banyuwangi, ditentukan oleh sub sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum yang ditunjang dari berkembangnya pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.

Peningkatan PDRB Perkapita serta Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu indikator peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat melalui indeks gini. Indeks gini merupakan salahsatu ukuran pemerataan



Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2015

Gambar 2.6: Indeks Gini di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014

ekonomi atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang nilai indeksnya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Berikut capaian indeks gini di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2014.

Data series indeks gini dari tahun 2014 hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks gini di Kabupaten Banyuwangi sempat mengalami kenaikan sebesar 0.01 pada tahun 2013 dari 0.29 pada tahun 2012 menjadi 0.3 pada tahun 2013. Kenaikan indeks gini tersebut berhasil ditekan kembali sehingga pada tahun 2014 besar nilai indeks gini kembali turun menjadi 0.29.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya melalui berbagai upaya dan berbagai pendekatan.

Salah satu cara untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial adalah melihat nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dibentuk dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan yaitu indeks Kesehatan, Dimensi Pendidikan yaitu indeks Pendidikan yang meliputi angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, serta yang terakhir adalah dimensi pengeluaran meliputi indeks daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang disusun dengan menggunakan pendekatan model adaptasi dari *The United Nations Development Programme (UNDP)* dalam menghitung *Human Development Index (HDI)*.

Berikut IPM kabupaten Banyuwangi beserta komponen pembentuknya:

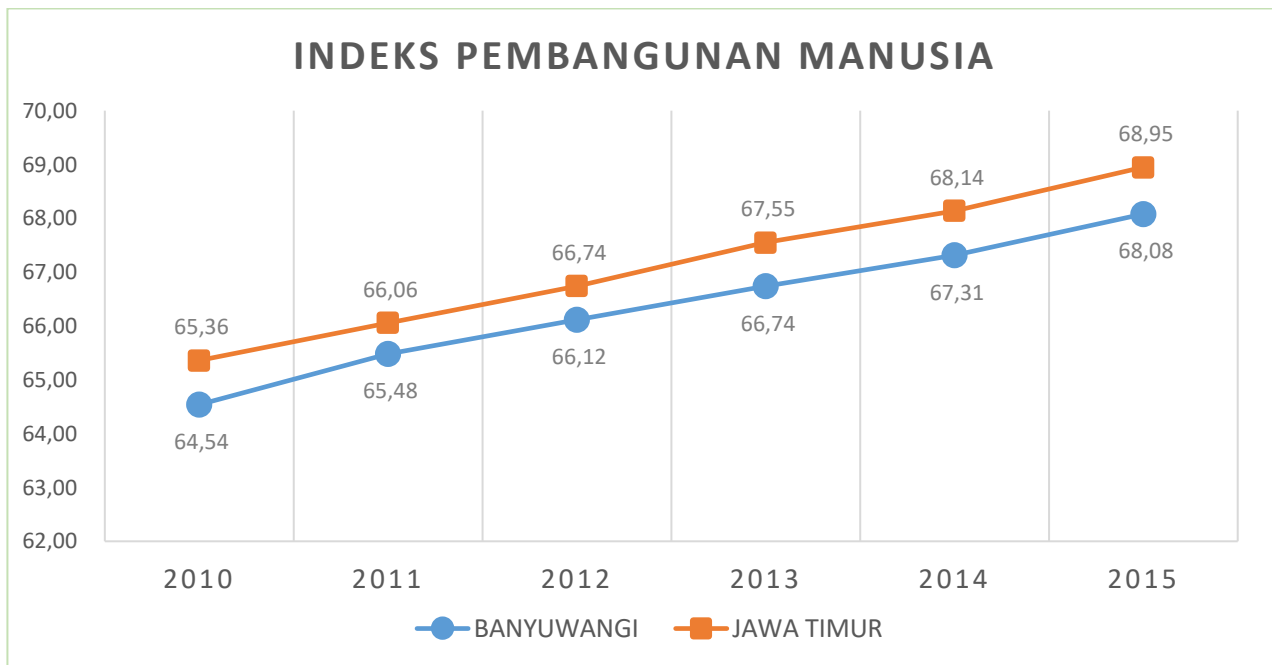
Pemerintah	Angka Harapan Hidup						Indeks Kesehatan					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Banyuwangi	69.61	69.70	69.79	69.88	69.93	70.03	76.32	76.46	76.60	76.74	76.82	76.97
Jawa Timur	69.89	70.02	70.14	70.34	70.45	70.68	76.75	76.95	77.14	77.45	77.62	77.97

Dimensi Pengeluaran

Pemerintah	Pengeluaran						Indeks Daya Beli					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Banyuwangi	9261.76	9741	10118	10341	10379	10691.8	67.79	69.33	70.49	71.16	71.27	72.18
Jawa Timur	9002.02	9396	9797	9978	10012	10383.4	66.92	68.23	69.51	70.07	70.17	71.29

Dimensi Pendidikan

Pemerintah	Rata-rata Harapan Lama Sekolah						Rata-rata Lama Sekolah						Indeks Pendidikan					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Banyuwangi	11.04	11.22	11.25	11.39	11.81	12.20	6.38	6.53	6.68	6.84	6.87	6.88	51.93	52.93	53.52	54.44	55.71	56.82
Jawa Timur	11.49	11.62	11.74	12.17	12.45	12.66	6.73	6.79	6.85	6.90	7.05	7.14	54.35	54.91	55.44	56.81	58.08	58.97



Gambar 2.7 : Perkembangan Angka IPM Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2015

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun IPM Kabupaten Banyuwangi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Timur. Selain itu pertumbuhan IPM Kabupaten Banyuwangi juga harus diperhatikan lebih intensif lagi karena jika dilihat trend pertumbuhannya, IPM Kabupaten Banyuwangi memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2010-2014.

Sedangkan jika dilihat dari dimensi-dimensi pembentuknya, pada dimensi kesehatan Angka harapan hidup (AHH) di banyuwangi fluktuatif setiap tahunnya, sedangkan indeks kesehatan cenderung stagnan di nilai 0.77. AHH dan indeks tersebut juga masih berada dibawah AHH dan Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pada dimnsi Pengeluaran, angka pengeluaran di banyuwangi dari tahun 2010 hingga tahun 2014 lebih besar daripada angka pengeluaran Provinsi Jawa

Timur yang mencapai 10379 pada tahun 2014. Sepertihalnya angka pengeluaran indeks daya beli juga mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berada diatas provinsi Jawa Timur. Pada dimensi pendidikan, seluruh komponen penyusunnya yang meliputi Rata-rata Harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah, dan Indeks Pendidikan dari tahun 2010 hingga tahun 2014 memiliki trend naik setiap tahunnya. Namun walaupun memiliki trend naik setiap tahunnya, nilai pada ketiga indeks tersebut masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Detail ketercapaian seluruh indikator ketenagakerjaan dari tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,12	2,54	1,08	1,69	2,03
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69.24	73.37	72.92	72.02	72,87
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	67,9	69,7	70,8	69,2	73,19
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.71	3,40	4,69	7,17	2,55
5.	Keselamatan dan perlindungan (%)	87,47	12,64	79,38	64,37	98,33
6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	28,59	26,67	25,5	26,67	26,67

Sumber: BPS dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, 2015

Berdasarkan data capaian tersebut, kondisi partisipasi masyarakat dalam mengisi kesempatan kerja masih belum optimal sehingga memerlukan upaya pengentasan pengangguran yang tepat. Kondisi ini dapat dilihat dari dua indikator yang menjadi tolok ukur pembangunan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Realisasi capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2011 sebesar 69,24%, tahun 2012 sebesar 73,37%, tahun 2013 sebesar 72,92% tahun 2014 sebesar 72,02% dan tahun 2015 sebesar 72,87%.

Kondisi ini serupa dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada tahun 2011 sebesar 3,71%, tahun 2012 turun menjadi 3,40% kemudian naik 4,69% di tahun 2013, dan tahun 2014 mengalami kenaikan kembali yang cukup tinggi mencapai 7,17% dan kembali turun sangat signifikan menjadi 2,55%. Artinya kondisi partisipasi kerja di Kabupaten Banyuwangi masih berada pada kondisi cukup ideal dengan melihat peluang kerja yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk lokal secara baik. Kenaikan yang sangat tajam hal ini karena terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor jasa serta perkembangan bidang pariwisata di Kabupaten Banyuwangi serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh



pemerintah melalui berbagai program pembangunan seperti pelatihan bahasa asing, internet marketing, job fair untuk mendukung penyiapan tenaga kerja di sektor jasa.

Pada indikator pencari kerja yang ditempatkan perkembangan setiap tahun cukup fluktuatif, tahun 2011 sebesar 67,9%, meningkat tahun 2012 sebesar 69,7%, tahun 2013 sebesar 70,8%, tahun 2014 sebesar 69,2% dan tahun 2015 sebesar 73,2%. Urusan ketenagakerjaan juga memberikan gambaran terkait hubungan pekerja dan pengusaha. Hal ini menjadi penting dikarenakan dapat menunjukkan tingkat kenyamanan pekerja yang dapat diukur melalui indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun. Capaian indikator tersebut pada tahun 2011 2,12%, tahun 2012 sebesar 2,54%,

tahun 2013 sebesar 1,08%, pada tahun 2014 sebesar 1,69% dan pada tahun 2015 sebesar 3,22%. Artinya angka ini masih menunjukkan rendahnya potensi sengketa pekerja dengan pengusaha. Kondisi ini sudah ideal berada kisaran 1-2%. Perihal yang menjadi penyebab persengketaan pekerja dan pengusaha adalah masalah pengupahan dan adanya hak-hak pekerja lainnya yang belum terpenuhi. Namun dengan melihat angka capaian terdapat permasalahan internal yaitu adanya satuan ukuran antara target dan realisasi tidak sama sehingga menghasilkan angka yang besar. Oleh karena itu, upaya tindak lanjut ke depan adalah meningkatkan pemberian sosialisasi terhadap perusahaan atas hak-hak pekerja secara berkesinambungan. Ketercapaian indikator sengketa memang

masih tergolong kurang ideal karena lebih disebabkan hubungan internal pekerja dan pengusaha.

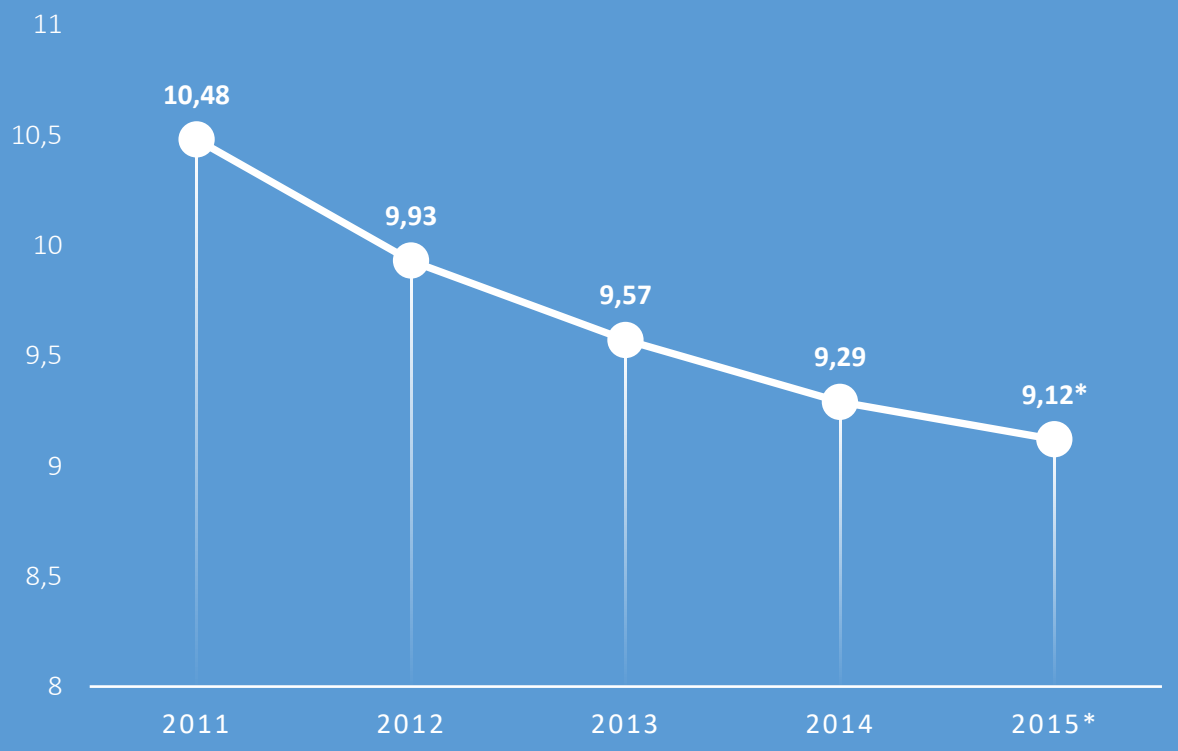
Namun berbeda halnya dengan indikator lainnya yang berkenaan dengan hubungan pekerja dan pengusaha adalah indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang memiliki ketercapaian cukup fluktuatif. Capaian indikator tersebut pada tahun 2011 pada posisi 28,59%, tahun 2012 menurun menjadi 26,67%, 2013 sebesar 25,5% dan pada tahun 2014 pada posisi 26,67%. Sedangkan rencana tindak lanjut atas pencapaian indikator tersebut dengan diadakan sebuah mediasi setiap triwulan melalui pembentukan forum pemerintah, buruh, dan pengusaha.



Selain angka persengketaan, terdapat pula indikator lainnya yang masih memerlukan upaya peningkatan guna menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kenyamanan pekerja. Indikator tersebut adalah Keselamatan dan perlindungan. Capaian indikator Keselamatan dan perlindungan pada tahun 2011 sebesar 87,47% dan kemudian menurun hingga

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan

Gambar 2.8: Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2015

12,64% pada tahun 2012, tahun 2013 meningkat kembali menjadi 79,38, sedangkan capaian ditahun 2014 sebesar 64,37% Kondisi fluktuatifnya capaian ini lebih disebabkan sulitnya melakukan identifikasi data kecelakaan kerja dan kurangnya koordinasi antara Dinas sosial tenaga kerja dengan pengusaha terkait jaminan keselamatan kerja. Upaya serius diperlukan melalui pengembang sistem Jamsostek bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan.

Terlebih dalam memberikan masukan (*input*) dan melakukan perencanaan strategis (*strategic planning*) terkait dengan kebijakan pemerintah. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik disetiap tahunnya. Seperti tersaji dalam gambar 2.8 berikut:

Pada gambar 2.8 terlihat bahwa ditahun 2011 tingkat kemiskinan yang ada

di Kabupaten Banyuwangi sebesar 10,48%. Kemudian di tahun 2012 angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi berada pada angka 9,93% dari total penduduk. Ditahun 2013 kembali turun positif dari angka 9,57% dan kembali turun menjadi 9,29% ditahun 2014 dan diperkirakan capaian tahun 2015 akan kembali turun pada kisaran angka 9.12%. Hal ini merupakan hal yang positif, mengingat aspek penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah kondisi sandang, pangan dan papan penduduk. Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan.

Kabupaten Banyuwangi menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*Family Based-Policy*), rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga miskin) Penanggulangan Kemiskinan berbasis Komunitas. Strategi ini bertujuan membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) arat

Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar. Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses mereka kepada permodalan, teknologi dan pasar, sehingga peningkatan pendapatan dapat lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW. Selain itu implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Adapun hasil dari berbagai



inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan 'Pro-Poor Award' untuk Kabupaten Banyuwangi dibidang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) pada tahun 2012 dan Perlindungan dan bantuan sosial tahun 2014.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dengan indicator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah geung, Data situs yang ditangani, serta pengelolaan pemuda dan olahraga meliputi Jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olah raga. Adapaun capaian fokus tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Capaian indikator yang mengalami kurang optimalnya yaitu, Jumlah grup kesenian yang terealisasi 652 grup di tahun 2011, meningkat menjadi 685 grup pada tahun 2012 dan kemudian menurun pada 528 grup di tahun 2013 dan meningkat kembali menjadi 787 grup di tahun 2014. Hambatan peningkatan pembentukan kelembagaan grup disebabkan karena rendahnya kemauan masyarakat dalam upaya pelestarian seni, khususnya seni gandrung terlebih pada kalangan remaja.

Disamping itu, pada tahun 2011 dan tahun 2012 Kabupaten Banyuwangi memiliki 1 gedung kebudayaan, dan pada tahun 2013 dan tahun 2014 memiliki 2 gedung kebudayaan. Selain itu, angka situs yang tertangani pada tahun 2011 sebanyak 23 situs, dan meningkat di tahun 2012 menjadi 25 situs, namun pada tahun 2013 dan tahun 2014 turun menjadi 23 situs.

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Kebudayaan						
	1.1	Jumlah grup kesenian	652	658	528	782	782
	1.2	Jumlah gedung	1	1	2	2	2
	1.3	Data situs yang ditangani	23	25	23	23	23
2	Pemuda dan Olahraga						
	2.1	Jumlah klub olahraga	61	2.871	2.871	2.871	2.871
	2.2	Jumlah gedung olahraga	1	2	2	2	2

Tabel 2.15: Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2015



2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan urusan wajib sebagai upaya untuk mencapai salah satu misi Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2015 yakni *“Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya”*. Kabupaten Banyuwangi memiliki indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian urusan pendidikan tersebut

Pada Urusan Pendidikan, terdapat beberapa indikator meliputi Angka Partisipasi kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Adapun capaian kinerja indikator perkembangan kinerja Angka Partisipasi Murni (APM)

masuk SMP. Adapun capaian kinerja indikator perkembangan kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011-2015 pada jenjang pendidikan SD/MI capaian APK pada tahun 2011-2015 mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2011 mencapai 106,68%, menurun menjadi 102,91% di tahun 2012, meningkat menjadi 104,93% di tahun 2013, meningkat kembali menjadi 109,02% di tahun 2014 dan mengalami penurunan menjadi 103,6% di tahun 2015. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs capaian APK pada tahun 2011-2015 juga mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2011 mencapai 97,27%, meningkat menjadi 101,44% di tahun 2012, kembali mengalami peningkatan menjadi 103,26% di tahun 2013, kemudian menurun menjadi 100,67% di tahun 2014 dan mengalami peningkatan menjadi 101,14%

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	APK (%)					
	- SD/MI/Paket A	106,68	102,91	104,93	109,02	103,60
	- SMP/MTs/ Paket B	97,27	101,44	103,26	100,67	101,14
	- SMA/SMK/MA/ Paket C	59,25	76,68	76,71	76,75	83,32
2	APM (%)					
	- SD/MI	98,47	98,10	98,41	99,91	99,93
	- SMP/MTs	80,45	84,32	88,64	88,67	88,76
	- SMA/SMK/MA	44,89	57,02	60,81	68,84	68,90
3	Angka Putus Sekolah (%)					
	- SD/MI	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
	- SMP/MTs	0,48	0,44	0,42	0,39	0,33
	- SMA/SMK/MA	1,01	0,94	0,83	0,84	0,39
4	Angka Melek Huruf (%)	87,36	88,08	88,44	97,09	97,1

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2015

Tahun 2011-2015 adalah seperti pada tabel diatas. Nilai APK bisa lebih dari 100%.

Hal ini disebabkan karena jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 15 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SMP atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 12 tahun tetapi telah

di tahun 2015. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA capaian APK pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 mencapai 59,25%, meningkat menjadi 76,68% di tahun 2012, meningkat menjadi 76,71% di tahun 2013, meningkat kembali menjadi 76,75% di tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 83,32% di tahun 2015.

Capaian APM pada tahun 2011-2015 pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahun 2011 mencapai 98,47%, menurun menjadi 98,1% di tahun 2012, meningkat menjadi 98,41% di tahun 2013, meningkat kembali menjadi 99,91% di tahun 2014 dan mengalami peningkatan kembali menjadi 99,93% di tahun 2015. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs capaian APM pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 mencapai 80,45%, meningkat menjadi 84,32% di tahun 2012, kembali mengalami peningkatan menjadi 88,64% di tahun 2013, kemudian meningkat menjadi 88,67% di tahun 2014 dan mengalami peningkatan menjadi 88,76% di tahun 2015. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA capaian APM pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 mencapai 44,89%, meningkat menjadi 57,02% di tahun 2012, meningkat menjadi 60,81% di tahun 2013, meningkat menjadi 68,84% di tahun 2014

dan kembali mengalami peningkatan menjadi 68,9% di tahun 2015.

Realisasi capaian indikator Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren positif, yakni selalu mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada jenjang pendidikan SD/MI realisasi capaian indikator angka putus sekolah di tahun 2011 hingga tahun 2013 sebesar 0,04%, mengalami penurunan di tahun 2014 yakni 0,03% dan stagnan pada tahun 2015 pada prosentase 0,03%. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs realisasi capaian indikator angka putus sekolah di tahun 2011 sebesar 0,48%, mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 0,44%, tahun 2013 menjadi 0,42 % dan di tahun 2014 menjadi 0,39% dan 0,33% pada tahun 2015.

Sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menunjukkan realisasi capaian yang fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2011 prosentase APS sebesar 1,01%, turun menjadi 0,94 di



tahun 2012, kemudian turun lagi di tahun 2013 menjadi 0.83%, namun APS kembali naik menjadi 0.84% pada tahun 2014 dan kembali turun cukup signifikan menjadi 0,39% pada tahun 2015. Pada paparan capaian APS tersebut telah menggambarkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menekan jumlah anak yang putus sekolah hingga dibawah 1% sebagai wujud dari tanggung jawab terhadap hak masyarakat

untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak.

Sedangkan Realisasi angka melek huruf tahun 2011-2014 perkembangannya cukup bervariasi. Tahun 2011 sebesar 87,36%, tahun 2012 meningkat menjadi 88,08%, tahun 2013 menurun menjadi 88,04%, angka melek huruf kembali menurun pada tahun 2014 menjadi 97,09% dan tahun 2015 kembali meningkat menjadi 97,1%.

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	2015
Sekolah Dasar (SD/MI)					
Angka partisipasi sekolah	102,65	101,59	102,87	100,37	100,45
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	97,16	101,51	101,72	100,97	100,40
Rasio guru/murid	16,96	16,42	15,95	15,83	15,62
Rasio guru/murid per kelas rata-rata	24,08	18,92	19,15	14,88	18,31
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)					
Angka partisipasi sekolah	99,48	95,83	98,82	99,59	99,84
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	91,98	96,58	102,73	114,73	118,68
Rasio guru terhadap murid	16,98	17,02	16,60	16,30	16,14
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	24,08	25,68	24,54	22,60	21,61
Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)					
Angka partisipasi sekolah	50,75	68,59	74,19	76,29	74,84
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	59,52	65,60	67,09	80,40	74,68
Rasio guru terhadap murid	14,74	13,74	14,77	13,93	13,37
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	37,05	24,86	26,02	24,23	23,59
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	87,36	88,08	88,44	97,09	97,10
Fasilitas Pendidikan (Dalam %)					
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	87,04	87,25	88,04	90,72	92,20
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	84,88	94,38	88,25	96,94	97,01
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	96,8	98,06	98,18	99,32	97,31
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75,44	78	75,65	76,93	78,18
Angka Kelulusan					
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,80	99,76	99,92	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,69	99,85	99,94	99,98	100
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	97,12	99,31	99,99	99,98	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,98	101,69	100,40	100,19	101,76
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	88,39	89,93	98,96	98,88	99,81

Tabel 2.17: Realisasi Indikator Bidang Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

Rasio Lembaga SD, SMP, SMA Berakreditasi A	15:85	17:83	18:83	20:80	18:82
Persentase Paket Keahlian SMK Berakreditasi A	37,32	48,39	48,39	48,39	49
Lembaga Pendidikan Non Formal Berakreditasi (%)	3,38	4,23	5,08	5,93	9,32

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2015

Penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa aspek tujuan diadakannya indikator kinerja urusan. Diantaranya adalah indikator yang digunakan untuk melihat tingkatan partisipasi pendidikan, melihat sejauh mana tingkat buta huruf masyarakat, melihat ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan melihat ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi usia penduduk 25 tahun sudah menyelesaikan semua pendidikan formal. Capaian Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 pada angka 6,53 tahun, tahun 2012 pada angka 6,68 dan 2013 sebesar 6,84 tahun, dan tahun 2014 selama 6,87 tahun.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Realisasi pencapaian indikator mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan 2014 di berbagai jenjang. Angka partisipasi sekolah untuk SD/MI telah mencapai target yang ditentukan dari setiap tahunnya, tahun 2011 capaian sebesar 102,65%, mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 101,59%, mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 103,87%, mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 100,37% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 100,45%.

Indikator angka partisipasi sekolah (SMP/MTs) pada tahun 2011 adalah 99,48%, tahun 2012 menurun menjadi 95,83%, tahun 2013 meingkat menjadi 98,82%, tahun 2014 meningkat menjadi

99,59%, dan tahun 2015 meningkat menjadi 99,84%. Indikator ini telah mencapai target yang telah ditentukan karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan untuk jenjang SMP/MTs.

Pada tingkatan SMA/SMK dan MA, realisasi indikator angka partisipasi sekolah tahun 2011 sebesar 50,75%, tahun 2012 sebesar 68,59%, pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 74,19%, pada tahun 2014 capaian pada angka 76,29% dan tahun 2015 menjadi 74,84%

Indikator rasio ketersediaan sekolah untuk SD/MI terhadap penduduk usia sekolah pada tahun 2011 sebesar 113,17%, tahun 2012 sebesar 101,51%, tahun 2013 sebesar 101,72%, tahun 2014 sebesar 100,97% dan tahun 2015 menjadi 100,40%.

Untuk SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah tahun 2011 sebesar 91,98%, tahun 2012 sebesar 96,58%, tahun 2013 sebesar 101,73%, tahun 2014 sebesar 114,73% dan tahun 2015 menjadi 118,68%.

Untuk SMA/SMK/MA rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah tahun 2011 sebesar 59,52%, tahun 2012 sebesar 65,60%, tahun 2013 sebesar 67,09%, tahun 2014 sebesar 80,40% dan tahun 2015 menjadi 74,68%.

Selanjutnya adalah indikator dalam urusan pendidikan meliputi rasio guru/murid pada tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, rasio guru/murid perkelas rata-rata pada tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Untuk SD/MI rasio guru terhadap murid tahun 2011 sebesar 16,96%, tahun 2012 sebesar 16,23%, tahun 2013 sebesar 15,95%, tahun 2014

sebesar 15,83% dan tahun 2015 15,62%. Sedangkan untuk rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk jenjang SD/MI tahun 2011 sebesar 24,08%, tahun 2012 sebesar 18,92%, tahun 2013 sebesar 19,15%, tahun 2014 sebesar 14,88%. Untuk SMP/MTs rasio guru terhadap murid tahun 2011 sebesar 16,98%, tahun 2012 sebesar 17,02%, tahun 2013 sebesar 16,60%, dan tahun 2014 sebesar 14,88% dan tahun 2015 sebesar 18,31%.

Sedangkan untuk rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk jenjang SMP/MTs tahun 2011 sebesar 24,28%, tahun 2012 sebesar 25,68%, tahun 2013 sebesar 24,54% dan tahun 2014 sebesar 22,60% dan tahun 2015 sebesar 21,61%.

Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA tahun 2011 sebesar 14,74%, tahun 2012 sebesar 13,74%, tahun 2013 sebesar 14,77%, dan tahun 2014 sebesar 13,93% dan tahun 2015 sebesar 13,37%. Sedangkan untuk rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk jenjang SMA/SMK/MA tahun 2011 sebesar 37,05%, tahun 2012 sebesar 24,862%, tahun 2013 sebesar 26,02%, dan

tahun 2014 sebesar 24,23% dan tahun 2015 sebesar 23,59%. UNESCO pada tahun 2014 menetapkan perbandingan rasio guru terhadap siswa 26:1 untuk negara-negara Asia, dan 24:1 untuk negara-negara yang berpenghasilan menengah.

Realisasi penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) tahun 2011-2014 di Kabupaten Banyuwangi perkebangannya cukup bervariasi dari tahun ke tahun, tahun 2011 sebesar 87,36%, capaian tahun 2012 meningkat menjadi 88,08%, tahun 2013 sebesar 88,44%, namun kondisi ini mulai membaik di tahun 2014 capaian kinerja meningkat signifikan menjadi 97,09% dan tahun 2015 sebesar 97,10%. Hal ini dikarenakan adanya gerakan pemberantasan Tiflisme yang melibatkan seluruh Elemen Masyarakat termasuk Pelibatan guru bersertifikasi untuk menjadi tutor bagi warga belajar.

Fasilitas pendidikan juga menjadi indikator dalam urusan pendidikan. Fasilitas pendidikan ini dapat dilihat dari kondisi bangunan sekolah yang baik. Meningkatnya capaian kondisi bangunan baik pada setiap jenjang pendidikan tentunya tidak terlepas dari upaya



rehabilitasi bangunan yang dilakukan pada setiap tahunnya.

Realisasi indikator pendidikan anak usia dini (PAUD) mengalami capaian yang fluktuatif. Capaian target tersebut tentunya tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya terutama pendidikan untuk anak usia dini. Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Kelulusan terkait dengan erat dengan mutu proses pembelajaran. Siswa dapat lulus jika proses pembelajaran bermutu sehingga daya serap mereka bagus sehingga lulus ujian akhir. Dalam 5 tahun terakhir Angka Kelulusan siswa di Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan tren perkembangan yang positif, dengan adanya kenaikan disetiap tahunnya. Tingginya Angka Kelulusan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemberian pelayanan yang baik, motivasi yang tinggi, serta semangat tinggi para guru untuk mengantarkan anak didiknya dengan baik.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam memastikan masyarakat usia sekolah mengenyam pendidikan disetiap jenjang, transisi antar jenjang sangat rawan meningkatkan angka putus sekolah. Oleh sebab itu indikator melanjutkan sangat penting guna memastikan masyarakat usia sekolah melanjutkan pendidikan hingga pada jenjang tertinggi. Peningkatan kinerja Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Banyuwangi setiap tahun, tidak terlepas dari adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah.

Capaian kinerja indikator rasio lembaga SD, SMP, SMA berakreditasi A di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2015 mengalami kondisi yang fluktuatif.

Capaian kinerja indikator rasio lembaga SD, SMP, SMA berakreditasi A di Kabupaten Banyuwangi tentunya juga dipengaruhi oleh tenaga pendidik dan pengajar yang profesional, capaian lulusan setiap tahun serta fasilitas yang disediakan di sekolah. Capaian kinerja indikator persentase paket keahlian SMK berakreditasi A pada tahun 2011 mencapai 37,32%. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2012 mencapai 48,39%, capaian tersebut *stagnan* hingga tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan capaian di tahun 2015 yakni mencapai 49%.

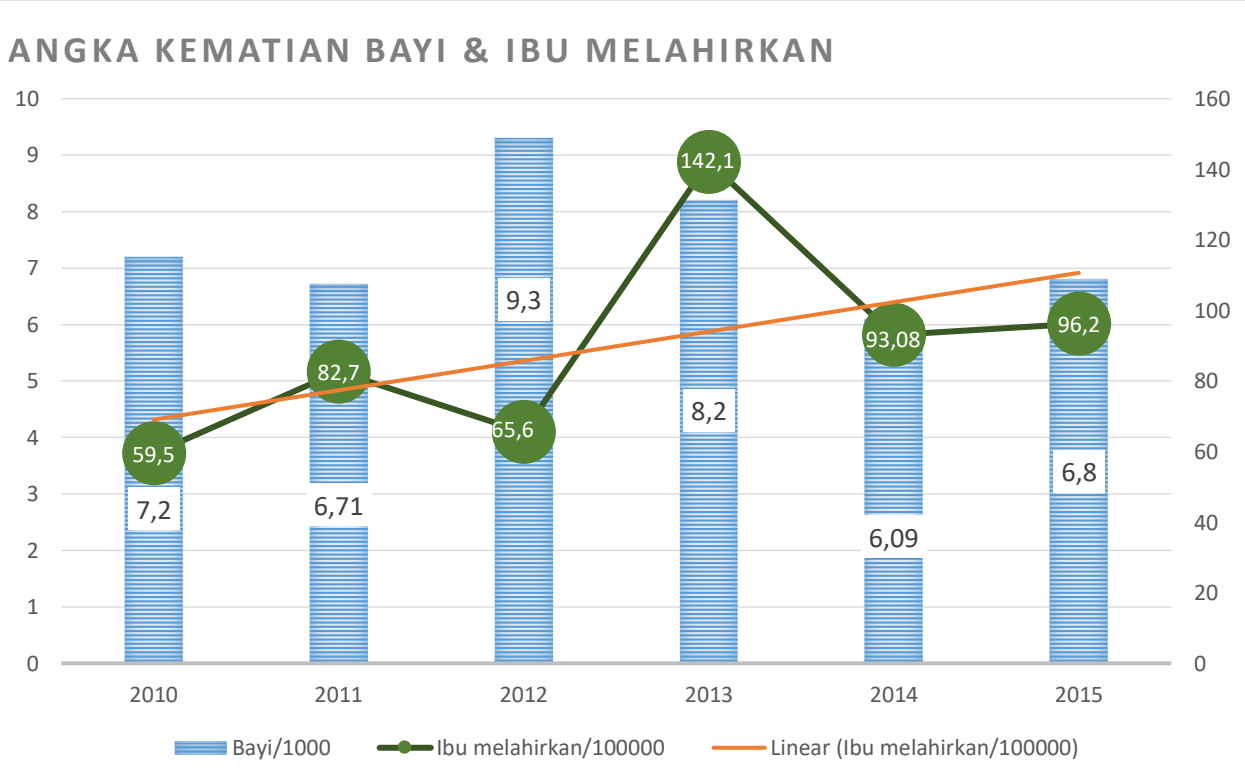
Capaian kinerja indikator lembaga pendidikan non formal berakreditasi di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni tahun 2011 sampai tahun 2015 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 capaian indikator ini sebesar 3,38%, meningkat di tahun 2012 menjadi 4,23%, meningkat di tahun 2013 menjadi 5,08%, meningkat di tahun 2014 menjadi 5,93% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 9,32%.

Setelah berakhirnya era *Millenium Development Goals (MDG's)*, dunia dihadapkan pada era pembangunan baru yaitu *Sustainable Development Goals (SDG's)*. Pembangunan dengan memperhatikan isu keseimbangan lingkungan, saat ini menjadi titik fokus dalam pembangunan global. Dimana saat kualitas lingkungan hidup menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam program-program perencanaan pembangunan. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah.

Kesehatan masyarakat merupakan hal mutlak untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa cara untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat adalah melalui Angka kematian Bayi (AKB) dan Ibu melahirkan, serta angka Usia Harapan Hidup. Angka kematian bayi di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2010-2014 memiliki nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2010 sebesar 7.2 dari 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 6.71 dari 1000 kelahiran hidup. Namun AKB kembali naik cukup signifikan di tahun 2012 hingga mencapai angka 9.3 kematian bayi dari

mencapai nilai tertingginya pada tahun 2012, Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) justru mencapai angka tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 142.1 kematian ibu melahirkan dari 100000 kelahiran hidup.

Namun angka tersebut sudah berhasil turun kembali di tahun 2014 walaupun tidak sekecil angka pada tahun 2010. Pada tahun 2014 AKI sebesar 93.08 dari 100000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2010 AKI hanya sebesar 59.5 dari 100000 ibu melahirkan hidup. Selain angka AKI yang masi lebih tinggi dari tahun 2010, trend AKI di Kabupaten Banyuwangi juga masih menunjukkan kecenderungan



Gambar 2.9: Angka Kematian Bayi & ibu melahirkan Tahun 2010-2014

Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Banyuwangi

1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2013, AKB kembali turun menjadi 8.2 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup. AKB kembali turun cukup signifikan di tahun 2014 hingga mencapai angka yang paling rendah selama tahun 2010-2014 yaitu 6.09 kematian bayi setiap kelahiran hidup. Berbeda dengan AKB yang

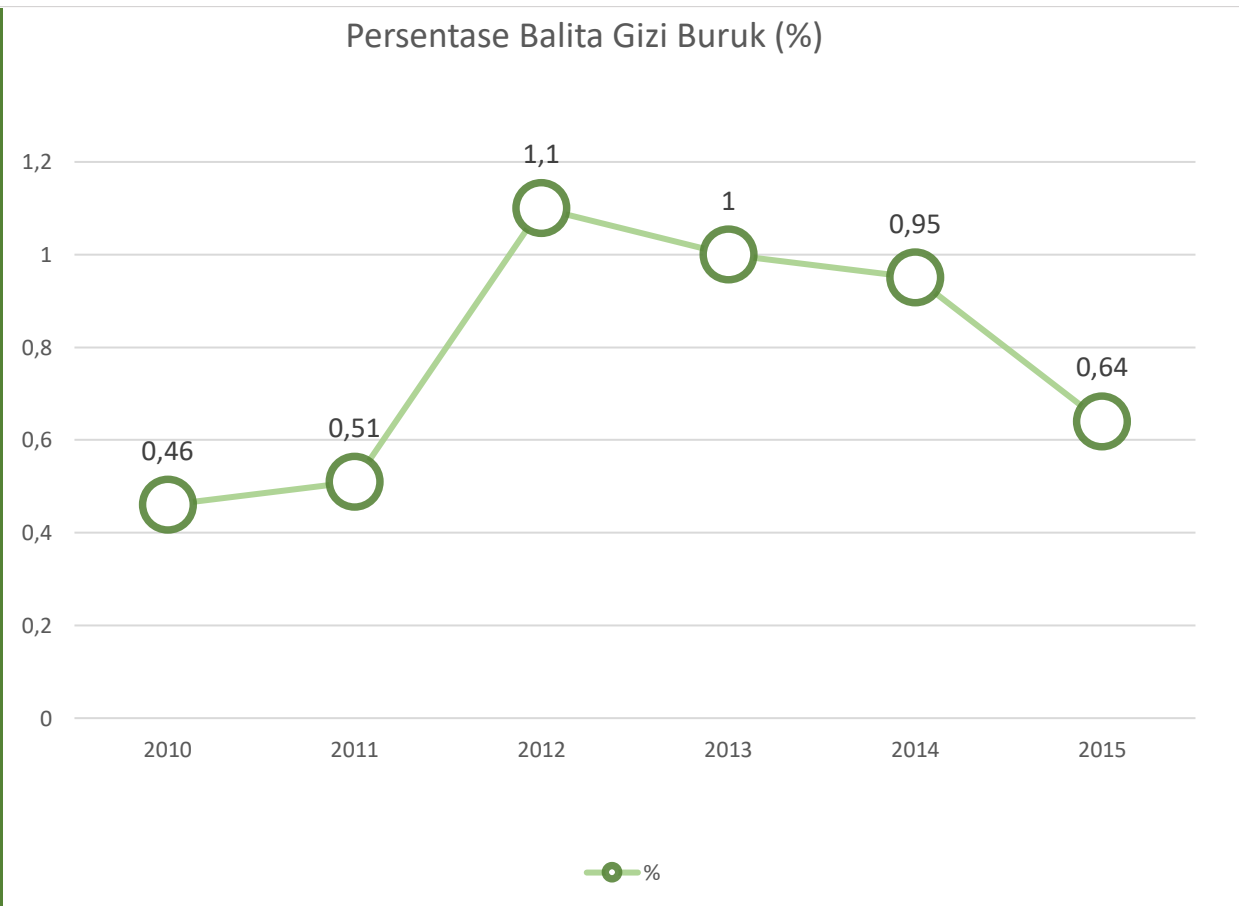
naik. Berdasarkan pada perbandingan kedua grafik tersebut dapat dilihat bahwa antara AKB dan AKI kurang menunjukkan keselarasan karena terdapat beberapa pola pergerakan data yang bertolak belakang seperti pada tahun 2011-2013. Perbedaan pola tersebut mengindikasikan bahwa AKB

yang tinggi khususnya pada tahun 2012 tidak disebabkan karena faktor persalinan atau pada proses melahirkan melainkan factor lainnya diluar faktor proses persalinan.

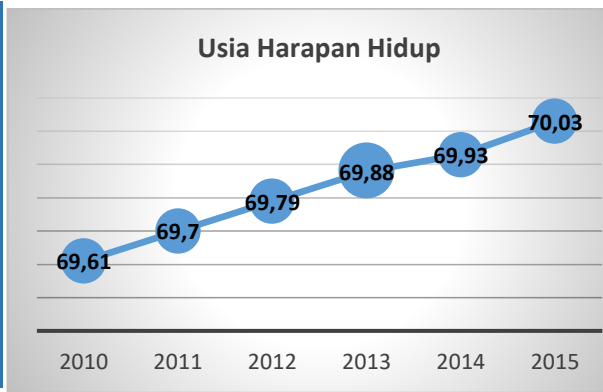
Data terkait kematian bayi lebih menunjukkan adanya keselarasan jika disandingkan dengan data terkait persentase Balita gizi buruk, pola yang dimiliki kedua data tersebut hamper semuanya linier setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat indikasi bahwa angka kematian bayi yang tinggi dari tahun 2010 hingga tahun 2014 turut disebabkan karena gizi buruk atau asupan gizi yang diberikan kepada bayi masih kurang berkualitas atau belum sesuai dengan kebutuhan gizi untuk menunjang

pertumbuhan bayi selama usia 0-59b bulan. Angka harapan hidup di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2010-2015 sudah cukup baik karena cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2011. Dari yang sebelumnya 69.61 tahun pada tahun 2010 menjadi 69.7 tahun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 angka harapan hidup turun menjadi 69.79, angka usia harapan hidup kembali naik menjadi 69.88 tahun pada tahun 2013. Usia harapan hidup juga kembali naik pada tahun 2014 menjadi 69.93 tahun.

Gambar 2.10: Prosentase Gizi Buruk Tahun 2010-2015



Sumber: LKPJ AMJ Kabupaten Banyuwangi



Salah satu agenda pembangunan penting di Kabupaten Banyuwangi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Dukungan kinerja pemerintahan terangkum dalam indikator-indikator urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

kependudukan yaitu Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, Kepemilikan KTP, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK secara rata-rata mengalami capaian yang relatif stabil. Indikator Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk pada posisi tahun 2011 sebesar 1 : 1,13, tahun 2012 sebesar 1 : 1,16, tahun 2013 sebesar 1 : 1,08 dan 2014 sebesar 1 : 1,09. Bayi yang memiliki akte kelahiran juga memiliki trend kenaikan yang positif setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2011 hanya 30,87% bayi yang memiliki akte kelahiran. Prosentase meningkat sangat signifikan pada tahun 2012 menjadi 61,35% dan terus meningkat hingga tahun selanjutnya hingga menjadi 95,98% pada tahun 2013

Tabel 2.18 Realisasi Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	01:1,13	01:1,16	01:1,08	01:1,09	01:1,21
2	Persentase bayi berakte kelahiran	67,39	74,78	78,10	79,49	80,69
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.142	0.021	0.023	0,022	0,228
4	Kepemilikan KTP (%)	74,57	92,79	90,46	90,46	92,32
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	66,64	51,16	70,25	71,85	80,68
6	Ketersediaan database kependudukan-an skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 2016

Berdasarkan data diatas, secara umum ketercapaian pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menunjukkan tren positif. Sebagaimana tren capaian indikator-indikator sub urusan

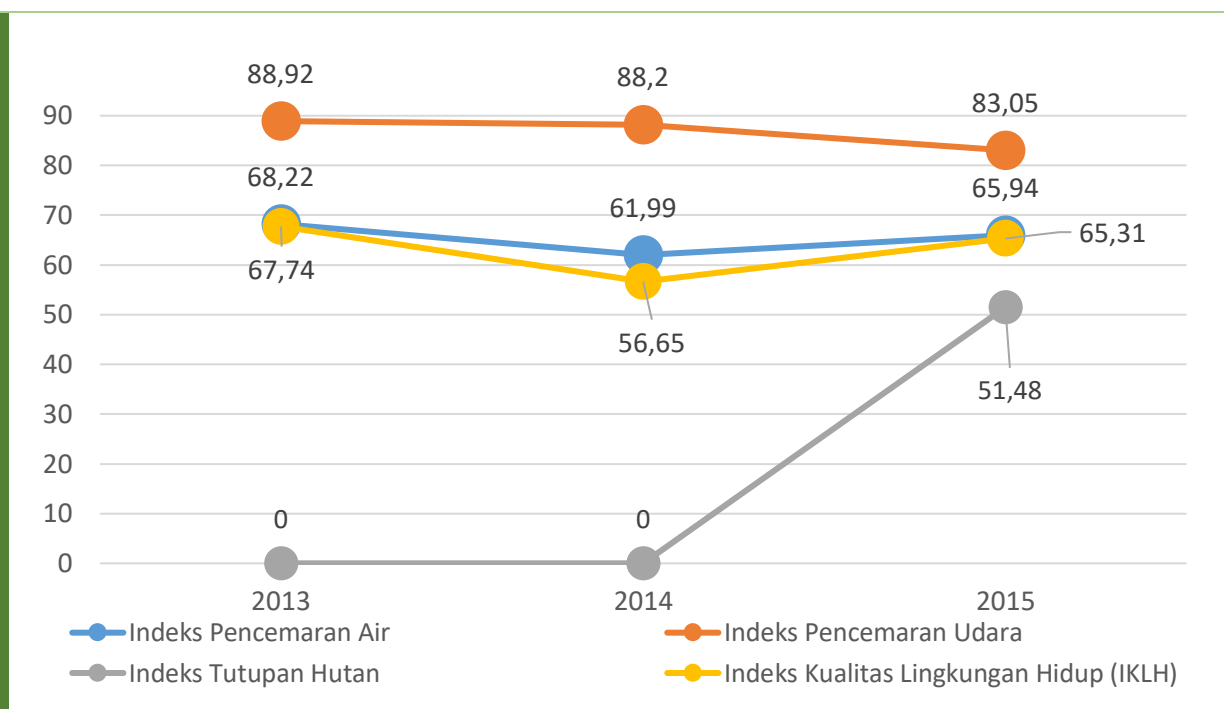
dan stagnan pada tahun 2014 pada prosentase 95,98%. Salah satu factor yang memberikan sumbangan terhadap kesuksesan tersebut adalah adanya inovasi *Lahir Procot Pulang Bawa Akte*, serta pelayanan akta online.

Kondisi ini selaras dengan capaian indikator Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk yang terealisasi 0.142% di tahun 2011 dan kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2012 yang terealisasi 0.021%, pada tahun 2013 naik menjadi 0.023% dan naik lagi menjadi 0.023% pada tahun 2014. Ketidakstabilan perkembangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sosialisasi yang kurang masif, masih kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan dinas terkait. Selain indikator yang menunjukkan realisasi yang kurang optimal terjadi pada indikator Rasio pasangan berakta nikah. Capaian realisasi indikator tersebut pada tahun 2011 adalah 14%, namun pada tahun 2012-2013 turun menjadi 2% dan naik sedikit pada tahun 2014 menjadi 2,3%. Adapun dua indikator selanjutnya yaitu Ketersediaan database kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK menunjukkan kondisi ketercapaian yang dapat disebut 100% pada tahun 2011

sampai 2015. Artinya kondisi ketercapaian indikator kepemilikan KTP dan Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk mendukung adanya konsistensi ketersediaan data kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan dalam penyusunan database dalam bidang kependudukan Kabupaten Banyuwangi dapat dipertahankan dengan baik.

Indeks lingkungan hidup memiliki beberapa klasifikasi meliputi nilai “30” sampai dengan “50” sama dengan tercemar berat, lebih besar dari “50” hingga “70” berarti lingkungan tercemar ringan, “70” dan lebih besar dari “70”, berarti kualitas lingkungan hidup sangat baik. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banyuwangi tahun 2013-2015 dapat dilihat pada grafik dibawah. Sebagaimana data yang tercantum pada grafik tersebut, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi mengalami trend penurunan.

Gambar 2.12: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015



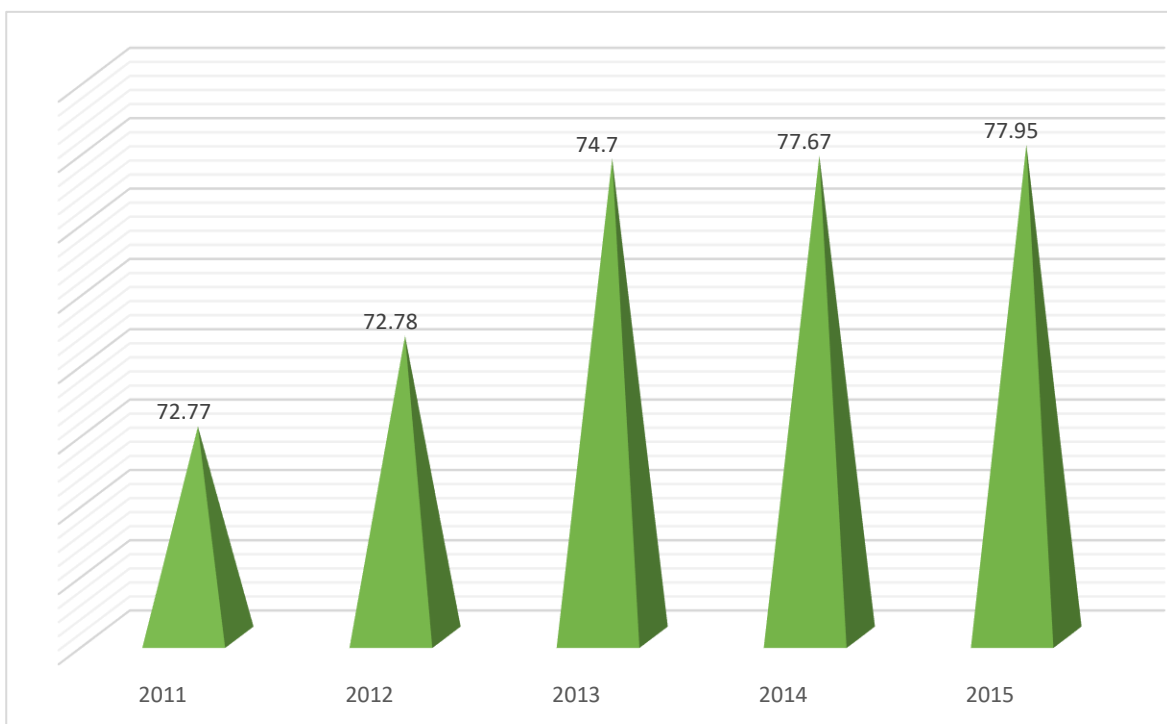
Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, 2015

Pada tahun 2013 IKLH yang dicapai sebesar 67.74, turun menjadi 56.65 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 IKLH kembali naik walaupun tidak begitu signifikan karena masih belum mampu melebihi IKLH tahun 2013, yaitu hanya mencapai 65.31 pada tahun 2015. Sumbangan pencemaran udara dari NO₂ dan SO₂ yang meningkat menyebabkan penurunan IKLH Kabupaten Banyuwangi. Iklim

Pelayanan publik masih menjadi isu penting yang relevan menjadi sasaran pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Sebab pelayanan publik merupakan unsur inti dalam sistem

acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indeks tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berikut gambaran capaian IKM Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015.



Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2015

Gambar 2.13: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

masyarakat modern. Tujuan pelayanan publik adalah untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan terbaik adalah pelayanan yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan terbaik akan membawa implikasi terhadap kepuasan publik atas pelayanan yang diterima. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan

Capaian IKM Kabupaten Banyuwangi terealisasi 72,77% di tahun 2011, meningkat menjadi 72,78% di tahun 2012, di tahun 2013 sebesar 74,7%, tahun 2014 sebesar 77,67% dan tahun 2015 sebesar 77,95%. Capaian IKM Kabupaten banyuwangi tergolong masih kurang meskipun setiap tahun mengalami peningkatan, karena masih ada sekitar 22% masyarakat yang kurang puas dengan kinerja pelayanan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.19 dibawah. Pada tabel tersebut terlihat bahwasannya rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan cenderung naik setiap tahunnya. Pada tahun 2011 tercatat rasio sebesar 2,295 per satuan bangunan, pada tahun 2013 rasio tersebut naik menjadi 4,185. Rasio tersebut tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2014 dan kembali naik menjadi 5,445 pada tahun 2015

Tabel 2.19: Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan

No	Tahun	Rasio
1	2011	2,295
2	2012	3,555
3	2013	4,185
4	2014	4,185
5	2015	5,445

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2011 sebesar 38, rasio tersebut mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 32 per satuan luas wilayah. Rasio tersebut kembali naik menjadi 45,5 pada tahun 2013 dan menjadi 60 pada tahun 2014. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20: Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

No	Tahun	Rasio
1	2011	38
2	2012	32
3	2013	45,5
4	2014	60

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014

Prosentase luas lahan bersertifikat secara detail dapat dilihat ada tabel 2.21 dibawah. Secara umum lahan yang bersertifikat mengalami kenaikan setiap tahunnya, mengingat prosentase pada tahun 2011 hanya 12% dan pada tahun 2014 mencapai 33.95%.

Tabel 2.21: Prosentase Lahan Bersertifikat

No	Tahun	Persentase
1	2011	12
2	2012	3376
3	2013	33.95
4	2014	33.95

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014

Selain prosentase lahan yang bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara juga harus diselesaikan dengan baik. Pada tabel dibawah dapat dilihat bahwasannya Penyelesaian kasus tanah negara dapat ditangani dengan baik. Selama empat tahun dari tahun 2011 sampai pada tahun 2014 menunjukkan prosentase 100%.

Tabel 2.22: Penyelesaian kasus tanah Negara

No	Tahun	Persentase
1	2011	100
2	2012	100
3	2013	100
4	2014	100

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014

Persentase penyelesaian izin lokasi dapat dilihat pada tabel 2.23 dibawah. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa peningkatan sangat signifikan terjadi pada tahun 2012. Persentase Penyelesaian izin okasi pada tahun sebelumnya hanya mencapai 12%, namun pada tahun 2012 naik hingga mencapai

81.18%. Prosentase tersebut kembali naik hingga menjadi 98.87% pada tahun 2014.

No	Tahun	Persentase
1	2011	2.3
2	2012	81.18
3	2013	98.87
4	2014	98.87

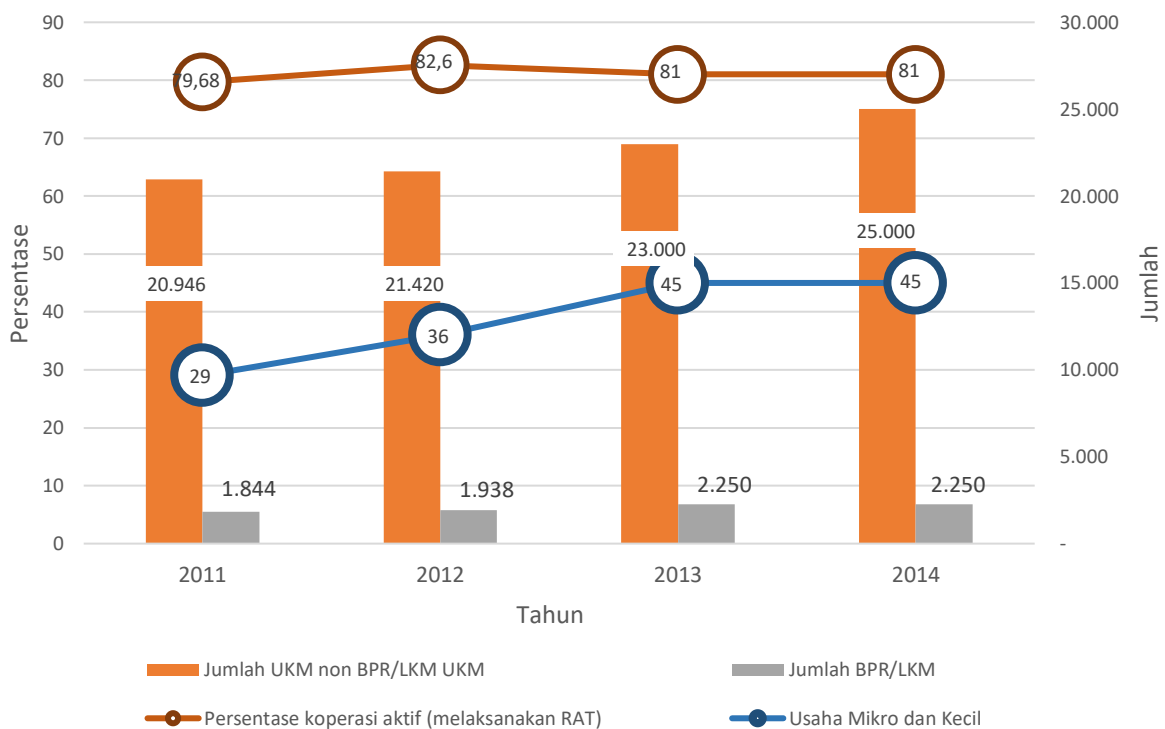
Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014

Urusan wajib yang selanjutnya adalah terkait koperasi usaha kecil dan menengah (UKM). Kinerja urusan tersebut dapat dilihat melalui empat indikator meliputi, Persentase koperasi aktif (%), Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, Jumlah BPR/LKM, dan Usaha Mikro dan Kecil. Perkembangan realisasi empat indikator tersebut selama empat tahun dapat dilihat

pada gambar 2.14 dibawah. Pada Gambar 2.14 dapat dilihat bahwa perkembangan empat indikator UKM cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Indikator yang mengalami penurunan hanya persentase koperasi aktif yang mengalami penurunan pada tahun 2013 dan jumlah UKM non BPR/LKM UKM. Yang mengalami penurunan pada tahun 2012.

Pelayanan pada urusan pekerjaan umum memiliki beberapa indikator diantaranya adalah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan Rasio rumah layak huni.

Realisasi 4 Indikator Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014

Gambar 2.14: Realisasi 4 Indikator Koperasi Usaha Kecil dan menengah

Tabel 2.24: Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2011-2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	90	89.7	92.1	94
2	Rasio Jaringan Irigasi	85	85	75	85
3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	85	87	79	79
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	80.7	45.96	50	85
5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	50	55	45	45
6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	55	55	50.57	48.5
7	Rasio rumah layak huni	45	79.2	162	50

Sumber: LKPI Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014

Capaian indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Rasio rumah layak huni, dan persentase rumah tinggal bersanitasi, dari tahun 2011-2014 memiliki capaian yang fluktuatif, namun memiliki kecenderungan meningkat. Sedangkan indikator Rasio Jaringan Irigasi, Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, dan indikator Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya. Data capaian secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.24 diatas.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Capaian dalam urusan penanaman modal adalah untuk meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN. Keberhasilan indikator ini dapat dilihat dari Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Rasio daya serap tenaga kerja, Peningkatan/ penurunan Nilai Realisasi

PMDN (miliar rupiah). Pertumbuhan pesat investasi asing (PMA) dan domestik (PMDN) Provinsi Jawa Timur ternyata menetes ke daerah. Semakin membaiknya kondisi dan iklim investasi di wilayah Provinsi Jawa Timur ternyata menjadi lokomotif yang turut mempercepat pertumbuhan investasi berskala nasional PMDN/PMA di daerah termasuk di Kabupaten Banyuwangi.

Sehingga jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA di Kabupaten Banyuwangi juga mengalami peningkatan pada tahun 2011-2015. Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA mengalami peningkatan tahun 2011 sebanyak 6 investor, Tahun 2012 sebanyak 4 investor, tahun 2013-2014 sebanyak 5 investor dan tahun 2015 meningkat sebanyak 18 investor. Kenaikan jumlah investor tersebut tidak berpengaruh positif terhadap nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA. Hal ini dikarenakan ketidakstabilan inflasi. Adapun Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA tahun 2011 sebesar 1.760 miliar rupiah,

Tabel 2.25: Realisasi Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA (investor)	6	4	5	5	18
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (Miliar Rp)	1.760	730	2.450	2.350	310
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (orang)	35.285	14.566	49.000	46.905	6.132

Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, 2016

tahun 2012 sebesar 730 miliar rupiah, tahun 2013 sebesar 2.450 miliar rupiah, tahun 2014 terealisasi sebesar 2.350 miliar rupiah dan tahun 2015 sebesar 310 miliar

rupiah. Sedangkan indikator peningkatan/ penurunan nilai realisasi PMDN pada tahun 2011 meningkat 1,700 Milyar, tahun 2012 menurun 1,000 Milyar, tahun 2013 meningkat 1,700 Milyar, tahun 2014 menurun 0,1 Milyar dan pada tahun 2015 menurun 2,000 Milyar. Pada indikator rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif. Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2011 sebanyak 35.285 orang, tahun 2012 sebanyak 14.566 orang, tahun 2013 sebanyak 49.000 orang, tahun 2014

sebanyak 46.905 orang dan tahun 2015 sebanyak 6.132 orang

Kondisi ini disebabkan oleh belum sebandingnya perluasan lapangan kerja dengan pertumbuhan angkatan kerja, serta kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar. Sehingga upaya tindak lanjut yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yakni meningkatkan jalinan kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang didukung pula dengan penyebaran informasi lowongan kerja secara online, serta meningkatkan pelatihan keterampilan kepada pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	65,22	65,30	65,87	65,06
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	46,59	46,24	45,52	49,37
3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	8,19	7,73	7,85	9,15
4.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	3,8	3,98	4,18	4,2
5.	Cakupan bina kelompok petani (%)	26,6	26,96	26,99	27,15
6.	Nilai Tukar Petani (%)	110,38	110,7	110,71	110,70
7.	Persentase pertumbuhan sub sector peternakan dalam PDRB	8,48	8,14	7,97	7,97

Tabel 2.26: Realisasi Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

Sumber: LKPD Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2015

Tabel 2.27: Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011-2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3.99	39.89	1.55	1.6
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0.00	47.63	98.44	98.39
3	Rasio KDRT	0.218	0.01	0.003	0.002
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0.53	0	0
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)	18	16	18	18
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)	5.677	1.75	40.44	40.86
7	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	75	97.8	92.53	100

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014

Pada tabel diatas dapat dilihat capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Pada indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, capaian yang paling tinggi hanya pada tahun 2012 mencapai 39.89, namun capaian tersebut pada tahun 2013 turun sangat signifikan menjadi 1.55 dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 1.6. Pada indikator Partisipasi perempuan di lembaga swasta dan indikator Rasio KDRT capaiannya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada indikator Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif), Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif), Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, capaian setiap tahunnya fluktuatif, namun cenderung mengalami kenaikan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

RPJMD 2009-2014 Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa salah satu prioritas pembangunan Jawa Timur adalah “Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan”. Begitu juga dengan Kabupaten Banyuwangi perlu menitikberatkan pada pengembangan sektor agrobisnis melalui urusan pertanian. Urusan Pertanian ini bertujuan untuk meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. Pencapaian indikator dalam urusan pertanian tersebut dapat dinilai melalui indikator sebagai berikut:

Secara umum struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi terbentuk dan di dominasi oleh sektor pertanian. Peran sektor pertanian terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi mencapai 46,24%, yakni hampir separuh

dari kegiatan ekonomi bergerak di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar berada di daerah pedesaan.

Mata pencaharian didominasi oleh bidang pertanian/perkebunan, yakni mencapai 16,95% dari keseluruhan jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian. Sehingga peran pertanian di Kabupaten Banyuwangi memiliki dua peran sekaligus tantangan, yakni mendukung pemenuhan pangan bagi penduduk Banyuwangi serta memberikan lapangan kerja bagi rumah tangga tani di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai sektor yang menjadi tumpuan bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian sebagian rakyat, maka pembangunan pertanian merupakan generator bagi pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Potensi pertanian secara umum dapat ditinjau dari potensi sumber daya produksi dan potensi pasar. Potensi produksi pangan terutama dapat dilihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur. Berdasarkan pemanfaatan lahan yang digunakan oleh petani, mulai dari kawasan selatan ke arah utara yang melebar ke arah barat merupakan daerah potensi tanaman bahan makanan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan capaian indikator produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar yang meningkat dari realisasi tahun 2011 yaitu 65,22%, menjadi 65,30% pada tahun 2012, kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 65,87% dan tahun 2014 sebesar 65,08%.

Realisasi di tahun 2011-2015 mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak signifikan, hal ini dikarenakan besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur saat ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi tanah yang

kekurangan organik dan hama/penyakit. Selain itu, tidak signifikannya kenaikan realisasi ini juga dikarenakan oleh kondisi alam yang tidak menentu, terbatasnya aspek permodalan, serta sistem tebas dan ijon pada lumbung. Dengan demikian upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi guna meningkatkan produktivitas pada atau bahan pangan utama lainnya secara signifikan dengan cara peningkatan intensifikasi berkelanjutan yang ditekankan pada pemulihan lahan serta sarana dan prasarana produksi.

Pada Indikator Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB tahun 2011 sebesar 46,59% mengalami penurunan pada angka 46,19% di tahun 2012, pada tahun 2013 kembali menurun mencapai 45,52% dan tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 49,37%. Kondisi yang fluktuatif demikian disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan rendahnya nilai tukar pertanian dibandingkan dengan nilai tukar non agraris. Sehingga upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja urusan pertanian pada periode berikutnya adalah dengan mengimplementasikan regulasi secara konsisten serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian (terutama pangan).

Kondisi yang sama juga terjadi pada capaian indikator Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB mengalami penurunan pada angka 7,73% di tahun 2012 dari 8,19 di tahun 2011, namun pada tahun 2013 kembali meningkat hingga mencapai 7,85% dan tahun 2014 tercapai sebesar 9,15%. Perkebunan tanaman keras yang dimaksud dalam hal ini adalah perkebunan PTPN, perkebunan rakyat (kopi, kakao, dan kapas) serta perkebunan swasta. Tidak stabilnya kontribusi sektor perkebunan

(tanaman keras) terhadap PDRB dikarenakan komoditas perkebunan masih didominasi dengan tanaman tua yang cenderung kurang produktif. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut yakni dengan memfasilitasi kelompok perkebunan melalui sarana dan pembibitan, serta diversifikasi komoditas dan peremajaan tanaman. Hal ini guna menghadapi tantangan persaingan harga komoditas di pasar global yang cenderung fluktuatif.

Hampir separuh dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi bergerak di sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indikator kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB dari realisasi tahun 2011-2014, dimana pada tahun 2011 yaitu 3,8%, menjadi 3,98% pada tahun 2012, dan kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 4,18%, tahun 2014 peningkatan tidak signifikan menjadi 4,20%. Kenaikan capaian pada setiap tahunnya memang tidak signifikan. Hal ini dikarenakan para pemuda enggan terjun sebagai tenaga kerja di sektor pertanian, sehingga tidak menutup kemungkinan kelangkaan atau menurunnya tenaga kerja sektor pertanian terjadi. Di sisi lain, ketidaksignifikannya kenaikan kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB juga dikarenakan menurunnya produktivitas tanah dan komoditas. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka perlu perbaikan manajemen kelembagaan kelompok tani serta meningkatkan produktivitas lahan dan komoditas.

Pada indikator cakupan bina kelompok petani menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2011 yaitu 26,6%, menjadi 26,96% pada tahun 2012, kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 26,99% dan tahun 2014 tercapai 27,15%. Meskipun demikian capaian ini

masih tergolong kecil, sebab partisipasi kelompok tani masih rendah dan terbatasnya tenaga penyuluh. Sehingga peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi petani sangat diperlukan sebagai upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator nilai tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi dan pembentukan barang modal. Pada indikator nilai tukar petani menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2011 yaitu 110,38%, menjadi 110,7% pada tahun 2012, mencapai 110,71% pada tahun 2013 dan tahun 2014 capaian sebesar 110,70%. Peningkatan yang terjadi pada realisasi nilai tukar petani pada tahun 2011-2014 berarti semakin tinggi daya beli petani di pedesaan. Namun permasalahan yang masih dihadapi oleh petani yakni mahalnya harga sarana produksi pertanian dan fluktuatifnya harga komoditas pertanian. Sehingga upaya tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memberikan subsidi atau insentif bagi petani.

Pada indikator capaian persentase pertumbuhan sub sektor peternakan dalam PDRB selama tahun 2011-2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 capaian indikator ini sebesar 8,485, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 8,14%, pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan menjadi 7,97%, dan pada tahun 2014 capaian indikator ini masih *stagnan* (kondisi tetap) seperti pada tahun sebelumnya, yakni 7,97%.

Indikator di bidang pengairan, Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi di Kabupaten Banyuwangi cukup fluktuatif. Tahun 2011 sampai dengan 2015 capaian sebesar 85%. Sedangkan rasio

ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sebesar 25%, tahun 2012 sebesar 40%, tahun 2013 sebesar 55%, tahun 2014 sebesar 65%, dan tahun 2015 mencapai 70%. Untuk Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS) capaian di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sebesar 85%, tahun 2012 sebesar 80%, tahun 2013 sebesar 85%, tahun 2014 sebesar 82%, dan pada tahun 2015 mencapai 85%. Untuk rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan capaian kinerja tahun 2011 sebesar 80%, tahun 2012 sebesar 85%, tahun 2013 sebesar 75 %, tahun 2014 sebesar 70%, dan tahun 2015 sebesar 85%. Sedangkan realisasi rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang terkena abrasi tahun 2011 sebesar 25%, tahun 2012 sebesar 40%, hingga 2014 sebesar 50%, tahun 2015 sebesar 70 %. Untuk rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi, capaian tahun 2011 sebesar 55%, tahun 2012 sebesar 75 %, tahun 2013 sebesar 82 %, tahun 2014 sebesar 85%. Sedangkan proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis, capaian kinerja tahun 2011-2015 sebesar 85%. Untuk capaian indikator sumber air/mata air yang dalam kondisi debit air stabil, tahun 2011 sebesar 15%, tahun 2012 sebesar 30%, dan tahun 2013 sebesar 40 %, tahun 2014 tercapai 45%, dan tahun 2015 mencapai 60%. Dan untuk indikator daur ulang sistem irigasi, capaian kinerja tahun 2011 sebesar 40%, tahun 2012 sebesar 40 %, tahun 2013 sebesar 45%, tahun 2014 sebesar 50%, dan tahun 2015 sebesar 60% (Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi 2015).

Dapat disimpulkan secara umum, indikator kinerja urusan pertanian telah mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Pembangunan pengairan ditujukan untuk menunjang produksi pertanian, khususnya untuk meningkatkan produksi pangan.

Sebagai upaya agar daya saing daerah dapat meningkat dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian dapat terwujud maka upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan intensifikasi secara berkelanjutan serta penekanan pada sarana dan prasarana produksi padi atau bahan utama pangan lokal;
- b. Upaya secara konsisten terhadap upaya mempertahankan ketahanan pangan daerah melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan pemberian subsidi dan insentif bagi petani;
- c. Fasilitasi kelompok pertanian/perkebunan melalui sarana dan pembibitan, diversifikasi komoditas dan peremajaan tanaman;
- d. Perbaikan manajemen dan kelembagaan kelompok tani, meningkatkan produktivitas lahan dan komoditas;
- e. Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi petani.

2.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Pada indikator perhubungan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Tahun 2011-2012 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,005 dan sebesar 0,004 di tahun 2013-2014. Nilai rasio panjang jalan tersebut menunjukkan bahwa panjang jalan di Kabupaten Banyuwangi masih mampu menampung jumlah kendaraan/arus barang dan jasa disektor perekonomian.

Secara ekonomi hal tersebut menunjukkan ketersediaan infrastruktur jalan di Kabupaten Banyuwangi masih baik dan mampu menampung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk indikator Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, tahun 2011 sebanyak 1.255.914 orang, tahun 2012 sebanyak 1.350.415 orang, tahun 2013

sebanyak 1.568.444 orang, dan tahun 2014 sebanyak 1.824.369 orang. Peningkatan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan distribusi barang dan jasa yang semakin tumbuh. Pada indikator tata ruang, ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Banyuwangi tergolong baik.

Luas wilayah produktif di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sebesar 57,65 meningkat di tahun 2012 sebesar 83,85. Tahun 2013 menurun menjadi 52,45 dan tahun 2014 sebesar 50,7. Untuk wilayah industri di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sebesar 2,2. Tahun 2012 sebesar 2,39. Tahun 2013 sebesar 2,35. Dan tahun 2014 menurun menjadi sebesar 2,5. Untuk luas lahan kekeringan dan banjir tahun 2011 sebesar 1, tahun 2012 sebesar 0,09. Tahun 2013 sebesar 0,8. Dan tahun 2014 sebesar 0,7. Untuk luas lahan perkotaan, tahun 2011 sebesar 9,6. Tahun 2012 sebesar 9,65. Tahun 2013 sebesar 9,85. Dan tahun 2014 sebesar 9,9.



Penandatanganan Nota Kesepahaman Dengan PT Indonesia Comnets (ICON) Plus

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perhubungan					
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004
1.2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	1.255.914	1.350.415	1.568.444	1.824.369	1.836.540
1.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun	1.255.914	1.350.415	1.568.444	1.824.369	1.836.540
2.	Penataan Ruang					
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.2	Luas wilayah produktif	57,65	83,85	52,45	50,7	50,00
2.3	Luas wilayah industri	2,2	2,39	2,35	2,5	2,65
2.4	Luas wilayah kebanjiran	1	0,09	0,8	0,7	0,6
2.5	Luas wilayah kekeringan	1	0,09	0,8	0,7	0,6
2.6	Luas wilayah perkotaan	9,6	9,65	9,85	9,9	9,95
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	95	62	99	110	110
3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	3	7	7	6	6
3.3	Jenis, kelas dan jumlah restoran	62	59	90	90	105
3.4	Jenis, kelas dan jumlah penginapan/ hotel	65	62	70	70	71
4.	Lingkungan Hidup					
4.1	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	5,52	7,28	7,65	14	26,14
5.	Komunikasi dan Informatika					
5.1	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	49,85	71	85,55	87,75	84

Sumber: Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi

Secara umum penataan ruang di Kabupaten Banyuwangi sudah cukup baik, luas wilayah produksi dan kawasan industri berkembang secara selaras, begitu pula daerah rawan banjir dan kekeringan dibawah angka 1. Sedangkan perkembangan wilayah perkotaan menunjukkan peningkatan yang dinamis, meskipun cukup lambat. Berdasarkan paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur perlu mengacu dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kedepan pemerintah kabupaten Banyuwangi perlu

melakukan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Indikator luas wilayah banjir yang semakin menurun menunjukkan sistem drainase perkotaan yang semakin baik dan akan meningkatkan umur prasarana wilayah yang dibangun.

Di bidang lembaga Keuangan telah tumbuh cukup signifikan. Ketersediaan fasilitas bank dan non bank (perusahaan asuransi) sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah dan pembiayaan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Pada indikator Jenis dan jumlah bank dan cabang di Kabupaten

Banyuwangi tahun 2011 sejumlah 95 unit, tahun 2012 sejumlah 62 unit, tahun 2013 sejumlah 99 unit, dan tahun 2014 naik menjadi 110 unit. Sedangkan indikator jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang tahun 2011 sejumlah 3 unit, tahun 2012-2013 meningkat menjadi 7 unit, dan tahun 2014 sejumlah 6 unit.

Ketersediaan restoran dan rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Perkembangan restoran dan rumah makan adalah indikator tumbuhnya pariwisata daerah. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi harus dibarengi dengan ketersediaan hotel, restoran dan rumah makan serta fasilitas akomodasi lainnya yang representatif. Untuk indikator Jenis, kelas dan jumlah restoran di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sejumlah 62 unit, tahun 2012 sejumlah 59 unit, tahun 2013 dan 2014 meningkat menjadi 90 unit. Sedangkan untuk indikator jenis, kelas dan jumlah penginapan/ hotel Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sejumlah 65 unit, tahun 2012 sejumlah 62 unit, dan tahun 2013-2014 sejumlah 70 unit.

Untuk capaian indikator Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Banyuwangi masih sangat rendah, tahun 2011 sebesar 5,52%, tahun 2012 sebesar 7,28%, tahun 2013 sebesar 7,65%, tahun 2014 sebesar 14%, dan pada tahun 2015 mencapai 26,14 %. Cakupan air bersih pedesaan yang dikelola HIPDAM mencapai kurang lebih 18%. Capaian layanan air bersih perkotaan mencapai 40 % yang dikelola PDAM. Kedepannya cakupan layanan air bersih pedesaan dan perkotaan perlu ditingkatkan. Pemanfaatan sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih perlu pengelolaan yang terpadu.

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta

memajukan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja indikator Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sebesar 49,85%, tahun 2012 sebesar 71%, tahun 2013 sebesar 85,55%, tahun 2014 sebesar 87,75%, dan pada tahun 2015 mencapai 84%. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sekitar 16% masyarakat Kabupaten Banyuwangi belum teraliri listrik, Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi perlu mendorong akselerasi pembangunan jaringan listrik keseluruhan wilayah yang belum tersentuh oleh listrik.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitan tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Salah satu indikator yang berpengaruh adalah masalah keamanan suatu daerah, keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun.

Angka kriminalitas di Kabupaten Banyuwangi cukup fluktuatif, tahun 2011 sebesar 668 kasus, tahun 2012 sebanyak 718 kasus, tahun 2013 sebesar 650 kasus, dan tahun 2014 sebanyak 653 kasus. Selain angka kriminalitas, kejadian demonstrasi juga sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan. Tahun 2011-2012 terjadi sebanyak 4 kegiatan demonstrasi, tahun 2013 meningkat menjadi sebanyak 7 kegiatan demonstrasi, dan tahun 2014

sebanyak 5 kegiatan demonstrasi. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya, oleh karena itu penting bagi Kabupaten Banyuwangi diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan penurunan angka kriminalitas.

Selain itu kegiatan demonstrasi yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu cerminan demokrasi di daerah, namun yang perlu ditekan adalah kegiatan demonstrasi yang mengarah pada aksi anarkisme, brutalisme, maupun rasisme, yang mempunyai potensi kerusuhan massa. Maka perlu adanya sebuah sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Banyuwangi. Cerminan iklim investasi yang baik dapat dilihat dari angka pendapatan daerah melalui pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah, realisasi pajak daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren yang positif meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 realisasi pajak daerah sebesar 32,42 milyar rupiah, tahun 2012 sebesar 40,77 milyar rupiah, tahun 2013 sebesar 65,94 milyar rupiah, dan tahun 2014 sebesar 94,19 milyar rupiah. Pendapatan pajak daerah berasal dari 11 macam pajak daerah, yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sebesar 2,12 milyar rupiah, meningkat secara drastis tahun 2012 sebesar 24,81 milyar rupiah, tahun 2013 sebanyak 28,44 milyar rupiah, dan tahun 2014 sebesar 67,06 milyar rupiah. Hal ini membuktikan bahwa iklim investasi di Banyuwangi berkembang dengan cukup baik, dari tahun ke tahun telah memberikan

sumbangan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan daerah baik dari pajak maupun retribusi daerah. Hal ini tentunya harus didukung dengan memperkuat peraturan daerah terkait dengan jaminan berinvestasi, sejauh ini perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Banyuwangi ada 1 Perda yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi.



Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1.1 Angka kriminalitas	668	718	650	653	650
1.2 Jumlah demo	4	4	7	5	4
1.3 Pajak Daerah (milyar Rp)	32,423	40,770	65,940	94,195	115,906
1.4 Retribusi Daerah (milyar Rp)	2,129	24,817	28,448	67,063	31,299
1.5 Macam Pajak Daerah	11	11	11	11	11
1.6 Macam Retribusi Daerah	36	36	26	30	30
1.7 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	0	1	1	1
1.8 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	90	93	95	97	97

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2015

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Keunggulan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci terciptanya daya saing tinggi daerah, dan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu hal yang tidak dapat terelakkan lagi.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya

persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sebesar 33,8. Menurun ditahun 2012 menjadi 32,7. Tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar 43,04. Sedangkan untuk peningkatan SDM di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sebesar 25. Tahun 2012 sebesar 30. Tahun 2013 dan 2014 meningkat signifikan atau 4



kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 120. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun angka dependensi atau ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi cukup tinggi, namun pembangunan SDM di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang cukup positif, sehingga daya saing daerah juga ikut meningkat.

Indikator perizinan juga berpengaruh terhadap daya saing suatu daerah, dengan memberikan kemudahan dalam perizinan usaha akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Capaian kinerja layanan perijinan yang memenuhi SOP di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sebesar 86,84%. tahun 2012 sebesar 91,67%. Tahun 2013 dan 2014 sebesar 90%. Sedangkan untuk

penyelesaian ijin lokasi capaian kinerja tahun 2011 sebesar 93%. Tahun 2012 sebesar 81,18%. Tahun 2013 sebesar 98,87%. Dan tahun 2014 sebesar 98,15%.



Tabel 2.30: Faktor Sumberdaya Manusia tahun 2011-2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ketenagakerjaan					
1.1	Rasio ketergantungan	33,8	32,7	43,04	43,04	42,5
1.2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	25	30	120	120	120

Sumber: LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014





BAB III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

Penyusunan Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab,

adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya (2010-2015), baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1 Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan,



belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2011–2015 berdasarkan pada data kinerja keuangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang diperoleh dari beberapa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada sub pembahasan ini diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

A. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas Keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan. Realisasi pendapatan

Tabel 3.1: Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	1,450,320,872,078.87	1,691,249,127,621.71	2,042,189,007,221.97	2,418,962,318,839.03	2,779,148.430.146,82	17,76
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	113,364,553,469.87	140,391,399,216.71	183,667,609,879.97	283,488,703,181.03	346,992,331,406.82	32,88
1.1.1.	Pajak daerah	32,449,080,866.10	40,769,833,221.00	65,939,965,334.00	94,133,355,279.62	115,993,092,646.15	38,43
1.1.2.	Retribusi daerah	21,621,743,609.84	24,824,477,408.00	28,650,551,431.00	67,276,765,522.00	31,299,048,537.00	27,89
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	9,983,335,503.89	14,503,063,660.51	14,541,339,289.58	15,562,622,841.37	15,571,579,456.62	13,22
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	49,310,393,490.04	60,294,024,927.20	74,535,753,825.39	106,515,959,538.04	184,128,610,767.05	40,44
1.2.	Dana Perimbangan	982,023,260,117.00	1,199,056,681,103.00	1,313,865,318,226.00	1,387,611,468,719.00	1,494,315,803,224.00	11,24
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	84,955,081,117.00	101,183,454,103.00	82,372,387,226.00	85,075,009,719.00	78,910,883,224.00	(0,86)
1.2.2.	Dana alokasi umum	815,156,279,000.00	1,030,217,037,000.00	1,154,495,171,000.00	1,254,496,229,000.00	1,288,940,680,000.00	12,46
1.2.3.	Dana alokasi khusus	81,911,900,000.00	67,656,190,000.00	76,997,760,000.00	48,040,230,000.00	126,464,240,000.00	30,51
1.3.	Lain lain pendapatan yang sah	354,933,058,492.00	351,801,047,302.00	544,656,079,116.00	747,862,146,939.00	937.840.295.516,00	30,50
1.3.1	Hibah	-	-	27,167,652,850.00	146,456,274,771.00	167.303.683.047,00	57,12
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	87,622,916,704.00	82,426,500,031.00	95,561,380,266.00	161,298,343,868.00	157,872,562,469.00	19,17
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	231,980,466,862.00	210,000,496,000.00	391,310,825,500.00	304,287,104,000.00	451,403,887,000.00	20,57
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	35,329,674,926.00	59,374,051,271.00	30,616,220,500.00	135,820,424,300.00	161,260,163,000.00	95,37

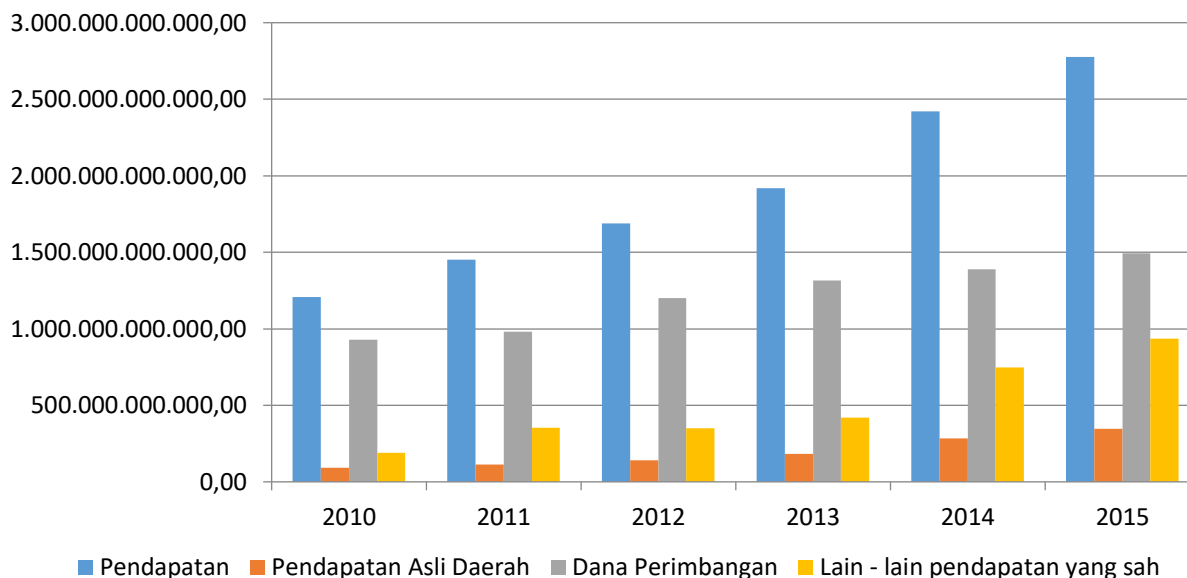
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi – LKPI 2011 - 2015

Kabupaten Banyuwangi secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. Prosentase rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan diasumsikan dihasilkan berdasarkan perhitungan total dari selisih anggaran setiap tahun dibagi tahun dasar dikalikan 100%.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 2011-2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan daerah tersebut dihasilkan dari pendapatan asli daerah, dana

perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Banyuwangi. Di tahun 2011 realisasi pendapatan mencapai Rp 1.450.320.872.078,87, di tahun 2012 meningkat menjadi Rp 1.691.249.127.621,71, di tahun 2013 pendapatan meningkat menjadi Rp 2.042.189.007.221,97, di tahun 2014 meningkat menjadi Rp 2.418.962.318.839,03 dan terus meningkat di tahun 2015 menjadi Rp 2.779.148.430.146,82.

Gambar 3.1: Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2015



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun jika dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan, ternyata sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari dana perimbangan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peringkat paling akhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi masih bergantung pada pusat dan provinsi melalui bantuan dana perimbangan. Adapun perkembangan dan posisi masing-masing pendapatan dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini.

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

B. Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja bunga;
3. Belanja subsidi;
4. Belanja hibah;
5. Belanja bantuan sosial
6. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/ desa;
7. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan;
8. Belanja tidak terduga.

Sedangkan Belanja Langsung meliputi

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja modal.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa selama periode 2011-2015 tidak semua komponen belanja mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan pada Belanja Tidak Langsung memiliki rata-rata pertumbuhan positif walaupun terdapat komponen pembentuknya yang memiliki rata-rata pertumbuhan negatif yaitu pada komponen belanja bantuan sosial. Rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi adalah salah satu komponen dari belanja tidak langsung yaitu belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa yang mencapai 26%. Nilai rata-rata yang sangat tinggi tersebut disebabkan karena terdapat peningkatan jumlah anggaran yang sangat signifikan pada tahun 2014 dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp 2.001.556.159.717,67

pada tahun 2013 menjadi Rp 2.299.307.896.458,18. Realisasi belanja langsung tahun 2015 menurun dari 46,27% di tahun 2014 menjadi 31,63% tahun 2015.

Pengalokasian anggaran merupakan salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembangunan yang dilaksanakan pada wilayahnya. Berdasarkan proporsi belanja pemerintah dapat dilihat apakah pengeluaran yang dilakukan pemerintah selama periode 2011-2015 lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal organisasi pemerintah atau pada kebutuhan diluar organisasi pemerintah. Proporsi alokasi anggaran yang memiliki kriteria baik adalah proporsi alokasi anggaran yang proporsi belanja tidak langsungnya tidak melebihi 70% dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah. Proporsi belanja Kabupaten banyuwangi pada periode 2011-2015 disajikan pada tabel 3.2. Prosentase rata-rata pertumbuhan realisasi belanja diasumsikan dihasilkan berdasarkan perhitungan total dari selisih anggaran setiap tahun dibagi tahun dasar dikalikan 100%.

Tabel 3.2: Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (5)
1	Belanja Daerah	1.443.011.683.813,19	1.683.717.702.413,97	2.001.556.159.717,67	2.299.307.896.458,18	2.740.988.071.579,02	17,41
1.1	Belanja Tidak Langsung	956.935.147,324.13	1.087.397.709,100.00	1.179.929.567.068,00	1.225.352.677.003,00	1.436.342.307,256.00	10,78
1.1.1	Belanja pegawai	791.455.675,678.25	920.402.324,660.00	1.006.008.558,051.00	1.078.911.578,821.00	1.167.835.076,600.00	10,27
1.1.2	Belanja hibah	51.989.911,826.00	70.577.415,100.00	94.762.639,777.00	72.860.137,523.00	122.750.256,472.00	28,85
1.1.3	Belanja bantuan sosial	64.718.188,229.88	22.830.673,000.00	11.270.125.000.00		6.131.490.319,000.00	(57,68)
1.1.4	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	41.513.750.00	1.780.517.950.00	1.023.802.850.00	3.171.740.750.00	2.326.879.350.00	46,89
1.1.5	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan	47.127.607,840.00	71.806.778,390.00	66.864.441,390.00	70.409.219,909.00	137.298.604,515.00	36,45
1.1.6	Belanja tidak terduga	1.602.250.000.00	-	-	-	-	0

1.2	Belanja Langsung	486,076,536,489.06	596,319,993,313.97	821,626,592,649.67	1,063,929,004,455.09	1,305,430,249,422.33	28,14
1.2.1	Belanja pegawai	29,099,471,573.00	34,551,299,450.00	60,835,282,562.00	68,950,463,132.00	76,071,391,378.00	29,62
1.2.2	Belanja barang dan jasa	206,129,849,678.06	205,956,387,238.97	343,772,907,200.67	436,431,864,175.36	529,943,112,725.61	28,71
1.2.3	Belanja modal	250,847,215,238.00	355,812,306,625.00	417,018,402,887.00	558,546,677,147.73	699,415,745,318.72	29,59

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi

Tabel 3.3: Perbandingan Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	Proporsi Belanja (%)				
	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
	Belanja Langsung				
Kabupaten Banyuwangi	33.68%	35.41%	37.47%	46.27%	31.63%
Kabupaten Situbondo	14%	49%	23%	25%	27%
	Belanja Tidak Langsung				
Kabupaten Banyuwangi	66.32	64.59	62.53	53.73	68.37
Kabupaten Situbondo	86%	51%	77%	75%	73%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa proporsi alokasi anggaran di Kabupaten Banyuwangi sudah cukup baik karena prosentase belanja tidak langsung selama tahun 2011-2015 berada dibawah 70%. Namun prosentase belanja tidak langsung tersebut juga harus dijaga dan ditekan karena terdapat kenaikan prosentase yang sangat signifikan pada tahun 2015 dari 53.73% pada tahun 2014 menjadi 68.37% di tahun 2015. Dibandingkan dengan Kabupaten Situbondo, proporsi belanja langsung dan tidak langsung selama tahun 2011-2015 kurang berimbang karena rata-rata melebihi 70% dari total anggaran belanja.

a. Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi

Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	221,232,088,197.57	228,536,239,404.25	201,931,722,469.47	227,693,037,693.66	334,490,060,074.51
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	401,899,250.00	34,201,356,063.00	15,000,000,000.00	12,900,000,000.00	20,000,000.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	34,000,000,000.00	15,000,000,000.00	12,900,000,000.00	-
Pembayaran Pokok Utang	-	201,356,063.00	10,000,000,000.00	-	20,000,000.00
Pengeluaran Pihak Ketiga	401,899,250.00	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	401,899,250.00	34,201,356,063.00	15,000,000,000.00	12,900,000,000.00	20,000,000.00
Pembiayaan Netto	220,830,188,947.57	194,334,883,341.25	186,931,722,469.47	214,793,037,693.66	334,470,060,074.51

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran

daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 221.232.088.197,57 naik pada tahun 2012 sebesar Rp 228.536.239.404,25 menurun pada tahun 2013 sebesar Rp 201.931.772.469,47. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp 227.693.037.693,66 dan di tahun 2015 meningkat kembali menjadi Rp. 334.490.060.074,51. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan realisasi. Pada tahun 2011, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 401.899.250,00

menurun pada tahun 2012 sebesar Rp 34.201.356.063,00 menurun kembali di tahun 2013 sebesar Rp 15.000.000.000,00. Pada tahun 2014 mengalami penurunan daeri tahun 2013 sebesar Rp 12.900.000.000,00 dan di tahun 2015 menurun kembali menjadi Rp 20.000.000,00.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, Pihak Legislatif daerah maupun para kreditur/ pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub – sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan rata – rata

pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5: Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015		
No.	Uraian	Rata-Rata pertumbuhan*
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	
1.1.1.	Kas dan Bank	
a.	Kas di Kas Daerah	4%
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-1%
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	-69%
d.	Kas di BLUD	24%
e.	Kas Lainnya	31%
1.1.2.	Piutang	
a.	Piutang Pajak	41%
b.	Piutang Retribusi	36%
c.	Piutang Dana Bagi Hasil	50%
d.	Piutang Lainnya	2%
e.	Penyisihan Piutang	39%
1.1.3.	Persediaan	5%
1.2.	Belanja di bayar dimuka	33%
1.2.1.	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1.2.2.	Investasi Non Pemanen	
a.	Investasi Nonpermanen-Dana Bergulir	25%
b.	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31%
c.	Investasi Nonpermanen Lainnya	0%
d.	Jumlah Investasi Nonpermanen	-46%
1.2.3	Investasi Pemanen	
a.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	17%
b.	Investasi Permanen Lainnya	0%
c.	Jumlah Investasi Permanen	17%

Tabel 3.5: Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Rata-Rata pertumbuhan*
1.3.	ASET TETAP	
1.3.1.	Tanah	0.4%
1.3.2.	Peralatan dan mesin	9%
1.3.3.	Gedung dan bangunan	3%
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	9%
1.3.5.	Aset tetap lainnya	8%
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	18%
	Akumulasi Penyusutan	31%
1.4	ASET LAINNYA	
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	0%
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0%
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak ketiga	10%
1.4.4.	Aset tak berwujud	54%
1.4.5.	Aset lain-lain	18%
2	JUMLAH ASET DAERAH	
2.1.	KEWAJIBAN	
2.1.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
a.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-4%
b.	Utang Bunga	0%
c.	Utang Pajak	0%
d.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0%
e.	Pendapatan Diterima Dimuka	47%
f.	Utang Belanja	38%
g.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0%
3.1.	EKUITAS DANA	
3.1.1.	EKUITAS DANA LANCAR	
a.	SILPA	-25%

Tabel 3.5: Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015		
No.	Uraian	Rata-Rata pertumbuhan*
b.	Pendapatan yang ditangguhkan	-21%
c.	Cadangan Piutang	7%
d.	Cadangan Persediaan	7%
e.	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	15%
f.	Ekuitas Dana Lancar Lainnya	0%
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	0%
3.1.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	
a.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-12%
b.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	0%
c.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-7%
d.	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0%
e.	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	-30%
3.1.3.	EKUITAS DANA CADANGAN	
a.	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0%
b.	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	-2%

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah daerah dimasa yang

akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dan Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Tabel 3.6: Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015				
No.	Uraian	2013	2014	2015
1.	Rasio Lancar	63,71	51,09	38,47
2.	Rasio Quick	55,77	46,45	37,13
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,00	0,00	0,00
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,02	-	-

Tabel 3.6: Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015

No.	Uraian	2013	2014	2015
5.	Rata – rata umur piutang	-	-	-
6.	Rata – rata umur persediaan	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013-2015

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2011 - 2015

Pendapatan daerah – termasuk Pendapatan Asli Daerah – harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Upaya pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan dengan sebaik mungkin supaya dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, perlu adanya strategi koleksi dan pemetaan potensi penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak, retribusi maupun penerimaan lain-lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/ sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis yakni tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk

senantiasa menaikkan pajak dan retribusi akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bertitik tolak pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah bidang pendapatan dan kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas;
 3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan karakteristik daerah dan pendayagunaan aset daerah termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
 4. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan menitikberatkan pendekatan potensi sumber daya alam;
 5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan;
- Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain:
1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa;
 2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana amanat dari wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;

3. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah, dan peningkatan perekonomian daerah;
4. Peningkatan aktifitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi dan nasional, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non pemerintahan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga) Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Namun dalam penyusunan data yang digunakan

terkait dengan APBD Tahun 2009-2012 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD. Sedangkan untuk APBD Tahun 2013 belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

Penggunaan anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kondisi proporsi penggunaan anggaran di Kabupaten Banyuwangi dihitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini sepintas memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Banyuwangi masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kabupaten Banyuwangi digunakan untuk belanja pegawai. Berikut tabel mengenai analisis proporsi belanja

pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015:

Total Belanja untuk pemenuhan aparatur tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 meningkat. Total Pengeluaran yaitu Belanja daerah ditambah pembiayaan pengeluaran tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 meningkat progressif.

Berdasarkan persentase proporsi kebutuhan aparatur, tabel diatas menunjukkan bahwa 2013 belanja daerah digunakan untuk pemenuhan belanja aparatur, sekitar 1,47% digunakan untuk belanja diluar pemenuhan kebutuhan yang diindikasikan ketidakefisien proporsi belanja daerah. Tahun tahun 2014 tetap dengan angka 1,47% dan akhir tahun 2015 turun menjadi 1,44%.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Dalam menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu

Tabel 3.7: Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015

No	Uraian Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) (a)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) (b)	Prosentase (a) / (b) x 100%
1	Tahun 2013	2,965,531,940,874.00	2,016,556,159,717.67	1.47
2	Tahun 2014	3,409,987,422,649.64	2,312,207,896,458.18	1.47
3	Tahun 2015	3,939,840,513,244.82	2,741,008,071,579.02	1.44

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013-2015

pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Berikut merupakan

tabel berkenaan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015:



Tabel 3.8: Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015
		Rp	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.450.320.872.078,87	1.691.249.127.621,71	2.042.189.007.221,97	2.418.962.318.839,03	2.777.417.468.204,82
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	1.443.011.683.822,19	1.683.717.702.413,97	2.001.556.159.717,67	2.299.307.896.458,18	2.740.988.071.579,02
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	401.899.250,00	34.201.356.063,00	15.000.000.000,00	12.900.000.000,00	20.000.000,00
A.	Defisit riil	6.907.289.006,68	(26.669.930.855,26)	25.632.847.504,30	106.754.422.380,85	36.409.396.625,80
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	220.755.627.297,57	228.139.377.204,25	201.772.632.469,47	227.680.687.693,66	334.447.460.074,51
2	Pencairan dana cadangan	0	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	476.460.900,00	396.862.200,00	159.090.000,00	12.350.000,00	42.600.000,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan pembiayaan Daerah	221.232.088.197,57	228.536.239.404,25	201.931.722.469,47	227.693.037.693,66	334.490.060.074,51
A + B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	228.139.377.204,25	201.866.308.548,99	227.564.569.973,77	334.447.460.074,51	370.899.456.700,31

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi

Dari tabel Penutup Defisit Anggaran bahwa pada Tahun 2012 – 2015 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki surplus riil yang cukup sebagai akumulasi dari defisit riil dengan total realisasi pembiayaan daerah, dimana menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2011 ke 2012 yaitu 220.755.627.297,57 di tahun 2011 dan menjadi 228.139.377.204,25 di tahun 2012, di tahun 2013 menurun menjadi 201.772.632.469,47, pada tahun 2014 sisa lebih pembiayaan anggaran naik menjadi 227.680.687.693,66 dan di tahun 2015 menjadi 334.447.460.074,51. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung. SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan

dengan keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif Jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi *over target* dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. SiLPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Banyuwangi sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan dapat menjadi rencana kedepan agar Kabupaten Banyuwangi dapat secara efektif menjalankan program yang telah direncanakan sehingga jumlah SiLPA Kabupaten Banyuwangi dapat diperkecil.



Tabel 3.9: Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

No.	Uraian	Proporsi total defisit riil				
		Th. 2011	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	220.755.627.297,57	228.139.377.204,25	201.772.632.469,47	227.680.687.693,66	334.447.460.074,51
2	Pencairan dana cadangan	0	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	476.460.900,00	396.862.200,00	159.090.000,00	12.350.000,00	42.600.000,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	228.139.377.204,25	201.866.308.548,99	227.564.569.973,77	334.447.460.074,51	370.899.456.700,31

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi

Dari tabel komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Banyuwangi terhitung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, terhitung SiLPA tahun 2011 sejumlah Rp 220.755.627.297,57, di tahun 2012 meningkat menjadi Rp 228.139.377.204,25, di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi Rp 201.772.632.469,47, di tahun 2014 meningkat menjadi Rp 227.680.687.693,66 dan di tahun 2015 meningkat menjadi Rp 334.447.460.074,51. Berikut merupakan tabel berkenaan dengan realisasi perhitungan sisa lebih anggaran Kabupaten Banyuwangi:

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja

Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Kerangka pendanaan dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum baik dalam konteks efektifitas kinerja aparatur (birokrasi) maupun efisiensi anggaran pendanaan pemerintah daerah berupa pengurangan anggaran insentif.

Tabel 3.10: Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Jumlah SILPA	228.139.377.204,25	201.866.308.548,99	277.564.569.973,77	334.447.460.074,51	370.899.456.700,31
2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	476.460.900,00	396.862.200,00	159.090.000,00	12.350.000,00	42.600.000,00
3	Penerimaan piutang daerah	102.283.712,00	0	0	0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi

Pada tabel 3.11 akan dipaparkan data mengenai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Prosentase rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dihasilkan berdasarkan perhitungan total dari selisih anggaran setiap tahun dibagi tahun dasar dikalikan 100%.

Tabel 3.11: Pengeluaran Wajib, Periodik dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2015

No	Uraian	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Belanja Tidak Langsung	919.229.107.045,00	1.003.492.283.396,00	1.076.053.361.077,09	1.167.835.789.100,69	1,73
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	701.218.173.914,00	727.217.075.098,00	748.822.137.856,00	809.119.889.970,00	0,05
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	211.228.409.508,00	270.861.918.000,00	322.153.094.716,09	349.911.804.105,69	0,19
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.240.200.000,00	4.354.800.000,00	4.380.000.000,00	4.346.000.000,00	0,01
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	2.542.323.623,00	1.058.490.298,00	698.128.505,00	4.458.095.025,00	1,49
B	Belanja Langsung	410.023.043.306,00	479.273.687.041,00	628.940.350.247,73	760.758.064.093,72	7,62
1	Belanja Honorarium PNS**)	6.069.200.000,00	7.938.461.450,00	9.802.610.816,00	12.246.966.050	0,26
2	Belanja Uang Lembur**)	5.697.631.250,00	8.146.944.050,00	8.942.519.700,00	9.184.905.000,00	0,18
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	149.566.500,00	102.416.650,00	57.009.650,00	5.126.600,00	(0,56)
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	984.293.816,00	1.829.516.700,00	1.596.629.828,00	2.854.931.569,00	0,51
5	Belanja premi asuransi kesehatan	224.694.000,00	337.000.000,00	-	-	
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	10.295.702.210,00	14.365.813.920,00	17.150.726.850,00	2.024.410.100,00	(0,10)
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	3.872.082.900,00	263.601.250,00	3.497.534.400,00	241.560.000	3,47
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	614.438.000,00	3.846.464.800,00	855.867.700,00	6.164.758.650,00	3,56
9	Belanja perjalanan dinas**)	26.207.072.325,00	25.425.065.334,00	28.490.774.156,00	28.619.660.856,00	0,03
10	Belanja perjalanan pindah tugas	31.055.680,00	-	-	-	
11	Belanja Pemulangan Pegawai	65.000.000,00	-	-	-	
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	355.812.306.625,00	417.018.402.887,00	558.546.677.147,73	699.415.745.318,72	0,25
	TOTAL	1.329.252.150.351,00	1.482.765.970.437,00	1.704.993.711.324,82	1.928.593.853.194,41	9,35

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi

Total belanja yang dikeluarkan Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 2012-2015 relatif mengalami kenaikan, pada tahun 2012 total belanja Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 1.329.252.150.351,00 di tahun 2013 naik menjadi Rp 1.482.765.970.437,00 di tahun 2014 naik menjadi Rp 1.704.993.711.324,82 dan naik kembali di tahun 2015 menjadi Rp 1.928.593.853.194,41.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan 2014-2019

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Berdasarkan data dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan 2015 daya serap anggaran, pada belanja langsung rata-rata hanya mampu menyerap sedikit dari anggaran yang ada. Hal ini tidak dapat dikatakan seutuhnya dari efisiensi, yaitu sebesar 0,22%.

Selisih dana antara SiLPA tahun lalu dengan tahun berkenaan akan diprioritaskan pada dana cadangan, penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial. Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.



Tabel 3.12 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020

N O	URAIAN	PROYEKSI				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
I	PENDAPATAN	3,008,759,653,660.52	3,148,950,173,393.14	3,341,937,024,425.65	3,597,142,214,202.70	3,940,840,764,576.54
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	307,192,563,268.52	353,421,892,514.83	408,695,109,811.29	474,449,793,430.33	551,522,210,642.16
	Pendapatan Pajak Daerah	108,316,523,371.90	129,080,514,146.08	154,567,238,766.32	185,696,653,839.73	223,095,447,149.75
	Pendapatan Retribusi Daerah	28,831,473,368.00	32,852,248,756.90	37,571,197,973.74	43,075,920,286.57	49,387,163,801.16
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16,111,079,857.62	16,817,517,197.68	17,647,106,989.19	18,614,343,157.67	19,838,643,500.99
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153,933,486,671.00	174,671,612,414.17	198,909,566,082.04	227,062,876,146.36	259,200,956,190.27
B	DANA PERIMBANGAN	2,164,759,546,240.00	2,251,543,683,072.38	2,371,572,407,993.12	2,529,657,102,770.73	2,741,278,564,107.24
	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	95,499,496,000.00	94,675,027,241.98	94,094,363,877.40	93,893,639,308.14	93,693,342,929.80
	Dana Alokasi Umum	1,400,384,500,000.00	1,438,834,575,955.88	1,497,240,611,451.65	1,577,684,953,287.17	1,703,899,749,550.15
	Dana Alokasi Khusus	668,875,550,240.00	718,034,079,874.53	780,237,432,664.07	858,078,510,175.42	943,685,471,627.30
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	536,807,544,152.00	543,984,597,805.92	561,669,506,621.24	593,035,318,001.65	648,039,989,827.14
	Hibah	31,226,010,989.00	148,354,502,073.58	172,559,771,545.06	206,345,243,870.91	260,212,349,078.96
	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	150,532,440,663.00	147,711,645,106.05	145,682,266,065.77	145,137,590,895.42	145,529,462,390.84
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	173,946,366,000.00	157,465,081,571.41	142,545,386,169.72	129,039,320,435.37	116,812,944,044.34
	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	81,102,726,500.00	90,453,369,054.88	100,882,082,840.69	112,513,162,799.95	125,485,234,313.00
II	BELANJA					
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,770,798,386,395.98	1,518,686,404,570.01	1,555,344,102,857.01	1,642,835,296,050.30	1,830,765,565,644.09
1	Belanja Pegawai	1,436,422,413,544.98	1,261,924,077,503.23	1,292,504,795,448.62	1,365,492,015,780.95	1,522,267,886,509.48

N O	URAIAN	PROYEKSI				
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	Th.2020
2	Belanja Hibah	74,463,244,946.00	96,469,279,452.05	98,797,832,423.54	104,355,406,614.20	116,293,024,308.28
3	Belanja Bantuan Sosial	9,508,790,000.00	27,185,198,080.73	27,841,388,052.62	29,407,521,396.62	32,771,561,259.56
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,168,000,000.00	2,278,600,716.02	2,333,601,048.75	2,464,870,740.01	2,746,836,816.46
5	Belanja Bantuan Keuangan	242,235,937,905.00	125,829,248,817.98	128,866,485,883.49	136,115,481,518.52	151,686,256,750.32
6	Belanja Tak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
B	BELANJA LANGSUNG	1,649,918,357,287.58	1,909,148,218,979.86	2,009,700,481,694.02	2,132,792,966,252.71	2,261,788,339,817.72
1	Belanja Pegawai	216,221,773,325.03	120,425,708,583.53	126,768,368,292.53	134,532,825,513.25	142,669,626,580.41
2	Belanja barang dan jasa	1,380,476,523,132.00	768,862,732,575.94	809,357,696,093.44	858,930,182,449.65	910,879,912,922.56
3	Belanja Modal	1,831,136,327,092.85	1,019,859,777,820.40	1,073,574,417,308.05	1,139,329,958,289.81	1,208,238,800,314.74
	SURPLUS / (DEFISIT)					
III	PEMBIAYAAN					
A	PENERIMAAN DAERAH					
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	411,957,090,023.04	278,884,450,156.73	223,107,560,125.39	178,486,048,100.31	151,713,140,885.26
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	411,957,090,023.04	278,884,450,156.73	223,107,560,125.39	178,486,048,100.31	151,713,140,885.26
B	PENGELUARAN DAERAH					
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
	Pembayaran Pokok Utang					
	Pembayaran Kelebihan Penerimaan Pendapatan					
	Pembiayaan Netto	411,957,090,023.04	278,884,450,156.73	223,107,560,125.39	178,486,048,100.31	151,713,140,885.26
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	-	-	-	-

Sumber: Perhitungan Proyeksi dari Laporan Realisasi Anggaran

Dari tabel Tabel 3.12 berkenaan dengan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan jumlah SILPA. SILPA tahun 2016 – 2020 diproyeksikan

3.3.2 Kebijakan Alokasi Anggaran

Analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini merupakan tabel sisa lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

Tabel 3.13: Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2015

No.	Uraian	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	227,680,687,693.66	334,447,460,074.51	371,841,713,765.31
Dikurangi:				
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0
3	Kegiatan lanjutan	0	0	0
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran		227,680,687,693.66	334,447,460,074.51	371,841,713,765.31

Sumber: Neraca Daerah Tahun 2013-2015

mengalami penurunan karena Pemerintah Daerah menggunakan prediksi anggaran defisit. Hal tersebut diasumsikan bahwa SILPA digunakan untuk mengakomodir penundaan belanja langsung di periode selanjutnya. Dari tahun 2016 SILPA Kabupaten Banyuwangi berjumlah Rp 278.354.976.106,83 di tahun 2017 menurun menjadi Rp 265.612.934.311,76 di tahun 2018 menurun menjadi Rp 251.670.846.697 di tahun 2019 menurun menjadi Rp 236.457.622.286,98 dan menurun kembali di tahun 2020 menjadi Rp 201.920.662.078,93.

Sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan secara bertahap. Dari tahun 2013, saldo kas neraca Rp 227.680.687.693,66 meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp 334.447.460.074,51 dan pada tahun 2015 sebesar Rp 371.841.713.765,31. Setelah diketahui sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan perlu di ketahui proyeksi lima tahun kedepan.

Tabel 3.14 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Data tahun dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	370,899,456,700.31	12%	0	0	0	0	0
Dikurangi:								
1	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0	0
2	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0	0
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran		370,899,456,700.31	0	0	0	0	0	0

Sumber: Perhitungan Proyeksi Neraca Daerah Tahun 2013-2015

Dari tabel proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran. Sedangkan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	3,008,759,653,660.52	3,148,950,173,393.14	3,341,937,024,425.65	3,597,142,214,202.70	3,940,840,764,576.54
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	411,957,090,023.04	278,884,450,156.73	223,107,560,125.39	178,486,048,100.31	151,713,140,885.26
Total penerimaan		3,420,716,743,683.56	3,427,834,623,549.87	3,565,044,584,551.04	3,775,628,262,303.01	4,092,553,905,461.80
Dikurangi:						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1,770,798,386,395.98	1,518,686,404,570.01	1,555,344,102,857.01	1,642,835,296,050.30	1,830,765,565,644.09
Kapasitas riil kemampuan keuangan		1,649,918,357,287.58	1,909,148,218,979.86	2,009,700,481,694.02	2,132,792,966,252.71	2,261,788,339,817.72

Sumber: Perhitungan dan Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran Daerah Tahun 2013-2015

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan

kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Dari analisis kerangka pendanaan tabel dibawah, dapat diketahui bahwa belanja langsung daerah pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp 3,420,716,743,683.56 meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2020 mencapai nilai sebesar Rp 4.092.553.905.461,81. Kerangka pendanaan ditetapkan sebagai pagu indikatif program pembangunan daerah.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Secara simultan persentasi tersebut

dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk persentasi final prioritas III. Dari tabel 3.16 dapat diketahui bahwa

prioritas III pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 383.107.318.949,72 meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2020. sebesar Rp 594.134.589.221,84. Sedangkan alokasi pendanaan untuk

Tabel 3.16 Kerangka PendanaanAlokasi Keuangan Daerah

No	Jenis Dana	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	PRIORITAS I	782,770,011,543.00	785,883,077,627.18	803,785,419,428.47	859,146,451,959.05	915,365,052,399.00
2	PRIORITAS II	484,041,026,794.86	499,382,596,800.00	549,728,206,450.00	581,709,291,253.00	619,028,391,398.67
3	PRIORITAS III	383.107.318.949.72	202,109,753,826.00	204,016,195,969.00	208,620,442,509.00	212,769,277,975.00

Sumber: Hasil Perhitungan dan Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

alokasi pendanaan keuangan daerah untuk prioritas I dari tahun 2016 sebesar Rp 782.770.011.543,00 meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2021, alokasi pendanaan keuangan daerah prioritas II adalah sebesar Rp 484.041.026.794,86. Alokasi pendanaan keuangan daerah

prioritas III pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 255.964.705.869,87 meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 396.089.726.147,89.





BAB IV

ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

4.1 Analisis Tahapan RPJP Berjalan

RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, karena RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Banyuwangi. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan

jangka panjang yang telah disusun. Visi RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025 adalah **“KABUPATEN BANYUWANGI YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MANDIRI BERBASIS AGROBISNIS DAN EKOWISATA TERPADU”**. Adapun berkenaan dengan misi tersebut berikut:

1. **Misi I.1 :**
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang religious, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal;
2. **Misi I.2 :**
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. **Misi II.1 :**
Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan SDM

berasas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

4. **Misi II.2 :**
Mewujudkan peningkatan pembangunan infratraktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan;
5. **Misi II.3 :**
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih profesional dan tanggung jawab;
6. **Misi III.1 :**
Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang mandiri berbasis agrobisnis terpadu;
7. **Misi III.2 :**
Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang mandiri berbasis Ekowisata Terpadu.

RPJPD 2005-2025 pada tahun RPJM ke 3 (2015-2020), diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada RPJMD ke 2. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, maka pada RPJM ke-3 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian berbasis agribisnis berlandaskan keunggulan sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam upaya mempertahankan dan terus meningkatkan kesehatan masyarakat, fokus pengembangan, pemantapan dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui: (a) peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang telah ada (RS, Puskesmas dan jejaringnya); (b) peningkatan kualitas tenaga kesehatan secara proporsional; (c) perluasan pelayanan kesehatan yang berkualitas,

terpadu sampai pada tingkat lingkungan; (d) merintis tumbuhnya industri farmasi dan obat yang bermutu; dan (e) meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mendorong pemberdayaan masyarakat.



Sejalan dengan uraian di atas, maka dalam kurun waktu 5 tahun, ketiga fokus arah pembangunan pendidikan dilakukan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas sebagai kelanjutan dari program pembangunan pada tahap sebelumnya, yaitu (a) dengan meningkatkan pembangunan pendidikan anak usia dini untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan dasar 9 tahun; (b) pelaksanaan program pendidikan dasar 12 tahun; (c) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang tanggap terhadap teknologi; (d) meningkatnya kompetensi tenaga pengajar dengan berbekal Iptek; (e)



berupaya mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbasis Life Skill; dan (e) Pengembangan Sekolah Bertaraf International (SBI), serta pendidikan keterampilan non formal. Sehingga mampu menciptakan lulusan yang siap bekerja dengan keahlian khusus dan meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi agar dapat menciptakan lulusan yang berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pada sisi pembangunan ekonomi, tahapan pembangunannya difokuskan pada peningkatan daya saing daerah yang antara lain meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi, prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas produk (SNI, ISO) dan meningkatkan iklim investasi untuk mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah sehingga menumbuhkembangkan agrobisnis maupun industri agro dan non agro serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

Sehingga pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis harus dapat mensinergikan berbagai sektor baik

primer, sekunder, dan sekunder, serta mensinkronisasi peran berbagai sektor lainnya secara terpadu antara pertanian, industri pengolahan dan sektor perdagangan dan jasa. Pada pengembangan UMKM diarahkan pada revitalisasi dan peningkatan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. Selain itu perlu juga peningkatan UMKM dalam hal SDM, permodalan, teknologi, pemasaran dan dukungan kebijakan pemerintah.

Dalam bidang pariwisata difokuskan dengan terus meningkatkan pembangunan pariwisata yang telah berkembang dan menggali potensi pariwisata baru yang potensial khususnya ekowisata, dengan memanfaatkan dan memperhatikan keterpaduan antara sumberdaya yang ada dimiliki, meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan, serta meningkatkan sosialisasi dan promosi keberadaan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi secara regional, nasional bahkan internasional.

Pada tahap ketiga ini, pembangunan infrastruktur lebih difokuskan dengan tetap mempertahankan

kemantapan pembangunan infrastruktur sebelumnya yang ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang telah memadai guna peningkatan ekonomi, layanan pendidikan dan kesehatan, antara lain melalui: (a) peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi; (b) peningkatan jaringan irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis; (c) menjaga pemenuhan kebutuhan energi terhadap masyarakat dan dunia usaha yang diikuti dengan persiapan energi alternatif/energi terbarukan; (d) berfungsinya peran media komunikasi dan informasi untuk pemeratakan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi baik untuk kegiatan pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, sosial dan informasi lainnya; (e) mengembangkan jaringan perpipaan air minum ke wilayah non pedesaan dan terbentuknya lembaga pengelola air minum pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat; (f) mengembangkan perumahan yang memenuhi standar rumah sehat secara merata dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan rencana tata ruang pada lahan-lahan non irigasi; dan (g) perluasan areal TPA diikuti dengan penambahan sarana dan prasarana penunjang dan adanya pembangunan TPS di seluruh kecamatan.

Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap ketiga difokuskan untuk lebih memantapkan kembali tata pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan pelayanan kepada

masyarakat yang semakin optimal di semua penyelenggara pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, kemampuan dan profesionalisme aparatur semakin meningkat, sarana prasarana yang baik dan proporsional, penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM semakin terjaga, demokrasi politik seimbang dengan budaya politik, ketentraman dan ketertiban makin membaik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan semakin meningkat.

Pembangunan aspek penataan ruang pada tahap ini difokuskan dengan lebih meningkatnya implementasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tata ruang yang ada, baik pembangunan infrastruktur, industri, perdagangan, jasa dan perumahan, serta perwujudan pengelolaan kawasan konservasi, pelestarian kawasan lindung dan pengelolaan kawasan pertanian secara berkelanjutan. Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada peningkatan proporsi kawasan lindung pada wilayah-wilayah yang potensial untuk dijadikan kawasan lindung, terutama melalui pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap kawasan di Kabupaten Banyuwangi, melalui peran pemerintah dan partisipasi Stakeholders disertai dengan penegakan aturan yang tegas tentang pengelolaan lingkungan serta terjadinya keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya secara proporsional.



4.2 Analisis RPJMN dan RPJMD Provinsi

4.2.1 RPJM Nasional

RPJMN Tahun 2015-2019, memiliki visi **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka RPJMN menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka agenda pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.2.2 RPJMD Provinsi Jawa Timur

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019 adalah **"JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN BERAKHLAK."** Dalam mewujudkan visi tersebut, Provinsi Jawa Timur berfokus pada lima misi, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustry, dan industrialisasi;
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik;
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Adapun berdasarkan penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Timur, urgensi pembangunan pada kontekstual Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ;
3. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;
4. Pemertahanan kawasan pertanian;
5. Pengembangan energi baru terbarukan;
6. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
7. Pembangunan infrastruktur transportasi;
8. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
9. Peningkatan kegiatan yang diarahkan pada perkebunan, pertanian, pertambangan, pariwisata pantai dan perikanan;
10. Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal dalam pengembangan industri kecil dan menengah sebagai pemasok utama pasar regional;
11. Sarana dan prasarana kawasan

- memperkuat peran sebagai kawasan agropolitan;
12. Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal secara optimal dan mendukung masyarakat industri kecil dan menengah sebagai pemasok utama pasar regional;
 13. Pengembangan perdagangan dan jasa agribisnis yang dapat mendukung kegiatan pariwisata di kaki Gunung Ijen;
 14. Pengembangan klaster komoditi guna percepatan pertumbuhan komoditi dan pengorganisasian pengembangan komoditi di kaki/lereng Gunung Ijen;
 15. Perluasan produk dan peningkatan ekonomi masyarakat;
 16. Peningkatan SDM dengan fokus pada sektor agribisnis, khususnya inovasi riset untuk keunggulan komparatif pada sektor unggulan;
 17. Penguatan kelembagaan didalam cluster agropolitan Ijen untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan;
 18. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor-sektor unggulan;
 19. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dari segi tatanan peraturan/regulasi, keamanan, stabilitas sosial, penyediaan infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia.

4.3 Platform Bupati Terpilih

Visi Bupati terpilih memiliki empat pilar yaitu: a) Meningkatnya perekonomian daerah; b) Masyarakat banyuwangi yang semakin sejahtera berlandaskan semangat gotong royong; c) Kemandirian Masyarakat

& Daerah; d) Meningkatnya kualitas SDM Banyuwangi. Dengan demikian maka, penekanan utama kebijakan umum pembangunan bupati adalah mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan utara dan selatan, memberdayakan masyarakat & mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga kelestarian sumber daya alam Banyuwangi agar bermanfaat bagi generasi sekarang maupun akan datang dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, bupati menetapkan sembilan agenda pokok pembangunan Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;
3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama perikanan dan



kelautan, tanaman pangan, serta perkebunan;

4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;
6. Pembangunan infrastruktur;
7. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.

4.4 Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi mempunyai luas wilayah 578.250 Ha, dari luas tersebut penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi masih didominasi lahan tidak terbangun berupa hutan, sawah dan lain sebagainya. Berdasarkan pemanfaatan lahan yang digunakan oleh para petani, mulai dari kawasan Selatan ke arah Utara yang melebar ke arah Barat merupakan daerah potensi tanaman bahan makanan. Utamanya tanaman padi banyak ditanam di kawasan ini, bahkan sebagian besar dari kawasan tersebut pola tanam padi dalam satu tahunnya bisa dilakukan hingga tiga kali.

Disamping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya

intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

Seiring dengan perkembangan wilayah Kabupaten Banyuwangi, lahan pertanian termasuk lahan perkebunan setiap tahun mengalami pengurangan (alih fungsi) lahan sebagai akibat digunakan untuk kepentingan lain, antara lain; digunakan untuk pembangunan pemukiman/ perumahan, pergudangan/ industri maupun pemanfaatan yang lain. Pemanfaatan ruang untuk menunjang kepentingan pembangunan tersebut selain berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi akan tetapi apabila ditinjau dari aspek lingkungan apabila pemanfaatan ruang atau alih fungsi lahan tidak terkendali akan berdampak negatif antara lain; menurunnya daerah resapan/tangkapan air, menurunnya volume air permukaan, peningkatan perubahan iklim, menurunnya mutu/ kualitas air, udara dan tanah, resiko terjadi rawan bencana banjir/longsor/ kekeringan yang pada akhirnya akan mempengaruhi menurunnya produksi tanaman pangan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya tentunya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinergiskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagaimana dituangkan visi, misi dan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi 2012 – 2032.

4.4.1 Visi dan Misi Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi

Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi dirumuskan berdasarkan isu pengembangan wilayah dan visi pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

“Terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten berbasis pada potensi sumberdaya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan kawasan budidaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana”

Sedangkan misi penataan ruang Kabupaten Banyuwangi yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pengendalian kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan untuk mengurangi disparitas antar wilayah;
3. Mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya local berupa pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industry kecil dan menengah serta industri besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi;
5. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berbasis sumberdaya lokal dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia;
6. Meningkatkan kerjasama investasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat;

7. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, visi ini juga didasarkan atas azas penyusunan rencana tata ruang wilayah dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional, sebagai berikut:

1. Keterpaduan;
2. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
3. Keberlanjutan;
4. Keberdayagunaan dan keberhasilan;
5. Keterbukaan;
6. Kebersamaan dan kemitraan;
7. Perlindungan kepentingan umum;
8. Kepastian hukum dan keadilan; serta
9. Akuntabilitas.

Sementara itu, ditinjau dari tujuan penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.



Sehingga jika dilihat berdasarkan azas dan tujuan penataan ruang wilayah nasional serta isu pengembangan wilayah dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Banyuwangi, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

“Mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan.”

4.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan:

Arah kebijakan pembangunan ditinjau dari aspek Penataan Ruang di Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan pertanian dan kawasan pertanian;
- b. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa;
- d. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan, dan pelayanan dasar masyarakat;
- e. Pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- f. Penataan sektor informal;
- g. Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam;
- h. Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis;
- i. Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung; dan
- j. Pengendalian kawasan rawan bencana alam.

4.4.3 Strategi Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dimaksud, beberapa strategi pembangunan yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

a. Pengembangan kawasan pertanian, meliputi:

1. Mempertahankan kawasan pertanian produktif dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan mengembangkan lahan pertanian baru;
2. Menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan atau lahan pertanian abadi, guna tercapainya pengelolaan lahan pertanian teknis secara optimal;
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan agropolitan, untuk terwujudnya pengembangan agroindustri dan agrobisnis di kawasan agropolitan;
4. Mengembangkan produk-produk unggulan budidaya pertanian dan hortikultura;
5. Mengembangkan kawasan budidaya peternakan, perkebunan dan kehutanan;
6. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur sumberdaya air dan infrastruktur penunjang pertanian lainnya.

b. Pengembangan kawasan perikanan, meliputi:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya air laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar;
2. Mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan kawasan minapolitan;
3. Mengembangkan sentra-sentra produksi perikanan yang

mendukung industri pengolahan perikanan di kawasan minapolitan;

4. Mengendalikan pencemaran lingkungan pada sentra-sentra produksi perikanan dengan meningkatkan pengelolaan limbah industri perikanan yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan;
5. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan perikanan;
6. Meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan perikanan;
7. Mengawasi dan mengendalikan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan; dan
8. Mengembangkan dan mengendalikan kawasan hutan bakau dan kawasan terumbu karang bagi keberlanjutan ekosistem kawasan perikanan.

c. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi:

1. Mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sesuai dengan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP);
2. Mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan pada setiap WPP;
3. Mengembangkan jalur pariwisata terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
5. Melestarikan nilai-nilai tradisi atau kearifan budaya masyarakat lokal beserta lingkungannya sebagai daya tarik wisata budaya;
6. Melestarikan kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai aset budaya daerah dan pariwisata;
7. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata pada kawasan konservasi, kawasan

lindung, cagar alam, hutan produksi, dan perkebunan melalui pengembangan ekowisata; dan

8. Meningkatkan peranserta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dengan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, dan promosi bagi pengembangan pariwisata.

d. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah, meliputi:

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan bagi pengembangan kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa;
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan jalan menuju pusat kegiatan pelayanan dasar masyarakat;
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan prasarana sumber daya air dan jaringan irigasi;
4. Mengembangkan pembangunan jalan baru menuju kawasan pertumbuhan ekonomi wilayah;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
6. Mengoptimalkan fungsi bandara udara, pelabuhan dan angkutan laut sebagai pitnu gerbang pertumbuhan ekonomi.

e. Pengembangan kawasan yang memiliki fungsi ekologis lingkungan, meliputi:

1. Mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan kawasan lindung geologi;
2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, pemangku wilayah

kawasan, masyarakat, dan swasta dalam pengembangan kawasan hutan yang memiliki nilai ekonomis, untuk menunjang pengembangan pariwisata, pendidikan, penelitian dengan tetap mempertahankan fungsi lindung dan berkelanjutan;

3. Mengembangkan dan mengendalikan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, ruang evakuasi bencana alam, dan kawasan perlindungan bawahan;
4. Melestarikan dan mengendalikan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air untuk mencegah bencana banjir/longsor dan kekeringan;
5. Mengembangkan manajemen perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

f. Pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten, meliputi:

1. Menyusun rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas perkotaan melalui penataan ruang terbuka hijau, pedestrian, drainase yang memadai;
3. Pengembangan sarana, prasarana, utilitas perumahan dan permukiman guna mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan/perdesaan yang sehat;
4. mengoptimalkan percepatan pengembangan kawasan strategis melalui kerjasama investasi pemerintah, swasta dan masyarakat.

4.5 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi yang paling *urgent* adalah pada aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terkendala karena minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk

ketersediaan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke pelayanan tersebut sangat terbatas dan terkendala oleh kualitas infrastruktur jalan yang rendah. Disamping itu, isu lingkungan masih cukup mendominasi seperti misalnya persampahan, pencemaran lingkungan dan polusi. Kesadaran masyarakat dan afirmasi pemerintah menjadi *critical point* dalam kasus ini. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dapat diamati dalam rekapitulasi gambaran umum permasalahan Kabupaten Banyuwangi berikut ini:

1. Belum tercapainya akses pendidikan wajib belajar 12 tahun;
2. Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi;
3. Kurang optimalnya layanan pendidikan inklusif;
4. Belum optimalnya akses dan kualitas



- pelayanan kesehatan dasar;
5. Belum optimalnya ketersediaan dan mutu sediaan farmasi, pembekalan dan alat kesehatan;
 6. Masih kurangnya akses dan kualitas lingkungan sehat;
 7. Masih kurangnya kualitas layanan kesehatan di Rumah Sakit;
 8. Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya local;
 9. Belum optimalnya pelayanan keolahragaan;
 10. Besarnya tekanan dan tuntutan untuk mengkomodir pemberlakuan ASEAN Community;
 11. Belum optimalnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS;
 12. Adanya peningkatan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah;
 13. Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM;
 14. Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas;
 15. Belum terciptanya kondisifitas dan dominasi afirmasi terhadap Usaha Kecil Menengah;
 16. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
 17. Kurangnya kemampuan dan kapasitas pelaku usaha;
 18. Belum optimalnya peran koperasi sebagai pelaku sektor riil;
 19. Kurangnya pertumbuhan wirausaha baru yang berkualitas;
 20. Konsistensi peningkatan investasi belum mampu menjawab tingginya permintaan;
 21. Belum optimalnya pemasaran produksi pertanian;
 22. Belum efektif dan efisiennya sarana dan sarana pertanian dalam menunjang produktivitas;
 23. Momentum penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT);
 24. Masih relatif tingginya gini rasio



25. Belum meratanya sebaran penduduk Kabupaten Banyuwangi;
26. Belum intensifnya pemasaran pariwisata berbasis IT;
27. Perlunya perluasan jaringan kemiteraan pariwisata;
28. Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata;
29. Kurangnya kualitas fasilitas publik;
30. Kurangnya kuantitas fasilitas publik;
31. Kurangnya panjang trotoar Kabupaten Banyuwangi;
32. Belum optimalnya kualitas infrastruktur perhubungan;
33. Belum optimalnya kualitas sarana lalu lintas;
34. Masih rendahnya cakupan fasilitas teknologi, informasi dan komunikasi;
35. Rendahnya sarana dan prasarana air bersih;
36. Relatif besarnya cakupan wilayah yang berpotensi kekurangan air;
37. Masih adanya wilayah yang belum terhubung oleh jembatan yang baik;
38. Meningkatnya kualitas perumahan yang terjangkau air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh;
39. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan;
40. Belum optimalnya penyediaan akses sanitasi dan air bersih;
41. Belum optimalnya kelembagaan HIPPA/GHIPPA Kab Banyuwangi;
42. Belum optimalnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial;
43. Masih kurangnya kesiagaan bahaya kebakaran;
44. Belum tercukupinya RTH Publik 20% dari total 30% RTH Wilayah;
45. Perlunya penguatan penataan ruang eksisting Kabupaten Banyuwangi;
46. Masih relatif tingginya pembangunan tidak ber-IMB;
47. Kurangnya kualitas infrastruktur perdesaan;
48. Belum kuatnya karakter dan pondasi perekonomian perdesaan;
49. Belum terbangunnya optimalisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan;
50. Meningkatnya penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
51. Meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan;
52. Masih kurangnya keberpihakan pembangunan terhadap anak;
53. Meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam;
54. Besarnya afirmasi dan atensi pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi;
55. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral aparatur;
56. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah



- daerah;
57. Besarnya tuntutan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 58. Terbatasnya kapasitas pemerintahan pemerintah desa;
 59. Belum optimalnya pelayanan publik;
 60. Belum optimalnya bisnis proses birokrasi pelayanan publik
 61. Banyaknya kasus pengaduan masyarakat;
 62. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
 63. Belum optimalnya integrasi sistem sistem informasi daerah yang telah tersedia dan cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan.

4.6 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut.

4.6.1 Rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang berkualitas

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Banyuwangi sendiri sampai pada tahun

2015 teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal. Seperti cakupan akses layanan PAUD misalnya, yang berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Begitupun halnya dengan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur, sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi juga masih rendah. Tidak hanya pada urusan pendidikan, pada urusan kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk diperhatikan. Seperti halnya pelayanan kesehatan dasar misalnya yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi khususnya daerah perdesaan. Selain infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan *pressure* tersendiri terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga pembangunan manusia mengalami perlambatan. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu untuk dikedepankan mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan wujud nyata dari cita-cita UUD 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat.



4.6.2 Belum optimalnya penguatan modal sosial dan penanganan PMKS

Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang mengedepankan pariwisata sebagai prioritas pembangunan harus mampu mengamankan modal sosial. Terlebih lagi mengingat pemberlakuan *ASEAN Community* yang semakin memperbesar intervensi budaya-budaya asing terhadap budaya dan nilai-nilai sosial lokal. Perlu adanya tindakan preventif dalam rangka mem-filter intervensi budaya yang mungkin mampu mempengaruhi nilai kearifan lokal Banyuwangi melalui penguatan modal sosial. Selain itu, PMKS juga menjadi isu tersendiri yang perlu untuk menjadi perhatian. Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Banyuwangi masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial perlu ditingkatkan.

4.6.3 Belum kuatnya *bargaining position* UMKM dan Sumberdaya Wirausahawan

Dalam rangka merespon tingkat kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Banyuwangi perlu distimulasi melalui penguatan *bargaining position* UMKM serta sumberdaya wirausahawan. Namun sampai saat ini permasalahan-permasalahan mendasar berkenaan dengan UMKM dan sumberdaya wirausahawan belum dapat sepenuhnya terselesaikan. Seperti kualitas dan daya saing UMKM misalnya yang masih belum optimal. Selain itu, struktur pelaku usaha masih didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas. Pembinaan dan pembekalan sumberdaya wirausahawan masih rendah, hal ini melatarbelakangi kualitas dan kuantitas SDM pelaku usaha cenderung rendah. Oleh karenanya perwujudan daya saing ekonomi daerah penting untuk diupayakan.

4.6.4 Pertumbuhan ekonomi yang belum fokus pada sektor unggulan

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan data yang telah dihimpun, masih berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, konsistensi peningkatan investasi di Kabupaten Banyuwangi masih belum mampu menjawab tingginya permintaan yang ada. Disamping itu, sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian masih belum efektif, hal ini berbanding lurus dengan pemasaran produksi pertanian yang juga masih belum optimal. Kondisi-kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal. Positifnya, TPT di Kabupaten Banyuwangi mengalami konsistensi penurunan.

4.6.5 Disparitas pendapatan dan infrastruktur yang masih harus di selesaikan

Indeks gini di Kabupaten Banyuwangi masih cenderung tinggi. Selain itu, sebaran penduduk Kabupaten Banyuwangi masih belum merata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran kapasitas SDM masih belum optimal pula. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pada level nasional maupun regional provinsi, isu kesenjangan atau disparitas masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan. Sehingga, disamping perlu adanya pengupayaan kerjasama antar wilayah di Kabupaten Banyuwangi, perlu pula peningkatan kerjasama antar daerah

sekitar Banyuwangi demi mengurangi indeks gini.

4.6.6 Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB

Pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi sudah sepatutnya menjadi motor penggerak produktif perekonomian daerah. Berdasarkan data yang telah dihimpun, kontribusi penerimaan PDRB melalui komoditas pariwisata belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi perluasan jaringan kemitraan yang belum optimal atau daya dukung infrastruktur dan SDM lokal pariwisata yang masih lemah. Melihat kondisi tersebut, nampaknya peran masyarakat sangat vital untuk mendukung perkembangan pariwisata. Sehingga, sangat rasional bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menjadi *lverage* pembangunan pariwisata, khususnya pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4.6.7 Belum optimalnya penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur pendukung perekonomian

Fasilitas di Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, kondisi infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan, hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Banyuwangi.

4.6.8 Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat serta berkualitas

Kabupaten Banyuwangi memiliki isu yang cukup serius dengan penyediaan air bersih. Beberapa isu yang perlu diperhatikan Kabupaten Banyuwangi berkenaan dengan akses air bersih dan lingkungan yang sehat adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya sarana dan prasarana air bersih;
2. Relatif besarnya cakupan wilayah yang berpotensi kekurangan air;
3. Masih tingginya wilayah yang belum terhubung oleh jembatan yang baik;
4. Meningkatnya kualitas perumahan yang terjangkau air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Meskipun demikian, rumah dengan jangkauan air bersih, sanitas, layak huni dan tidak kumuh dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sehingga dalam rangka mengakomodir banyaknya isu serta momentum positif tersebut perlu untuk memberikan afirmasi lebih terhadap isu ini. Oleh karenanya, penyediaan infrastruktur baik fisi, ekonomi maupun sosial sangat penting untuk ditingkatkan.

4.6.9 Belum terbangunnya sistem penanggulangan bencana

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah rawan bencana tsunami berdasarkan pada RPJMN. Namun pada faktanya, Kabupaten Banyuwangi juga merupakan wilayah rawan bencana gunung meletus, puting beliung maupun bencana kebakaran. Meskipun demikian, Kabupaten Banyuwangi masih belum

memiliki sistem manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial serta kesiagaan bahaya kebakaran. Sistem ini dapat didukung salah satunya dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

4.6.10 Baiknya kualitas penataan ruang namun belum diiringi dengan luasan RTH Publik yang proporsional

Kabupaten Banyuwangi sampai pada tahun 2015 masih belum mampu mengakomodir 20% RTH Publik dari total 30% RTH dari total luas wilayah Kabupaten Banyuwangi. Meskipun demikian, kualitas penataan ruang Kabupaten Banyuwangi telah sangat baik, hal ini terbukti dari prestasi berupa penghargaan yang diterima Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian maka, tuntutan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas penataan ruang menjadi perhatian penting pembangunan Kabupaten Banyuwangi mengingat pembangunan tanpa IMB masih relatif tinggi. Inilah sebabnya mengapa, peningkatan kuantitas yang ekuivalen dengan kualitas sangat penting untuk diperhatikan pemerintah daerah. Agar peningkatan infrastruktur fisik diiringi dengan kualitas yang ada baik secara teknis maupun nonteknis.

4.6.11 Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di perdesaan

Administrasi perdesaan semenjak rilisnya UU No 6 tahun 2014 menjadi isu yang sangat penting untuk diakomodir. Disamping peran strategis pembangunan level *bottom* banyak diakomodir Desa, garda terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat adalah desa. sehingga kapasitas SDM di desa menjadi sangat penting untuk ditingkatkan.

Di Kabupaten Banyuwangi karakter dan pondasi perekonomian serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan masih belum berjalan optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kapasitas kelembagaan di desa sehingga kualitas pengelolaan desa menjadi tidak begitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, perluasan jangkauan pelayanan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar perlu untuk diupayakan pemerintah daerah Kabuapten Banyuwangi.

4.6.12 Meningkatnya afirmasi terhadap perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender

Jika memperhatikan data, isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mengalami progress positif. momentum positif terjadi khususnya pada peningkatan penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan semakin meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan. Hal ini

memberikan sinyal positif bahwa perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender mendapat respon positif di Kabuapten Banyuwangi. Kondisi ini tentu harus dipertahankan dan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga momentum positif tersebut dapat sustain dan semakin berkualitas.

4.6.13 Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam

Berdasarkan data yang telah dihimpun, pencemaran lingkungan di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan sampai pada tahun 2014. Hal ini menjadi distorsi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi. Alasannya adalah, *bargaining position* Kabupaten Banyuwangi sangat terancam dengan adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi sangat



strategis untuk diupayakan pemerintah daerah, mengingat topografi dan karakteristik fisiologi Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu modal utama pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

4.6.14 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas sektoral serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih lemah. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

4.6.15 Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengkomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai pada tahun 2015, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Banyuwangi masih belum berjalan optimal. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Banyuwangi masih perlu untuk ditingkatkan.





FESTIVAL
PERKUSI DAN LARLARE ORKESTRA





BAB V

Visi, Misi, Tujuan & Sasaran

5.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD 2016-2021 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri, dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banyuwangi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar Visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1: Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

Visi	Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas SDM Banyuwangi	Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : 1) pendidikan yang berkualitas, berakhlak, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.
	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Basis ekonomi Banyuwangi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, dan hortikultura, 2) pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 3) UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat.
	Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera Berlandaskan Semangat Gotong Royong	Semangat gotong royong yang melandasi pergerakan perekonomian dimana didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Visi	Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
	Kemandirian Masyarakat & Daerah	Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.

5.2 Misi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 - 2021 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- b. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal;

- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial;
- d. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut

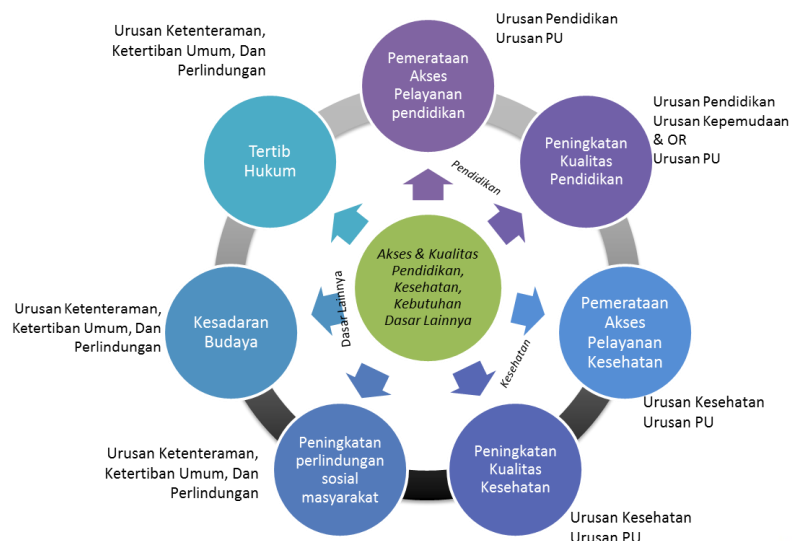


5.2.1 MISI 1

Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-1 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1 sebagai berikut:



Gambar 5.1: Logframe perencanaan terintegratif Misi 1

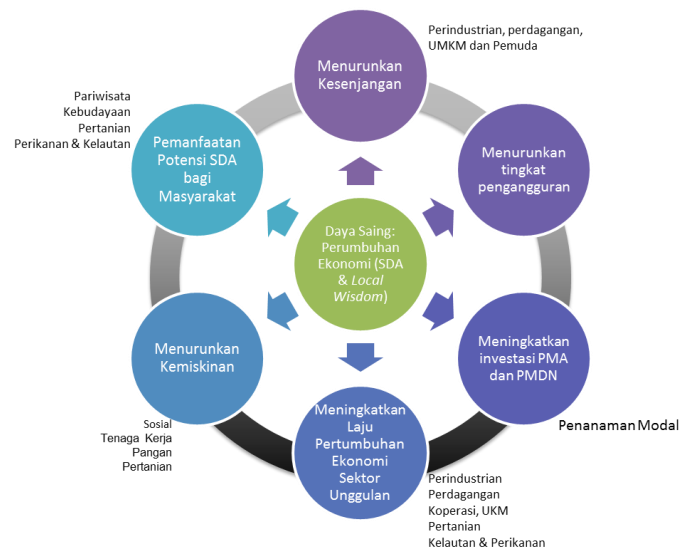


5.2.2 MISI 2

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dibumi Banyuwangi baik yang tersimpan didalam maupun dipermukaan bumi serta potensi di lautan Banyuwangi mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan Masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-2 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian **Misi Ke-2** sebagai berikut :



Gambar 5.2: Logframe perencanaan terintegratif Misi 2

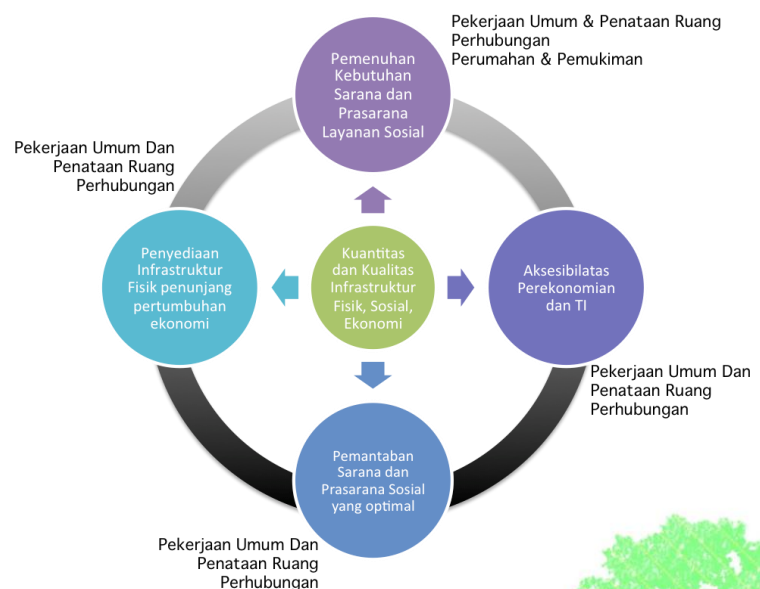


5.2.3 MISI 3

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-3 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3 sebagai berikut :



Gambar 5.3: Logframe perencanaan terintegratif Misi 3

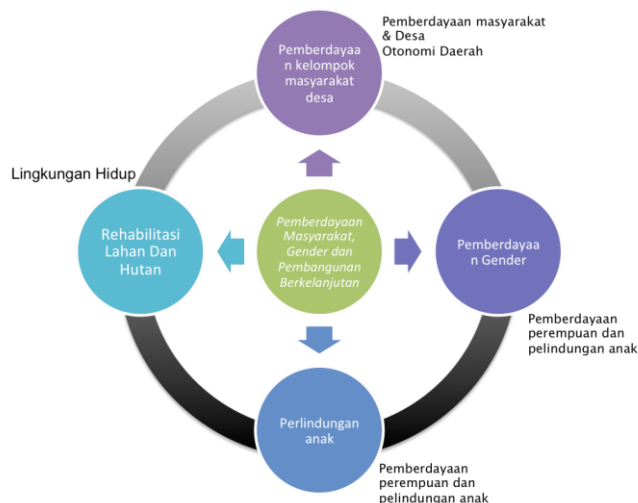


5.2.4 MISI 4

Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Pemberdayaan masyarakat turut serta berperan aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah terutama jika diarahkan kepada pengelolaan sumberdaya strategis Kabupaten Banyuwangi. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berhenti di dalam proses perencanaan, akan tetapi dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan masyarakat harus mampu bersinergi dengan Pemerintah.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-4 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian **Misi Ke-4** sebagai berikut :



Gambar 5.4: Logframe perencanaan terintegratif Misi 4

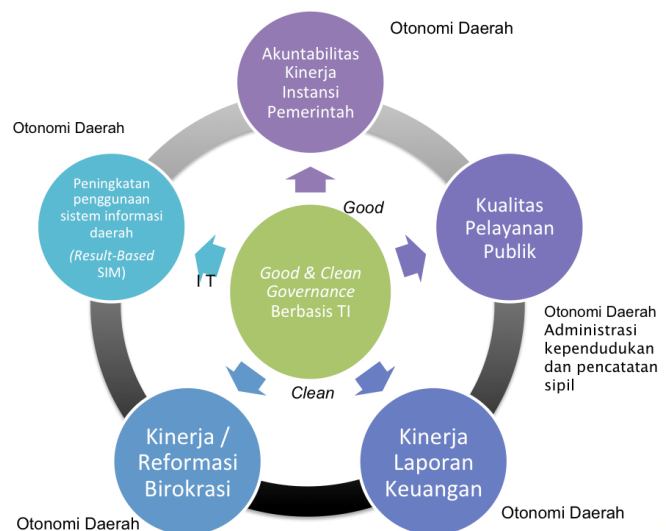


5.2.5 MISI 5

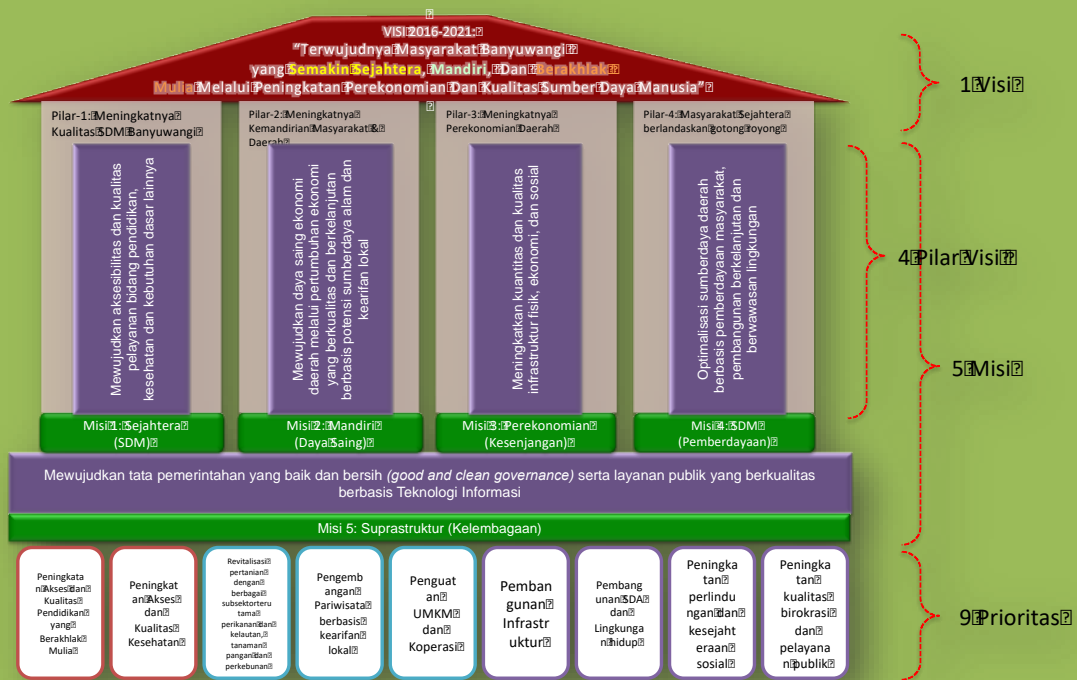
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip *good and clean governance*.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-5 maka dirumuskan **Perencanaan Terintegratif** dalam Langkah Pencapaian **Misi Ke-5** sebagai berikut :



Gambar 5.5: Logframe perencanaan terintegratif Misi 5



Gambar 5.6: Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;

Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan

3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama perikanan dan kelautan, tanaman pangan, serta perkebunan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;

5. Penguatan UMKM dan koperasi;

4 prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian;

6. Pembangunan infrastruktur;

7. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;

9. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diinterpretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Banyuwangi sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar isi dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut



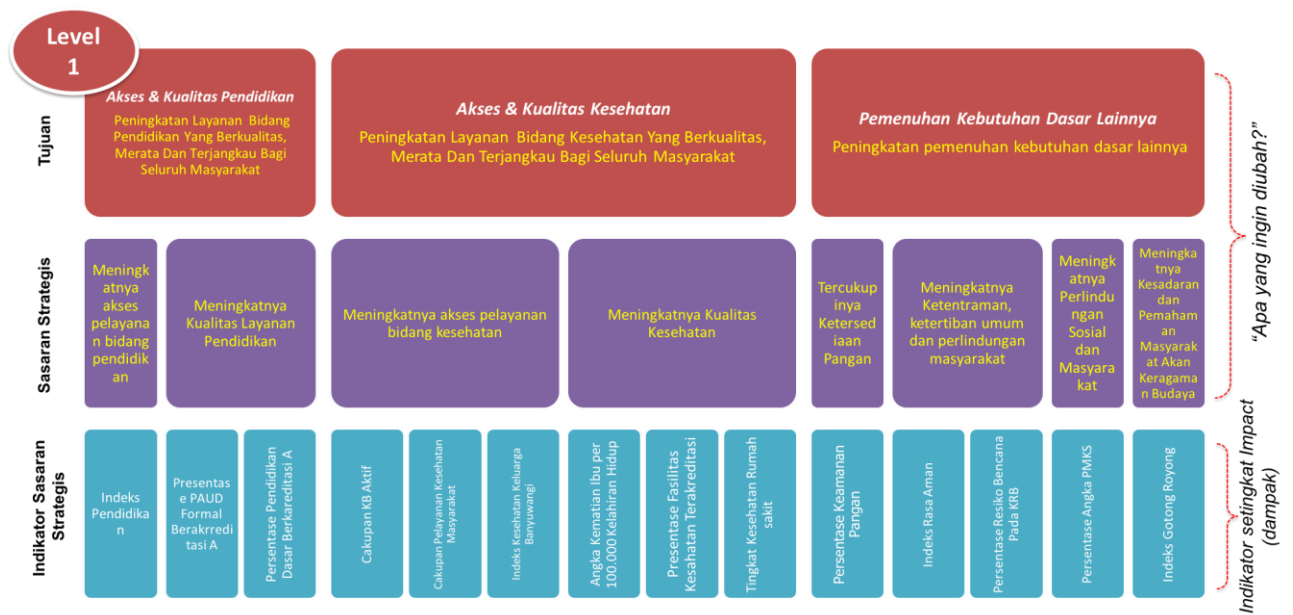
5.3 Tujuan Dan Sasaran

Berangkat daripada Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

5.3.1. Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat, dengan sasaran pembangunan:
 - 1) Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan;
 - 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan.
- b. Peningkatan Layanan Bidang Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat, dengan sasaran pembangunan:
 - 1) Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan;
 - 2) Meningkatnya Kualitas Kesehatan.
- c. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya, dengan sasaran pembangunan:
 - 1) Tercukupinya ketersediaan pangan;
 - 2) Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat;
 - 4) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat Dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian **Misi-1** yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.7: Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1

5.3.2. Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Menurunnya kesenjangan antar wilayah;
2. Menurunnya tingkat pengangguran;
3. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Meningkatnya Investasi PMA Dan PMDN;



5. Meningkatnya pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat. Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.8 Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-2

5.3.3 Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu:
 - 1) Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas.
- b. Meningkatkan Infrastruktur Sosial Yang Berkualitas, Dengan sasaran pembangunan yaitu:

- 1) Meningkatkan infrastruktur sosial yang berkualitas.
- c. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan, Dengan sasaran pembangunan yaitu:
 - 1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan.
 Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-3 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.9: Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-3

5.3.4 Dalam rangka pencapaian misi Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender serta Perlindungan Anak, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut

1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
2. Terwujudnya pemberdayaan responsif gender;
3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-4 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.10: Desain *Loaical Framework* Pencapaian Misi-4

5.3.5 Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

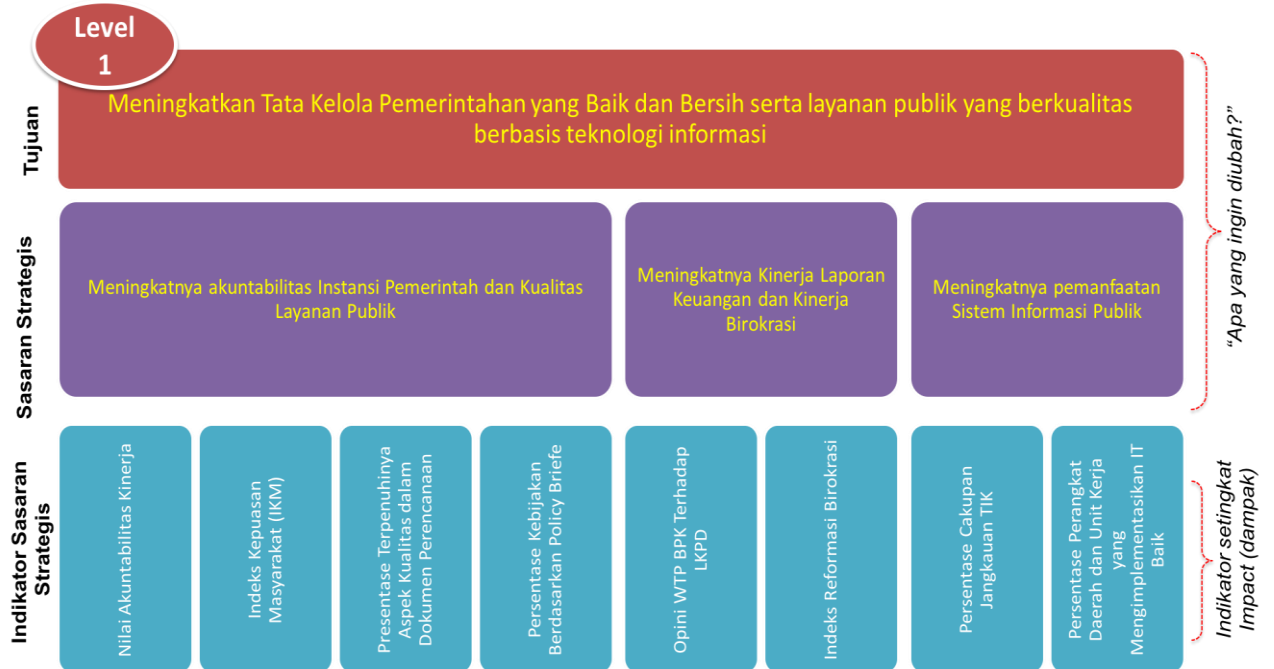
a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang

Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik;
2. Meningkatnya Kinerja laporan Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
3. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah;

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain

Logical Framework Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.11: Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5



5.4 Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat

pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini.



Tabel: 5.2 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	VISI: Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia				
	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
1	Mewujudkan Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya	T.1. Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan Yang Berkualitas, Merata Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat	S.1 Meningkatnya Akses Pelayanan Bidang Pendidikan	1	Indeks Pendidikan
			S.2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	2	Presentase PAUD Formal Berakreditasi A
				3	Presentase Pendidikan Dasar Berakreditasi A
		T.2. Peningkatan Layanan Bidang Kesehatan Yang Berkualitas, Merata Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat	S.3 Meningkatnya Akses Pelayanan Bidang Kesehatan	4	Cakupan KB Aktif
				5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
				6	Indeks Kesehatan Keluarga Banyuwangi
			S.4 Meningkatnya Kualitas Kesehatan	7	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
				8	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi
				9	Tingkat Kesehatan Rumah Sakit
		T.3. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya	S.5 Tercukupinya Ketersediaan Pangan	10	Persentase Ketersediaan Pangan
				11	Indeks Rasa Aman

No					VISI: Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia				
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN			
				S.6 Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	12	Persentase Resiko Besok Bencana pada KRB			
				S.7 Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Masyarakat	13	Persentase Angka PMKS			
				S.8 Meningkatnya Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Akan Keragaman Budaya	14	Indeks Gotong Royong			
2	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Sumberdaya Alam Dan Kearifan Lokal;	T.4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif		S.9 Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	15	Indeks Gini			
				S.10 Menurunnya Tingkat Pengangguran	16	Tingkat Pengangguran Terbuka			
				S.11 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	17	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Olahan Dalam PDRB			
					18	Persentase Usaha Kecil Menengah Terhadap UMKM			
					19	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam PDRB			

	MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN
3	Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Dan Sosial	T.5. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas	S.12 Meningkatkan Investasi PMA Dan PMDN	20	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Dalam PDRB
		S.13 Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat	21	Persentase Koperasi Berkualitas	
		S.14 S.14.T.5 Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas	22	Realisasi Investasi PMA Dan PMDN	
			23	Spending Of Money	
			24	Persentase panjang jalan kondisi baik dengan kecepatan > 20 KM	
			25	Indeks angka kecelakaan lalu lintas	
			26	Persentase ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)	
			27	Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis	
			28	Peningkatan Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik	
			29	Persentase masyarakat miskin yang terlayani sanitasi dasar	
	30	Persentase Kecukupan Luasan RTH Publik			

No						VISI: Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia					
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN					
		T.7.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	S.16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	31	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
4	Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	T.8.	Meningkatkan Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengarustamaan Gender Serta Perlindungan Anak	S.17	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	32	Indeks Desa Membangun (IDM)				
						33	Jumlah Atlit berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional				
						34	Jumlah pemuda terampil				
				S.18	Terwujudnya Pemberdayaan Responsif Gender	35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
				S.19	Meningkatnya Perlindungan Terhadap perempuan dan Anak)	36	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking				
5	Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (<i>Good And Clean Governance</i>) Serta Layanan Publik Yang	T.9.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	S.20	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dan Kualitas Layanan Publik	37	Nilai Akntabilitas Kinerja				
						38	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
						39	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan				
						40	Persentase Kebijakan Berdasarkan Policy Brief				
						41	Opini WTP BPK terhadap LKPD				

MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi			S.21 Meningkatnya Kinerja Laporan Keuangan Dan Kinerja Birokrasi	42	Indeks Reformasi Birokrasi
			S.22 Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	43	Persentase Cakupan Jangkauan TIK
				44	Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Mengimplementasikan IT Baik

BAB VI

STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Banyuwangi. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya

menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administratif perijinan, dokumen/akta, kartu identitas; serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktifitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.



Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang

selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini:

INTERNAL		Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
INTERNAL		<ol style="list-style-type: none"> Adanya peningkatan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah Meningkatnya kualitas perumahan yang terjangkau air bersih, sanitasi, layak huni dan tidak kumuh Perlunya penguatan penataan ruang eksisting Kabupaten Banyuwangi Meningkatnya peran perempuan dalam organisasi dan pembangunan Meningkatnya penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Banyuwangi telah memiliki sistem informasi daerah yang cukup baik dalam pelaksanaan pemerintahan Pola kepemimpinan yang visioner Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun membaik 	<ol style="list-style-type: none"> Belum tercapainya akses pendidikan wajib belajar 12 tahun Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi Kurang optimalnya layanan pendidikan inklusif Belum optimalnya layanan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar Belum optimalnya ketersediaan dan mutu sediaan farmasi, pembekalan dan alat kesehatan Masih rendahnya akses dan kualitas lingkungan sehat Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan di rumah sakit Terlambatnya akses pelayanan social dasar bagi PMKS Belum optimalnya kualitas dan daya saing sector UMKM Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Belum efektif dan efisienya bisnis proses birokrasi pelayanan public Rendahnya kemampuan dan kapasitas pelaku usaha Belum terlihatnya peran koperasi sebagai pelaku sector ril Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru yang berkualitas Belum optimalnya pemasaran produksi pertanian Belum efektif dan efisienya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktifitas Belum intensifnya pariwisata berbasis IT Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM local pariwisata Rendahnya kualitas fasilitas public Rendahnya kuantitas fasilitas public Rendahnya panjang trotoar Kabupaten Banyuwangi Belum optimalnya kualitas infrastruktur perhubungan Belum optimalnya kualitas sarana lalulintas Banyaknya kasus pengaduan masyarakat Masih rendahnya cakupan fasilitas teknologi, informasi dan komunikasi Belum optimalnya ketersediaan sanitasi dan air bersih Masih rendahnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana social Masih rendahnya kesiagaan bahaya kebakaran Belum tercapainya RTH Publik 20% dari total 30% RTH Wilayah Rendahnya kualitas infrastruktur perdesaan Belum terbangunnya optimalisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan Masih rendahnya keberpihakan pembangunan terhadap anak Lemahnya koordinasi lintas sector aparatur Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah Terbatasnya kapasitas pemerintahan pemerintah desa Belum optimalnya pelayanan public
		Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
EKSTERNAL		<ol style="list-style-type: none"> Momentum penurunan tingkat pengangguran terbuka Besarnya afirmasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi Banyaknya program prioritas pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah-daerah potensial yang berorientasi pada hasil Banyaknya kunjungan Pemda lain untuk studi banding terkait tatakelola pemerintahan Kekayaan dan potensi Wisata yang beragam 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal Besarnya tekanan dan tuntutan untuk mengakomodir pemberlakuan ASEAN Community Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas Belum terciptanya kondisifitas dan dominasi afirmasi terhadap Usaha Kecil Menengah Konsistensi peningkatan investasi belum mampu menjawab tingginya permintaan Masih relatif tingginya gini rasio Belum meratanya sebaran penduduk Kabupaten Banyuwangi Perlunya perluasan jaringan kemiteraan pariwisata Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan Masih relatif tingginya pembangunan tidak ber-IMB Belum kuatnya karakter dan pondasi perekonomian perdesaan Meningkatnya pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam Besarnya tuntutan UU No 5 Tahun 2014 tentang Desa Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Gambar 6.1: Identifikasi faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Banyuwangi. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang “membumi” dan benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi

yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut:

Strategi S-O	Strategi W-O
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui <i>Institusionalisasi Inovasi</i> dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan; • Penciptaan <i>Inklusivitas</i> pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata; 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah; • Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (<i>partnership</i>) pembiayaan pembangunan;
Strategi S-T	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun <i>early warning system</i> pengendalian yang berorientasi pada hasil; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada <i>pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment</i> melalui penguatan interkoneksi spasial; • Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah;

Gambar 6.2: Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi S-O ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategi*). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Kekuatan dominan yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi adalah kepemimpinan visioner dan birokrasi yang solid yang menjadi kekuatan untuk melakukan inovasi dalam pembangunan serta pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah dalam segala aktivitas pemerintahan untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Sementara peluang paling besar yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi adalah kekayaan dan potensi wisata daerah yang sangat beragam, sebagai lokomotif perekonomian daerah. Sektor pariwisata

dalam perekonomian Banyuwangi hanya mempunyai kontribusi rata-rata 29,4 %, namun mampu tumbuh hingga 2 digit atau diatas 11 %. Sedangkan sektor pertanian yang mempunyai kontribusi paling besar dalam perekonomian daerah (44,9%) hanya tumbuh rata-rata kurang dari 5%.

Oleh sebab itu strategi yang di tetapkan adalah **mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan;** dan **Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi berbasis pariwisata.** *Institusionalisasi Inovasi* diarahkan pada seluruh pelaku pembangunan untuk melakukan inovasi, baik pemerintah, swasta dan masyarakat guna mengangkat nama Banyuwangi dalam konstelasi regional Jawa Timur, Nasional dan bahkan Internasional.

Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat *Reformasi Birokrasi* merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkan hasil-hasil (*outcome*) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang *inklusif*, dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor pariwisata. Pariwisata didesain menjadi "*Umbrella*" Investasi pemerintah dan swasta di Banyuwangi, peningkatan surplus perdagangan daerah, serta pembangunan infrastruktur merupakan pilar meningkatkan makro ekonomi Banyuwangi. Namun demikian, upaya ini dapat melebarkan kesenjangan kepada masyarakat menengah kebawah yang mengandalkan unit usaha ditingkat mikro, kecil dan menengah yang notabene masyarakat sebagai pelaku ekonomi sesungguhnya. Oleh karenanya perlu afirmasi yang seimbang kepada seluruh pelaku ekonomi. UMKM didesain sebagai sabuk pengaman perekonomian arus bawah, untuk menjadi pilar pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Menciptakan *integrated farming* dalam wadah ekonomi kreatif, yang mampu mengintegrasikan pertanian-pariwisata- UMKM. Termasuk didalamnya pengembangan wirausaha baru, standarisasi,



sertifikasi, pengendalian, pengawasan produk dan peningkatan akses permodalan, merupakan bentuk nyata dari strategi ini.

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Berdasarkan identifikasi faktor diatas, Kabupaten Banyuwangi masih memiliki banyak tantangan/ancaman pembangunan. Sementara kekuatan utamanya hanya terletak pada komitmen pelaksanaan sistem pemerintahan yang inovatif. Pada Kondisi dibutuhkan strategi yang mampu merespon kebutuhan pembangunan secara cepat dan tepat, yang berorientasi pada kinerja hasil pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga strategi yang dibutuhkan adalah **Melakukan akselerasi**

pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun *early warning system* pengendalian yang berorientasi pada hasil. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh 2 hal yaitu perencanaan yang akurat dan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat sebagaimana perencanaan yang telah disusun. Data dan informasi yang valid merupakan basis penyusunan rencana pembangunan yang akurat, serta menjadi *early warning* untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pembangunan daerah yang sedang dijalankan senantiasa tepat sebagaimana perencanaan yang telah disusun.

Kompleksitas penyelenggaraan sistem pemerintahan saat ini, dapat desederhanakan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. TI merupakan instrument penting dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pengendalian dan pengawasan harus mampu menyediakan informasi yang *real-time* (cepat, akurat dan bisa diakses kapanpun dibutuhkan) yang



Lapangan Atletik Kawasan GOR Tawangalun

mampu memberikan gambaran hasil dan dampak pembangunan secara nyata.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divestment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Banyuwangi bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing. Sehingga strategi yang dibutuhkan adalah **Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah;** dan **Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) pembiayaan pembangunan.**

Membangun generasi yang handal ini sejalan dengan concern Presiden dalam RPJMN dengan serius menaruh perhatian kepada anak. Di Banyuwangi bentuk nyata dukungan terhadap masalah tersebut adalah dengan membentuk *Banyuwangi Children Centre*, yang bekerja merespon laporan kekerasan kepada anak dengan cepat dan tanggap. Termasuk juga dengan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat mulai dari sebelum lahir hingga lanjut usia (*Continuum of Care Across Life Cycle*), dengan konsep Banyuwangi Emas. Sementara untuk

percepatan pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas antar wilayah (pusat-hinterland) dan penurunan kesenjangan (*disparitas*), serta infrastruktur strategis penunjang perekonomian. Mengingat coverage wilayah Banyuwangi yang cukup luas, penetapan prioritas dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi penting.

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Strategi yang ditetapkan dalam kondisi ini diantaranya **Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah;** dan **Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada *pro-job, pro-growth, pro-equity, pro-environment* melalui penguatan interkoneksi spasial.**

Melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) dan pengarusutamaan budaya dengan membentuk kelompok-kelompok penggerak sosial berbasis pemberdayaan yang mampu mempertahankan nilai lokalitas. Yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial, pencegahan pelanggaran hukum dan

menjaga kondusifitas pembangunan. Sedangkan pembangunan yang *pro-job, pro-growth, pro-equity* adalah orientasi pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya sekedar tumbuh, namun pertumbuhannya yang memperhatikan kapasitas partisipasi masyarakat dalam membangun, keadilan antara daerah kota dan daerah terpencil, antara yang miskin dan yang kaya. Serta pembangunan yang berorientasi pada lingkungan (*pro-environment*), agar kelestarian tetap terjaga dan kapasitas daya dukung dan daya tampung pembangunan masih dapat dinikmati anak cucu masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Sejalan dengan semangat membangun dari pinggiran, dan implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Banyuwangi membangun konsep SMART KAMPUNG, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan *Smart People, Smart Economic* dan *Smart Environment*. Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan. Sebab unit terkecil orientasi pembangunan adalah desa, maka ketika desa telah terbangun dengan baik, sejatinya pembangunan daerah telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut (Strategi dianalogikan dengan "St"):

- St.1. Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan;
- St.2. Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi



- Informasi dan membangun *early warning system* pengendalian yang berorientasi pada hasil;
- St.3. Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah;
- St.4. Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah;
- St.5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (partnership) pembiayaan pembangunan;

St.6. Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata;

St.7. Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada *pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment* melalui penguatan interkoneksi spasial.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai.

Melalui setrategi **(St.1) Mengembangkan sistem Pemerintahan yang integratif melalui *Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam Proses Bisnis di semua level Pemerintahan*; dan Strategi (St.2) Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun *early warning system pengendalian yang berorientasi pada hasil*;** diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

- a. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik;
 - 1) Nilai/Predikat AKIP;
 - 2) Indeks Profesionalitas Aparatur;
 - 3) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - 4) Persentase *policy brief* yang dimanfaatkan Bupati dalam merumuskan kebijakan;

b. Meningkatnya Kinerja Laporan Keuangan dan Kinerja Birokrasi;

- 1) Opini BPK terhadap LKPD;
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi.

c. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah;

- 1) Persentase implementasi sistem informasi dalam pelayanan publik;
- 2) Persentase pemerintah desa yang menggunakan IT dalam pemberian layanan.

Melalui setrategi **(St.3) Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah; dan Strategi (St.4) Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah;** diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

- a. Meningkatnya akses pelayanan bidang Pendidikan;
 - 1) Indeks Pendidikan;
 - 2) Angka Melanjutkan Perguruan Tinggi.
- b. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan;
 - 1) Rasio Lembaga Pendidikan Terakreditasi A;
 - 2) Jumlah Atlet Berprestasi.
- c. Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan;
 - 1) Persentase Cakupan Pelayanan Masyarakat;
 - 2) Indeks Kesehatan Keluarga Banyuwangi.
- d. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan;
 - 1) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup;

- 2) Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi;
 - 3) Tingkat kesehatan Rumah Sakit.
- e. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat;
- 1) Persentase Angka PMKS;
 - 2) Persentase Penurunan Pelanggaran Perda.
- f. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya.
- 1) Indeks Gotong Royong;
 - 2) Indeks Toleransi.

Melalui strategi **(St.5) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (partnership) pembiayaan pembangunan;** diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

- a. Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas;
 - 1) Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian;
 - 2) Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan;
 - 3) Persentase Cakupan Wilayah Teraliri Air Bersih;
 - 4) Persentase Irigasi Untuk Pertanian Rakyat yang Teraliri;
 - 5) Persentase Kondisi Jalan Baik;
 - 6) Persentase Cakupan Layanan TIK;
 - 7) Persentase;
 - 8) Tertib Tata Ruang.
- b. Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas;
 - 1) Persentase cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana;
 - 2) Persentase Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman;
 - 3) Persentase kecukupan luasan RTH Publik.

Melalui strategi **(St.6) Penciptaan Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata;** diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

- a. Menurunnya kesenjangan antar wilayah;
 - 1) Gini Rasio.
- b. Menurunnya tingkat pengangguran;
 - 1) Tingkat pengangguran terbuka (TPT).
- c. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN;
 - 1) Realisasi Investasi PMA dan PMDN.
- d. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
 - 1) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB;
 - 2) Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB;
 - 3) Persentase Pertumbuhan sektor Pertanian dalam PDRB;
 - 4) Persentase UKM terhadap UMKM yang mengalami peningkatan skala usaha;
 - 5) Persentase koperasi Berkualitas.
- e. Menurunnya kemiskinan;
 - 1) Tingkat Kemiskinan.
- f. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat;
 - 1) *Spending of Money*.

Melalui strategi **(St.7) Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment melalui penguatan interkoneksi spasial;** diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini:

- a. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat desa;
 - 1) Indeks Desa Membangun.
- b. Terwujudnya pemberdayaan responsif Gender;
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender.

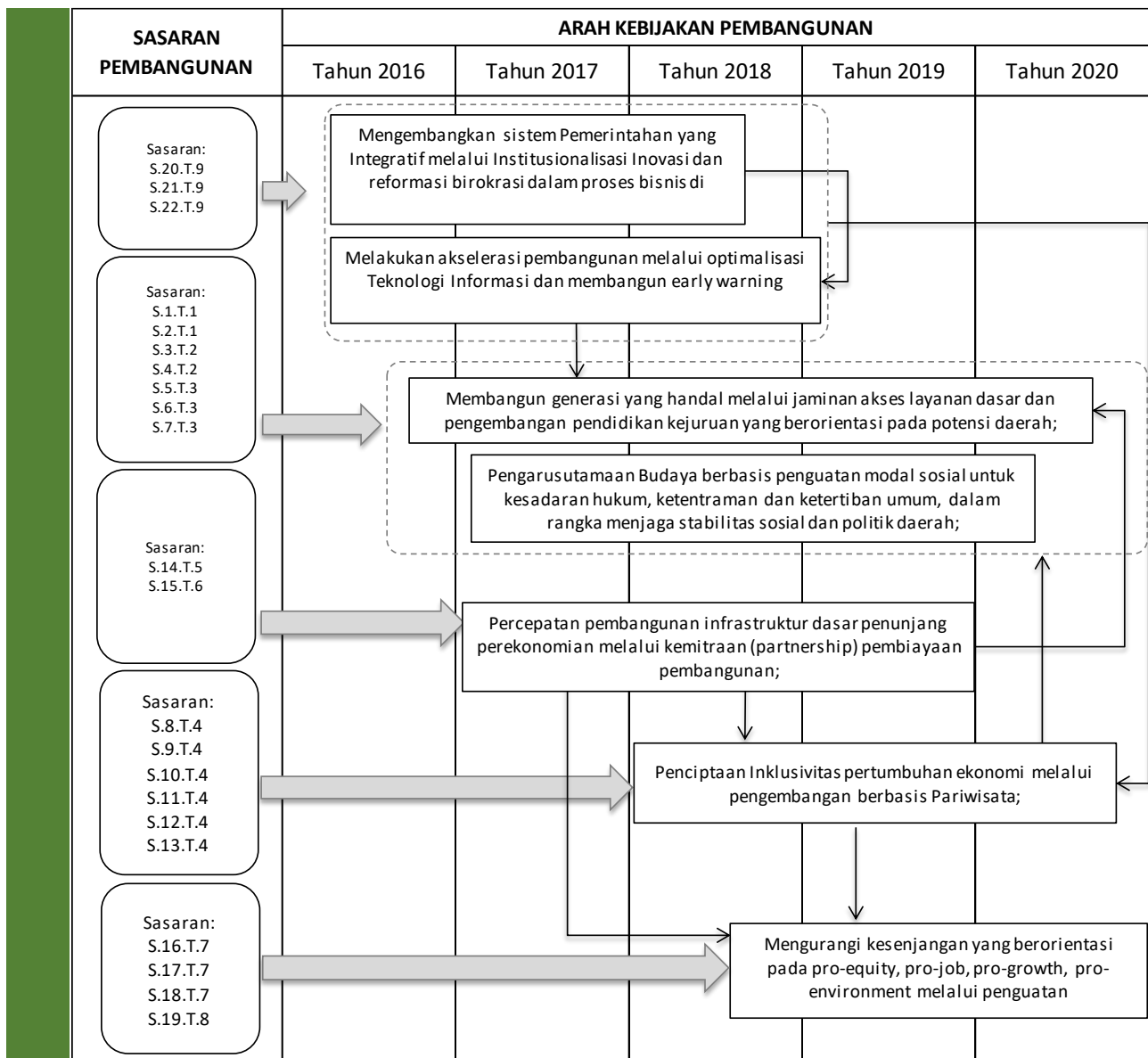
- c. Meningkatnya perlindungan terhadap anak;
 - 1) Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Anak.
- d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan;
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

6.2 Arah Kebijakan

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi,

yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Gambar berikut ini adalah strategi pelaksanaan arah kebijakan:





Gambar 6.3: Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan

Sumber: diolah dari rumusan strategi pembangunan daerah

Dari gambar di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.1: Tema Pembangunan Pertahun Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2016-2020

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	
	Prioritas Karena Wajib dengan Sendirinya	Prioritas Pendukung Strategi Pembangunan
Tahun 2016: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA Akhir 2015	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Pemantapan Pencapaian 100 Hari Janji Kepala Daerah
		Reformasi Manajemen Pembangunan Berbasis Hasil
		Profesionalitas Aparatur Dan Perilaku Birokrasi
		Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi Terintegratif Yang Berorientasi Hasil
		Mendesain Perencanaan Dan Penganggaran Yang Berorientasi Pada Program Prioritas
		Meredefinisikan Organisasi Perangkat Daerah Yang Berorientasi Pada Efektifitas Pencapaian Visi-Misi Bupati
Tahun 2017 Peningkatan Sarana-Prasaran Layanan Dasar Dan Infrastruktur Perekonomian Berskala Perdesaan Yang Berorientasi Pada Potensi Unggulan Lokal;	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Melengkapi Sarana Prasarana Aparatur Dan Sistem Pendukung Layanan Dasar Pemerintahan Hingga Ke Desa
		Mempercepatan Agenda Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Mempunyai Daya Ungkit Perekonomian
		Infrastruktur Aksesibilitas Antar Kawasan Perdesaan Dan Pertanian
		Infrastruktur Besar Berbasis Kawasan Dan Pusat Pertumbuhan Baru
		Infrastruktur Sistem Informasi Sosial Dalam Penguatan City Branding Banyuwangi
		Perencanaan Akses Destinasi Pariwisata Unggulan
Tahun 2018 Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Pertanian Dan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha Dan Ekonomi Kreatif	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Mempercepat Kemudahan Investasi Pembangunan Yang Berorientasi Pada Pertanian Dan Pariwisata
		Menjalankan Sistem Inovasi Daerah Untuk Produk Unggulan Hingga Wilayah Perdesaan
		Penguatan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta
		Pemberdayaan Kelompok Usaha Dan Pelaku Ekonomi Kreatif

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	
	Prioritas Karena Wajib dengan Sendirinya	Prioritas Pendukung Strategi Pembangunan
		Pengembangan Dan Penguatan Pasar Untuk Produk Pertanian Yang Integratif Dengan Pariwisata
Tahun 2019 Pemantaban Kontribusi Sektor Pertanian Dan Pariwisata Terhadap Perekonomian Regional Dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Penguatan Produktivitas Pertanian Dan Produk Olahan Turunan
		Pengembangan Dan Pemasaran Produk Unggulan Kabupaten
		Pengembangan Pelaku Usaha Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Mempermudah Akses Modal
		Membangun Keterpaduan Antar Wilayah Untuk Pengembangan Pariwisata Dan Pertanian
Tahun 2020 Kemandirian Ekonomi Diseluruh Wilayah Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	Memantapkan Sistem Terintegratif Perekonomian Berbasis Pertanian Dan Pariwisata
		Membangun Alternatif Industri Hasil Pertanian Dan Pariwisata
		Membangun Keberlanjutan Pengendalian Pembangunan Unggulan
		Memperluas Pasar Dan Produk Olahan Hasil Pertanian,
		Manjamin Sistem Pasar Yang Berorientasi Pada Masyarakat Kelas Bawah





PKL Ikan Bakar Watudodol

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



7.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga

pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Hubungan antara kebijakan umum dan empat perspektif diatas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Strategi 1

No.	Perspektif	Strategi 1: Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat		
2	Perspektif Proses Internal	Membangun standarisasi kualitas layanan dan menjamin peningkatan kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan 3. Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis 4. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Sarpras Wilayah dan Lingkungan Hidup 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8. Program Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan 9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 10. Program Pengamanan Informasi Daerah
3	Perspektif Kelembagaan	Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi dan penegakan peraturan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah 3. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 4. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

4	Perspektif Keuangan	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
---	---------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi 2

No.	Perspektif	Strategi 2: Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun early warning system pengendalian yang berorientasi pada hasil	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan berorientasi pada hasil	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika
2	Perspektif proses Internal	Mengembangkan sistem monitoring berbasis IT terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa 2. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah
3	Perspektif Kelembagaan	Fasilitasi dan Pendampingan Aparatur Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan dan pembangunan	1. Program Tatakelola Pengembangan e-Government
4	Perspektif Keuangan		

Strategi 3

No.	Perspektif	Strategi 3: Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Jaminan akan akses dan kualitas Pendidikan bagi seluruh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Akses PAUD 2. Program Peningkatan Akses Pendidikan SD 3. Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat 4. Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP

No.	Perspektif	Strategi 3: Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
		Jaminan akan akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat	5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Promosi Kesehatan 3. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Berbasis Masyarakat 4. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 8. Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 9. Program Pembiayaan Kesehatan
2	Perspektif proses Internal	Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan pendidikan (KAD & PPP)	1. Program Peningkatan Mutu PAUD 2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD 3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP 4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat
		Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan kesehatan (KAD & PPP)	1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas 2. Program Sumberdaya Kesehatan 3. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan		

Strategi 4

No.	Perspektif	Strategi 4: Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh-tokoh agama	1. Program pengembangan wawasan kebangsaan
2	Perspektif proses Internal	Penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial	1. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan sosial dan kesiapsiagaan bencana	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4	Perspektif Keuangan		

Strategi 5

No.	Perspektif	Strategi 5: Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (<i>partnership</i>) pembiayaan pembangunan	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan	1. Program Pembangunan Jalan 2. Program Pembangunan Jembatan 3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 5. Program Pengembangan Transportasi Laut, Transportasi Udara dan Perkeretaapian 6. Program Pengelolaan LPJU 7. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

No.	Perspektif	Strategi 5: Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (<i>partnership</i>) pembiayaan pembangunan	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
		Memprioritaskan pembangunan infrastruktur sosial untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	Perspektif Proses Internal		
3	Perspektif Kelembagaan	Menegakkan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2. Program Pembangunan Fasilitas Publik 3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik 4. Program Perencanaan Tata Ruang 5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4	Perspektif Keuangan		

Strategi 6

No.	Perspektif	Strategi 6: Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil 2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 5. Program Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi 6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 7. Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri 8. Program Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri

No.	Perspektif	Strategi 6: Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
			9. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro 10. Program Penumbuhan Wirausaha Baru 11. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 12. Program Peningkatan Produksi Ternak 13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 14. Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan 15. Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura 16. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) 17. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 18. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2	Perspektif Proses Internal	Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi pariwisata dan pertanian	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi dan Jaringan Kemitraan Pariwisata 3. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
3	Perspektif Kelembagaan	Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Program Pengembangan Usaha Koperasi
4	Perspektif Keuangan	Penguatan investasi dalam dan luar negeri, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership.	1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal 3. Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal

Strategi 7

No.	Perspektif	Strategi 7: Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment melalui penguatan interkoneksi spasial	
		Kebijakan Umum	Program Pembangunan
1	Perspektif Masyarakat	Menjamin pemerataan pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Rehabilitasi Hutan/Lahan 3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 4. Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 6. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga 7. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 8. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi 9. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan
2	Perspektif Proses Internal		
3	Perspektif Kelembagaan	Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pemberdayaan 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
4	Perspektif Keuangan		

7.2 Program Prioritas

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan startegis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioirtas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program

prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Permen 13 Tahun 2006, atau kedalam Kebijakan Umum maupun Strategi. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum maupun Strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 7.1 Ilustrasi Trasnformasi Agenda Politik Kepala Daerah

Berdasarkan kepada keterangan yang disebutkan diatas, beserta ilustrasi yang digambarkan diatas, maka dapat dijabarkan pendefinisian program-program prioritas pembangunan daerah melalui janji-janji kampanye Bupati

Terpilih. Adapun keterangan definisi tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 7.2: Definisi Agenda Politik Kepala Daerah kedalam Program Prioritas

MISI	PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	DEFINISI PROGRAM PRIORITAS SESUAI PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2006
MISI 1	Pelayanan Dasar Dini Dengan Pengembangan BANYUWANGI EMAS	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Program Keluarga Berencana
		Program Perencanaan Pembangunan Sarpras Wilayah dan Lingkungan Hidup
	Pendidikan INKLUSIF Berorientasi Pada Pengembangan Jiwa KEWIRAUSAHAAN	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Pengembangan Pendidikan Berbasis MORAL dan nilai-nilai karakter KEBANGSAAN	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Banyuwangi CERDAS	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini
		Program Peningkatan Mutu PAUD
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD
		Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
		Program Peningkatan Akses Pendidikan SD
		Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat
	Jaminanan Kesejahteraan Pendidik Formal & Non-Formal (termasuk Guru Ngaji)	<i>*level kebijakan umum*</i>
	Percepatan Pemenuhan Akses Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar Pendidikan	
	Pengembangan PONDOK Kesehatan DESA	Program Promosi Kesehatan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	Jaminan Akses Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Program Pembiayaan Kesehatan
	Peningkatan Akreditasi Tipe RSUD	<i>*level kebijakan umum*</i>
Peningkatan Kapasitas Layanan PUSKEMAS, Puskemas, PONED dan Taman Posyandu	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	
Peningkatan Jaringan Kerjasama Rumah Sakit dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan	Program Sumberdaya Kesehatan	
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan	
	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	
Percepatan Pemenuhan Akses Sarana-Prasarana Pelayanan Dasar Kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas	
	Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Berbasis Masyarakat	
Pengurangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Penguatan Kapasitas Rehabilitasi dan Pelatihan soft-skill	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan	

MISI	PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	DEFINISI PROGRAM PRIORITAS SESUAI PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2006
		Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
		Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
	Pemberdayaan Organisasi kemasyarakat lokal dalam menjaga stabilitas keamanan dan konflik sosial	<i>*level kebijakan umum*</i>
	Pengembangan Forum Kerjasama Lintas Budaya, Agama dan Adat	
MISI 2	Membangun PUSAT PERTUMBUHAN BARU berorientasi pada sinergitas Kewilayahan	Program pengembangan sentra dan kluster industry
	Pengembangan DIGITAL MARKET PLACE (Banyuwangi Mall) dan Afirmasi terhadap pelaku UMKM Baru (Rumah Kreatif)	Program Pengembangan wilayah dan Penempatan Transmigrasi
		Program Perumusan Kebijakan Ekonomi
	Menguatkan KLINIK UMKM untuk fasilitasi hak merk, sertifikasi halal, izin usaha dan bantuan modal	Program Penumbuhan Wirausaha Baru
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro
		Program perlindungan HKI dan standarisasi industry
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro
	Pengembangan Bussiness Model Competition dengan Banyuwangi Industrial Young Entrepreneur Competition (BIYEC)	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Mengembangkan INTEGRATED MARKETING SYSTEM untuk Produk UMKM dengan Potensi Pariwisata	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil
	Penguatan City Branding ' I Love Banyuwangi ', ' Sunrise of Java ', dan ' City of Carnival '	Program pengembangan industri kecil dan menengah
	Strategic Marketing Pariwisata dengan pendekatan Destination-Origin-Time (DOT) dan Brand-Advertasing-Selling (BAS)	Program Pengembangan Usaha Koperasi
	Peningkatan Pariwisata Event dan Pariwisata Minat Khusus (Banyuwangi Festival)	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	Pembangunan Terminal Pariwisata Terpadu	Program pengembangan pemasaran pariwisata
Pembangunan Jetty di Pulau Tabuhan dan Grand Watudodol		
Pemenuhan Sarana-Prasarana Dasar Pariwisata yang merangsang long of stay dan spending of money Wisatawan		
Integrated and Partnership Tourism	Program Pengembangan destinasi pariwisata	

MISI	PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	DEFINISI PROGRAM PRIORITAS SESUAI PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2006
	Penguatan Petani dan Nelayan Miskin melalui kebijakan yang afirmatif terhadap Pupuk, Harga dan Pasar	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan produksi produk ternak
	Intensifikasi Bibit Unggulan Pertanian : Tanaman Pangan, Hortikultura, Ternak, Perikanan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian tanaman pangan
	Pengembangan Produk Pertanian Organic	Program peningkatan produksi, kualitas produk perkebunan dan hortikultura
	Menjaga Kemandirian Pangan dengan Swasembada Komoditas Pangan	Program peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT)
	Pengembangan INTEGRATED FARMING SYSTEM berbasis Kewilayahan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	Pengembangan Agroindustri berbasis kerakyatan dan keterpaduan antar wilayah	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal
	Peningkatan Investasi PMDN & PMA serta penguatan Partnership System	
MISI 3	Penyelesaian Terminal Green Bandara Blimbingsari	Program pengembangan transportasi laut, transportasi udara dan perkeretaapian
	Pembangunan Terminal Terpadu dengan Pasar Produk Unggulan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Pembangunan Infrastruktur Utama ke pusat-pusat Destinasi Pariwisata	Program pembangunan jalan Program Pembangunan jembatan
	Penyebarluasan Cakupan Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa
	Pemenuhan Perumahan/Pemukiman Rakyat	Program lingkungan perumahan dan pemukiman sehat
	Mengurangi Disparitas Infrastruktur Kawasan Perdesaan	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
	Penanganan Alih Fungsi Lahan	<i>*level kebijakan umum*</i>
	Pembangunan Infrastruktur Dasar Pendukung Pertanian: Bendungan, Embung, Long Storage, Irigasi,	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan, pengelolaan, & konservasi sungai, danau & sumber daya air lainnya
	Peningkatan Fasilitas-Fasilitas Umum di ruas-ruas utama Ruang Publik	Program pembangunan fasilitas publik
		Program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas public
		Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong
Program Perencanaan Tata Ruang		
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan LPJU	

MISI	PROGRAM STRATEGIS KEPALA DAERAH	DEFINISI PROGRAM PRIORITAS SESUAI PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2006
MISI 4	Pengembangan Konsep SMART KAMPUNG	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
	Pengembangan KAWASAN PERDESAAN potensial berbasis Local Wisdom	Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
	Peningkatan Kapasitas kelompok dan komunitas Masyarakat	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pemberdayaan
	Kekerasan Rumah Tangga dan Perlindungan Anak	Program perlindungan perempuan dan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
	Menyelenggarakan event-event Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
	Gerakan MERDEKA dari SAMPAH	
	Pengembangan Sistem Pengelolaan BANK SAMPAH yang menghasilkan nilai tambah bagi Masyarakat	Program Pengelolaan Persampahan
	Revitalisasi dan Rehabilitasi Lahan dan Lingkungan KRITIS	Program rehabilitasi hutan dan lahan Program Penurunan Pencemar Air
	Sedekah Oksigen (Penanaman 1 Milyar Pohon)	Program Penurunan Beban Pencemar Udara Ambien
MISI 5	Pengembangan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dengan pendekatan RESULT-BASED Information System	Program Fasilitasi Pengadaan Barang Dan Jasa Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi
	Pengembangan Manajemen Pemerintahan berbasis IT: E-Planning, E-Budgeting, E-Monev	Program Pengembangan dan Penyebaran informasi pemerintah daerah
	Mengembangkan Tunjangan Kinerja berbasis Hasil	Program Tata Kelola Pengembangan E-Government
	Pengembangan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Membangun Budaya Kerja dan Birokrasi yang Inovatif	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengamanan Informasi Daerah Program Pengembangan Statistik Sektoral Daerah Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi dan Pendampingan Pemerintah Desa (E-Village Budgeting)	
	Menjamin Kepuasan Masyarakat dalam setiap Layanan Pemerintah Daerah	Program pelayanan publik Program Penataan Administrasi Kependudukan
	Peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur dengan Manajemen ASN berbasis Merit Sistem	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Harmonisasi Regulasi Daerah	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel 7.3: Indikator Program Pembangunan Daerah

Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja
Strategi 1	Kebijakan Umum P1		
	Kebijakan Umum P2	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, efektif dan efisien
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP
		Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis	Cakupan Arsip Statis dan Dinamis yang dikelola
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menggunakan IT dalam Pelayanan
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Desa
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas dalam Dokumen Perencanaan
		Program Perencanaan Pembangunan Sarpras Wilayah dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan SDA dan LH yang dimanfaatkan sebagai policy brief
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan sebagai policy brief
		Program Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan kesra dan pemerintahan yang dimanfaatkasebagai policy brief
		Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Persentase data informasi dan statistic daerah yang tersusun dengan baik
	Program Pengamanan Informasi Daerah	Persentase Pengamanan Informasi Daerah	
	Kebijakan Umum P3	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peringkat LPPD
		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang nilai AKIPnya Baik/B hasil evaluasi Inpektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi
		Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Peningkatan Aset Tanah Pemkab bersertifikat
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi	

Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja
	Kebijakan Umum P4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat dalam Pencairan SP2D
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Bantuan Tugas Belajar dan Iktanan Dinas
			Persentase Peningkatan SDM Aparatur Melalui Pelaksanaan Diklat
Strategi 2	Kebijakan Umum P1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase aplikasi IT yang mendukung City Branding dan layanan public yang berfungsi baik
	Kebijakan Umum P2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Persentase komunikasi, informasi dan media massa yang dikembangkan
		Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan
	Kebijakan Umum P3	Program Tatakelola Pengembangan e-Government	Persentase Penyelenggaraan E-Government
	Kebijakan Umum P4		
Strategi 3	Kebijakan Umum P1	Program Peningkatan Akses PAUD	APK PAUD Formal
			Rasio Ketersediaan Lembaga terhadap anak usia PAUD
			Persentase kecukupan mebel
			Persentase Lembaga PAUD Formal memiliki Perpustakaan
			Persentase Lembaga PAUD formal memiliki Kamar Mandi
	Program Peningkatan Akses Pendidikan SD	APK /SD/MI, Paket /A	
APM SD/MI, Paket /A			

Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja
			APK /SD/MI, Paket /A
			APM SD/MI, Paket /A
			Rasio Ketersediaan ruang kelas terhadap anak usia SD
			Persentase kecukupan meubeler
			Persentase SD memiliki Perpustakaan
			Persentase SD memiliki Kamar Mandi
			Persentase SD memiliki APE
		Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	Jumlah Lembaga Non Formal yang Berizin
		Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP	APK SMP,MTs, Paket B
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan
		Program Keluarga Berencana	Kesertaan Ber KB
		Program Promosi Kesehatan	Persentase Program Prioritas yang disosialisasikan melalui media
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Berbasis Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri
			Persentase Posyandu PURI (Purnama Mandiri) yang Menjadi Taman Posyandu
			Persentase Pengembangan UKBM PURI (Purnama Mandiri)
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan	Contact Rate (Angka Kunjungan Baru)
			Persentase Pelayanan Rujukan
			Persentase Parameter Pemeriksaan Laboratorium
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevelensi Gizi Buruk
			Persentase bayi usia kurang 6 bulan mendapat ASI Eksklusif
			Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Tambah darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Kehamilan

Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja
		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Prosentase sekolah dasar tidak ditemukan jajanan mengandung bahan berbahaya
			Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) Bersertifikat
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
			Persentase desa ODF
			Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi syarat
		Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Angka Kejadian Kasus Penyakit menular (Angka Kesakitan per 1.000 Penduduk)
			Persentase Desa UCI
			Penanggulanagn KLB < 24
			Persentase Penyakit Tidak Menular
		Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Oleh Puskesmas
	Persentase Pembiayaan Kesehatan		
	Kebijakan Umum P2	Program Peningkatan Mutu PAUD	Persentase Lembaga PAUD Formal memiliki APE
			Persentase Lembaga PAUD Formal terakreditasi
			Persentase ruang kelas kondidi baik
Persentase perpustakaan kondisi baik			
Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD		Persentase kamar mandi kondisi baik	
		Persentase SD yang terakreditasi	
		Persentase ruang kelas kondidi baik	
		Persentase perpustakaan kondisi baik	
		Persentase kamar mandi kondisi baik	

Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Persentase SMP berakreditasi A
			Persentase SMP yang terakreditasi
			Persentase ruang kelas kondisi baik
			Persentase perpustakaan kondisi baik
			Persentase kamar mandi kondisi baik
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat
			Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang Berakreditasi
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))
			Cakupan persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
			Persentase KB Aktif
		Program Sumberdaya Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan, Baik Obat Esensi Maupun Generik
			Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan Dasar Sesuai Standar
			Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi Sesuai Standar
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Bangunan Puskesmas Sesuai Standar
			Persentase Bangunan Puskesmas Pembantu dalam Kondisi Baik
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Bernilai Minimal Cukup dalam Penilaian Kinerja Puskesmas
			Persentase Fasilitas Kesehatan Swasta Terakreditasi Prosentase Fasilitas Kesehatan swasta yang dibina
		Kebijakan Umum P3	

Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja
	Kebijakan Umum P4		
Strategi 4	Kebijakan Umum P1	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Jejaring Sosial
	Kebijakan Umum P2	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran perda yang tertangani
	Kebijakan Umum P3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Nilai PPH Ketersediaan
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Prosentase tingkat waktu tanggap (response rate time) penanggulangan bahaya kebakaran
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Angka PMKS
Kebijakan Umum P4			
Strategi 5	Kebijakan Umum P1	Program Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun dalam Kondisi Baik
		Program Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun dalam Kondisi Baik
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang direhabilitasi dalam Kondisi Baik
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase keselamatan transportasi darat
		Program Pengembangan Transportasi Laut , Transportasi Udara dan Perkeretaapian	Persentase peningkatan aksesibilitas transportasi Laut
			Persentase peningkatan aksesibilitas transportasi Udara
			Peningkatan Aksesibilitas transportasi darat
Program Pengelolaan LPJU	Prosentase panjang jalan terlayani LPJU		
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air		

Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja
	Kebijakan Umum P2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Sumber air/ mata air yang dalam kondisi baik/ kondisi debit air stabil.
		Program lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Jumlah Layak Rumah Huni
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase RTH Publik
	Kebijakan Umum P3	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Panjang Jalan Perdesaan yang Dibangun dalam Kondisi Baik
			Persentase penduduk perdesaan yang terlayani air bersih
		Program Pembangunan Fasilitas Publik	Jumlah fasilitas publik yang dibangun
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik	Jumlah fasilitas public yang direhab
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase wilayah yang telah menyusun perencanaan tata ruang
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah kelompok dan usaha peternakan yang tumbuh	
	Kebijakan Umum P4		
Strategi 6	Kebijakan Umum P1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil	Rasio Ketimpangan Pendapatan IKM Wilayah Kecamatan (Ketimpangan Versi Bank Dunia)
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro	Rasio Pemerataan Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
		Program Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi	Prosentase penempatan transmigran
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM
		Program Pengembangan Sentra dan Kluster Industri	Persentase cakupan pengembangan sentra industri

Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja
			Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah yang bermitra dalam klaster
		Program Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri	Persentase Peningkatan Sertifikasi Standarisasi dan HKI
		Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Mengalami Perkembangan Usaha
		Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Persentase wirausaha mikro baru yang tumbuh
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging
			Produksi Telur
			Produksi Susu
			Persentase Kelompok yang Memanfaatkan Teknologi Peternakan Tepat Guna
		Program Peningkatan Produksi Ternak	Jumlah kelompok dan usaha peternakan yg tumbuh
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka Kematian Ternak
			Angka Kejadian Penyakit
			Usaha Produk Hewan yang Bersertifikasi PRA/NKV
		Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan
			Jumlah Sertifikasi PProduk Tanaman Pangan
			Persentase Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan yang Dimanfaatkan
		Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan daerah
			Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura unggulan daerah
		Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	Persentase peningkatan produksi tembakau

Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja
		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
	Kebijakan Umum P2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan
		Program Pengembangan Destinasi dan Jaringan Kemitraan Pariwisata	Long of Stay
		Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase budaya lokal yang dikembangkan
	Kebijakan Umum P3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif
			Prosentase Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi
		Program Pengembangan Usaha Koperasi	Prosentase Koperasi Sehat
			Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
	Kebijakan Umum P4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian Pelayanan Penanam Modal Berdasarkan Standar Pelayanan yang ditetapkan
		Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase pertumbuhan kebutuhan data dan informasi penanaman modal
			Persentase peningkatan LKPM
	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	
Strategi 7	Kebijakan Umum P1	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase pengelolaan sampah
		Program Rehabilitasi Hutan/Lahan	Indeks Tutupan Hutan
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Indeks Ketahanan Ekonomi Desa
		Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Indeks Ketahanan Ekologi
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Indeks ketahanan sosial

Strategi	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah Pelatih Yang berprestasi
		Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah atlet Yang berprestasi
		Program Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda Terlatih yang Menjadi Wirausaha Mandiri
		Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan	Persentase Pemuda Terlatih
	Kebijakan Umum P2		
	Kebijakan Umum P3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pemberdayaan	Prosentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Lembaga Pengarustamaan Gender yang Aktif
		Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Penurunan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
	Kebijakan Umum P4:		

Keterangan: *) Program Prioritas (Definisi Program Bombastis Bupati)

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Kebijakan umum diatas memuat beberapa fungsi, diantaranya:

1. Membantu menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. Membantu mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. Membantu mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Suatu program pembangunan daerah, secara teknokratis diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan kebijakan umum pada masing-masing perspektik dan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait. Bagi suatu perspektif yang tidak ada kebijakannya maka program prioritas pada perspektif tersebut tidak perlu dibuat.

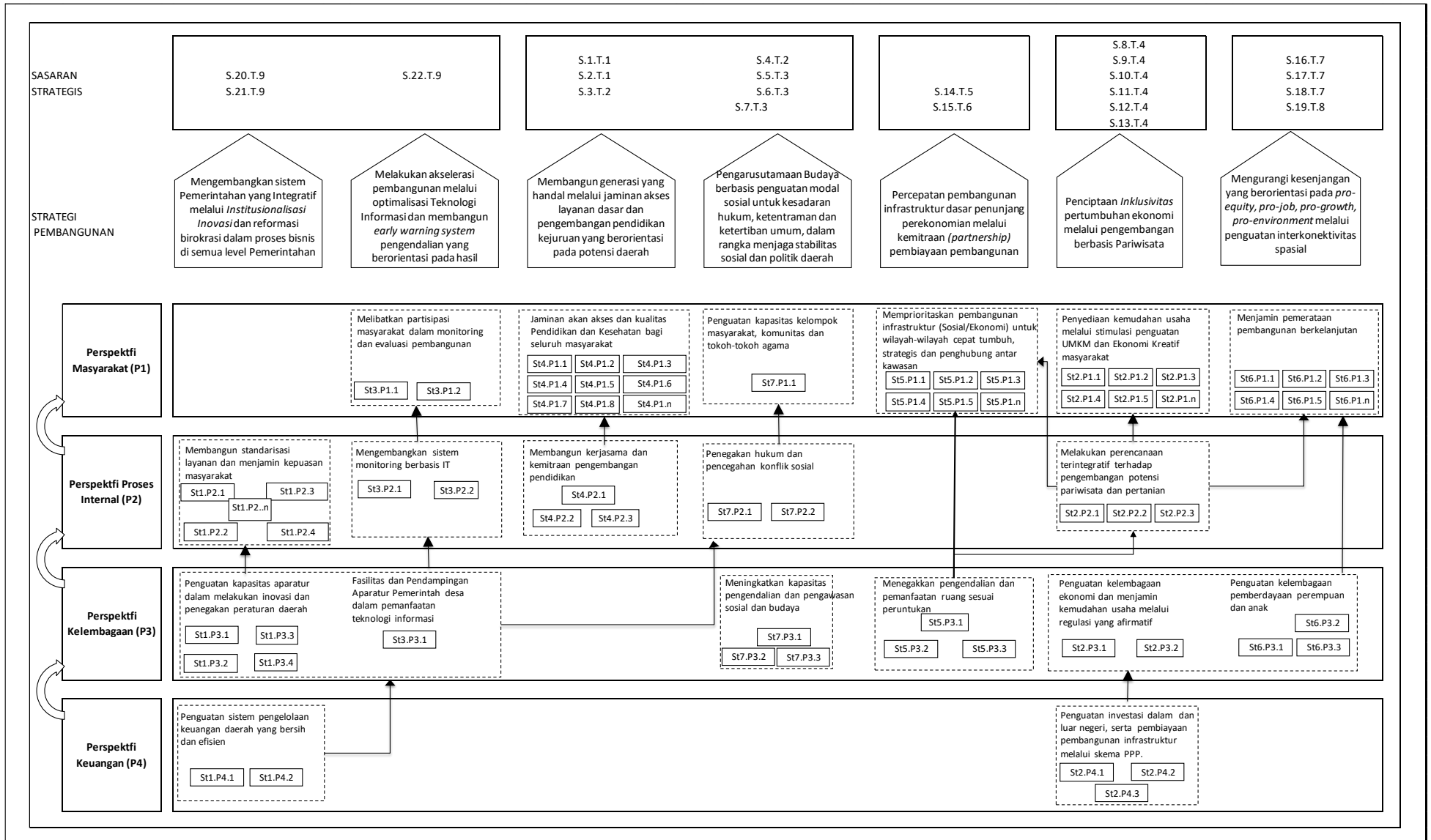
Setiap strategi mengandung berbagai program yang *inherent* dan spesifik untuk mencapai sasaran masing-masing. Penentuan program diupayakan merata ditiap perspektif untuk menjaga kepaduan dan daya ungkit strategi terhadap target indikator kinerja sasaran pokok. Namun demikian, tidak selalu tiap

perspektif terdapat program prioritas, tergantung strategi untuk mencapai sasaran.

Selanjutnya, kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara lagging indikator dan leading indikator. Lagging indikator adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun *leading indicators* adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*).

Penetapan program dalam setiap kebijakan umum disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu program juga harus meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program oleh pelaksana (SKPD). Penetapan program harus mampu berperan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran strategis melalui strategi dan arah kebijakan.

Dalam rangka mempermudah asumsi dan pemahaman terhadap alur berfikir dari masing-masing strategi yang telah di breakdown kedalam kebijakan umum serta program prioritas, maka berikut dipaparkan logical framework masing-masing strategi pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang di rangkum dalam arsitektur-arsitektur pembangunan Kabupaten Banyuwangi periode 2016-2021. Adapun arsitektur yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 7.2: Arsitektur Pemetaan Strategi dalam Kebijakan Umum Kabupaten Banyuwangi





BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya

dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan

(wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau dilerantarkan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala Daerah Terpilih. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan

strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka, sebagai berikut:

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Tabel dibawah merupakan pagu indikatif pada program prioritas I:

Tabel Pagu Indikatif Program Prioritas I

	2017	2018	2019	2020
Prioritas I	785,883,077,627	803,785,419,428	859,146,451,959	915,365,052,399

Sumber: Hasil dan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Program Prioritas I sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Akses PAUD;
2. Program Peningkatan Mutu PAUD;
3. Program Peningkatan Akses Pendidikan SD;
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD;
5. Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP;
6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP;
7. Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat;
8. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat;
9. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan;
10. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
11. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Berbasis Masyarakat;
12. Program Pembiayaan Kesehatan;
13. Program Promosi Kesehatan;
14. Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
15. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
16. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
17. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas;
18. Program Sumberdaya Kesehatan;
19. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
20. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya;
21. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
22. Program Pembangunan Fasilitas Publik;
23. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik;
24. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
25. Program Pembangunan Jalan;
26. Program Pembangunan Jembatan;
27. Program Perencanaan Tata Ruang;
28. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
29. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
30. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
31. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
32. Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat;
33. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
34. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah;
35. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
36. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
37. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
38. Program Perlindungan Perempuan dan Anak;
39. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
40. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pemberdayaan;

41. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
42. Program Pengelolaan Persampahan;
43. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
44. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan;
45. Program Rehabilitasi Hutan/Lahan;
46. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
47. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
48. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
49. Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
50. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
51. Program Keluarga Berencana;
52. Program Pengembangan Transportasi Udara dan Perkeretaapian;
53. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
54. Program Pengelolaan LPJU;
55. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa;
56. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah;
57. Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika;
58. Program Tatakelola Pengembangan e-Government;
59. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
60. Program Pengembangan Usaha Koperasi;
61. Program Penumbuhan Wirausaha Baru;
62. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro;
63. Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro;
64. Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal;
65. Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal;
66. Program Pelayanan Penanaman Modal;
67. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;
68. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan;
69. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
70. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
71. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi;
72. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
73. Program Pengamanan Informasi Daerah;
74. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya;
75. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
76. Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis;
77. Program Pengembangan Perikanan Budidaya;
78. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;



79. Program Pengembangan Destinasi dan Jaringan Kemitraan Pariwisata;
80. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
81. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
82. Program Peningkatan Produksi Ternak;
83. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
84. Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan;
85. Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura;
86. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT);
87. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
88. Program Pengembangan Sentra dan Kluster Industri;
89. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil;
90. Program Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri;
91. Program Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi;
92. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
93. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
94. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
95. Program Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan;
96. Program Perencanaan Pembangunan Sarpras Wilayah dan Lingkungan Hidup;
97. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
98. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
99. Program Penelitian dan Pengembangan;
100. Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan;
101. Program penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
102. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
103. Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa;
104. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah;
105. Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar. Tabel dibawah merupakan pagu indikatif pada program prioritas II:

Tabel Pagu Indikatif Program Prioritas II

	2017	2018	2019	2020
Prioritas II	499,382,596,800	549,728,206,450	581,709,291,253	619,028,391,398

Sumber: Hasil dan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Program Prioritas II sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesehatan Lansia;
2. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan;
3. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Olahraga;
4. Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita;
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Blambangan;
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Genteng;
7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan (RSUD Blambangan);
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan (RSUD Genteng);
9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
10. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya;
11. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;
12. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;
13. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan;
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
15. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
16. Program Pembinaan Jasa Konstruksi;
17. Program Pembangunan Trotoar;
18. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
19. Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Sumber Daya Air;
20. Program Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya;
21. Program Pengendalian Banjir;
22. Program Pemberdayaan Masyarakat;
23. Program Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Lainnya;
24. Program Penataan Lingkungan;
25. Program Penataan Perumahan;
26. Program Pengendalian Kawasan Kumuh;
27. Program Pengembangan Rusun dan PSU;
28. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
29. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Keindahan dan Ketertiban Umum;
30. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Satuan Linmas;

31. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
32. Program Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana;
33. Program Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana;
34. Program Pemulihan Pasca Bencana;
35. Program Peningkatan Kemampuan (Capacity Building);
36. Program Perlindungan Sosial;
37. Program Penanganan Bencana;
38. Program Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pemeliharaan;
39. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
40. Program Perlindungan Tenaga Kerja;
41. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan;
42. Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
43. Program Pendataan dan Informasi Kependudukan;
44. Program Pelayanan Pencatatan Sipil;
45. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
46. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
47. Program Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS;
48. Program Pengendalian Penduduk;
49. Program Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
50. Program Pengembangan Transportasi Laut;
51. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
52. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
53. Program Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
54. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan;
55. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
56. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
57. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
58. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
59. Program Pembinaan Kepramukaan;
60. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
61. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah;
62. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
63. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
64. Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri;
65. Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan;
66. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
67. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
68. Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar;

69. Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan;
70. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan;
71. Program Pemasarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan;
72. Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan;
73. Program Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
74. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat;
75. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
76. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
77. Program Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
78. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
79. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
80. Program Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah;
81. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah;
82. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah;
83. Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
84. Program Intensiifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
85. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
86. Program Pengendalian Sumberdaya Aparatur;
87. Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi;
88. Program Penilaian dan Kapasitas Kinerja Aparatur;
89. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN I;
90. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN II;
91. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
92. Program Kerjasama Pembangunan;
93. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
94. Program Pembentukan Produk Hukum;
95. Program Peningkatan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum;
96. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum;
97. Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan;
98. Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
99. Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah;
100. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
101. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan;
102. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Wakil KDH;
103. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Kesekretariatan Daerah;

- 104. Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah;
- 105. Program Pembinaan dan Penataan Kelembagaan;
- 106. Program Peningkatan Standar Kompetensi dan Disiplin Aparatur;
- 107. Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi;
- 108. Program Pengembangan Ekinerja;

- 109. Program Pembinaan dan Penataan Ketatalaksanaan;
- 110. Program Pembinaan Inovasi Daerah;
- 111. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN III;
- 112. Program Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan DPRD.



Tabel 8.3: Pagu Indikatif Program Prioritas III

	2017	2018	2019	2020
Prioritas III	202,109,753,826.	204,016,195,969	208,620,442,509	212,769,277,975

Sumber: Hasil dan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Prioritas III merupakan program ditingkat SKPD yang merupakan program rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Program prioritas III untuk memenuhi kebutuhan kinerja dari aparatur dalam meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Program prioritas III merupakan program-program yang bersifat rutin seperti berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Surat Menyurat;
3. Program Dukungan Kelengkapan Penyelenggaraan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional;
4. Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH/WKDH;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH/WKDH;
6. Program Dukungan Penyelenggaraan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional;
7. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi;

8. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusanwajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal99 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi. Penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8.4 Capaian Kinerja Program Prioritas I dan Kerangka Pendanaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN WAJIB											
Pendidikan											
Program Peningkatan Akses PAUD	APK PAUD formal (usia 5-6 tahun)	%	80,68	1.757.800.000	81,93	2.257.800.000	83,18	2.757.800.000	84,43	3.257.800.000	Dinas Pendidikan
	APM PAUD formal (usia 5-6 tahun)	%	68,1		70,6		73,1		75,6		Dinas Pendidikan
	Rasio ketersediaan lembaga terhadap anak usia Paud 5-6 tahun	Rasio	1,56		1,62		1,48		1,44		Dinas Pendidikan
	Persentase ketersediaan ruang kelas terhadap kelas rombel	%	98,8		99,3		99,8		100		Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu PAUD	Persentase Lembaga PAUD formal terakreditasi	%	79,51	1.120.000.000	84,01	1.620.000.000	88,51	2.120.000.000	93,01	2.620.000.000	Dinas Pendidikan
	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan PENDIDIK dan Tenaga Kependidikan TK	%	61,6		62,6		63,6		64,6		Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD	
			2017		2018		2019		2020			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program Peningkatan Akses Pendidikan SD	APK SD/MI/Paket A	%	104	20.813.850.000	103	21.813.850.000	101,98	22.813.850.000		100,97	23.813.850.000	Dinas Pendidikan
	APM SD/MI/Paket A	%	99,95		99,96		99,97			99,98		Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	101,86		101,91		101,96			102,01		Dinas Pendidikan
	Gender Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	1,02		1,01		1,00			1,00		Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Jumlah SD terakreditasi A	Sekolah	233	2.125.000.000	263	2.233.000.000	293	2.305.000.000		323	2.405.000.000	Dinas Pendidikan
	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	%	61,5		62,5		63,5			64,5		Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SD	%	0,03		0,03		0,03			0,03		Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP	APK SMP/Mts/Paket B	%	101,21	5.160.400.000	101,25	5.160.400.000	101,29	6.160.400.000		101,33	6.660.400.000	Dinas Pendidikan
	APM SMP/MTs/Paket B	%	88,84		88,88		88,92			88,96		Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket ke SMA/SMK/MA/Paket C	%	99,07		99,15		99,23			99,31		Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD	
			2017		2018		2019		2020			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Perbedaan gender angka Melanjutkan (AM) Gender SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C	%	1,01		1,00		1,00		1,00			Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Jumlah SMP terakreditasi A	Sekolah	64	1.685.000.000	69	1.835.000.000	74	2.110.000.000	79	2.310.000.000	Dinas Pendidikan	
	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,29		0,27		0,25		0,23		Dinas Pendidikan	
	Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	%	60,01		61,01		62,01		63,01		Dinas Pendidikan	
Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	Jumlah Lembaga kursus dan pelatihan berizin	Sekolah	28	318.550.000	30	318.550.000	32	318.550.000	34	318.550.000	Dinas Pendidikan	
	Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas (Persentase)	%	97,5		97,9		98,3		98,7		Dinas Pendidikan	
	Persentase penduduk usia 7-21 tahun yang putus/tidak sekolah yang tertangani PNF	%	35		45		55		65		Dinas Pendidikan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan berakreditasi	%	15,32	928.000.000	18,32	1.028.000.000	21,32	1.228.000.000	24,32	1.428.000.000	Dinas Pendidikan
Kesehatan											
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan	Contact Rate (Angka Kunjungan Baru)	Kali	1,26	32.355.333.000	1,23	21.452.715.420	1,20	8.039.712.000	1,17	7.798.500.000	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan rujukan	%	4,10		4,03		3,96		3,9		Dinas Kesehatan
	Cakupan parameter pemeriksaan Laboratorium sesuai standar	%	68,8		77,5		86,3		95		Dinas Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase sekolah tidak ditemukan jajanan mengandung bahan berbahaya	%	55	200.000.000	60	200.000.000	65	200.000.000	70	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) bersertifikat	%	75		80		85		90		Dinas Kesehatan
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Berbasis Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	%	28	1.025.000.000	30	1.150.000.000	32	1.350.000.000	34	1.400.000.000	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD	
			2017		2018		2019		2020			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Persentase Posyandu PURI yang menjadi Taman Posyandu	%	15		17		19		21			Dinas Kesehatan
	Persentase pengembangan UKBM PURI (Purnama Mandiri)	%	20		22		24		26			Dinas Kesehatan
Program Pembiayaan Kesehatan	Cakupan pembiayaan kesehatan	%	7,3	84.072.308.000	7,8	90.912.543.580	8,4	99.410.776.000	9,0	111.688.269.820		Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat (Ber PHBS)	%	56	275.000.000	59	300.000.000	62	325.000.000	65	350.000.000		Dinas Kesehatan
Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Angka kejadian kasus penyakit menular (Angka Kesakitan per 1,000 Penduduk)	Per 1,000 Penduduk	98,0		97,5		97,0		96,5			Dinas Kesehatan
	Persentase penyakit tidak menular	%	5		6		7		8			Dinas Kesehatan
	Persentase Desa UCI	%	91	1.513.453.750	91	1.677.529.626	92	1.869.659.587	92	2.099.489.080		Dinas Kesehatan
	Penanggulangan KLB < 24 jam	%	100		100		100		100			Dinas Kesehatan
	Cakupan deteksi dini kesehatan jiwa oleh Puskesmas	%	20		30		40		50			Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevelensi gizi buruk	%	2,0	550.000.000	1,9	715.000.000	1,8	900.000.000	1,7	1.075.000.000	Dinas Kesehatan
	Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	44		47		47		50		Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan	%	88,3		91,5		95,0		98,0		Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat)	Desa	6	750.000.000	10	835.000.000	15	1.210.000.000	19	1.575.000.000	Dinas Kesehatan
	Persentase desa ODF	%	60		70		75		80		Dinas Kesehatan
	Persentase TTU memenuhi syarat	%	77,8		80,5		83,3		86,0		Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	%	81	250.000.000	82	275.000.000	83	300.000.000	84	325.000.000	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))	%	81		82		83		84		Dinas Kesehatan
	Cakupan Peserta KB Aktif	%	69		69		70		70		Dinas Kesehatan
Program Sumberdaya Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat sesuai kebutuhan, baik obat esensial maupun generik	%	87		88		89		90		Dinas Kesehatan
	Cakupan alkes faskes dasar Sesuai standart	%	33	2.865.000.000	38	3.435.000.000	43	4.000.000.000	48	4.540.000.000	Dinas Kesehatan
	Persentase SDM kesehatan dengan kompetensi sesuai standar	%	40		45		50		55		Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas bernilai minimal cukup dalam penilaian kinerja Puskesmas	%	73		83		91		95		Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan primer terakreditasi	%	35	2.146.595.000	55	2.994.828.700	55	3.718.448.400	55	4.425.298.500	Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan rujukan terakreditasi	%	92		92		100		100		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Persentase bangunan Puskesmas sesuai standar	%	40		50		60		75		Dinas Kesehatan
	Persentase bangunan Puskesmas pembantu dalam kondisi baik	%	50	13.165.000.000	60	16.590.000.000	70	18.615.000.000	80	20.640.000.000	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Panjang jalan perdesaan yang dibangun dalam kondisi baik	Km	40	17.050.700.000	40	17.903.235.000	40	18.798.396.750	40	19.738.316.588	DPU Cipta Karya TR
Program Pembangunan Fasilitas Publik	Jumlah fasilitas publik dan aparatur yang terbangun berfungsi baik	Unit	50	75.000.000.000	50	46.250.000.000	50	53.612.930.000	50	48.940.625.000	DPU Cipta Karya TR
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik	Jumlah fasilitas publik yang direhabilitasi	Unit	25	15.000.000.000	25	15.500.000.000	25	16.025.000.000	25	17.576.250.000	DPU Cipta Karya TR
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase / gorong-gorong yang direhabilitasi dalam kondisi baik	M	300	225.000.000	300	236.250.000	300	248.062.500	300	260.465.625	DPU Pengairan
Program Pembangunan Jalan	Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	%	80	15.200.000.000	80	15.960.000.000	80	16.758.000.000	80	17.595.900.000	DPU Cipta Karya TR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik	Unit	15	7.500.000.000	15	7.875.000.000	15	8.268.750.000	15	8.682.187.500	DPU Cipta Karya TR
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase wilayah yang telah menyusun perencanaan tata ruang	%	69	2.650.000.000	79	2.850.000.000	90	3.150.000.000	92	3.600.000.000	DPU Cipta Karya TR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB (%)	%	95	475.000.000	96	493.750.000	97	513.437.500	97	534.109.375	DPU Cipta Karya TR
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase ketersediaan Air Baku	%	80	91.188.703.800	82	101.527.209.805	84	111.627.602.426	88	121.730.800.244	DPU Pengairan
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase sumber air / mata Air yang dalam kondisi baik/kondisi debit air stabil	%	60,8	92.396.504.527	61,5	93.645.877.737	62,3	94.657.286.400	63,0	95.015.539.200	DPU Pengairan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH publik kawasan perkotaan berfungsi baik	%	1,5	8.820.688.000	1,5	9.661.722.400	1,5	10.124.808.520	1,5	10.611.048.946	DPU Cipta Karya TR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman											
Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	100	950.000.000	100	987.500.000	100	1.026.875.000	100	1.068.218.750	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response rate time) penanggulangan bahaya kebakaran	%	76	1.179.720.000	77	1.315.000.000	78	1.447.000.000	79	1.587.000.000	Satpol PP
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	%	95	1.355.000.000	96	1.340.000.000	97	1.370.000.000	98	1.400.000.000	Satpol PP
Sosial											
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pelayanan bagi PMKS	%	0,36	1.465.000.000	0,41	1.465.000.000	0,46	1.465.000.000	0,52	1.465.000.000	Dinas Sosial
Tenaga Kerja											
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	76,0	960.000.000	77,4	960.000.000	78,9	960.000.000	80,4	960.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikat	%	48,3	815.000.000	49	815.000.000	49,6	815.000.000	50,2	815.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD	
			2017		2018		2019		2020			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak												
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penyelesaian pengaduan dari tindak kekerasan dan trafficking	%	72	820.928.000	75	820.928.000	77	768.143.000	79	820.928.000	BPPKB	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah memiliki focal point aktif	%	67	623.300.000	68	623.300.000	70	623.300.000	73	623.300.000	BPPKB	
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pemberdayaan	Persentase kelompok usaha perempuan mandiri	%	20	344.625.000	25	344.625.000	30	344.625.000	35	344.625.000	BPPKB	
Pangan												
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan	Nilai/Angka	91	4.843.000.000	93	5.290.000.000	94	6.410.940.000	95	7.072.500.000	Dinas Perikanan dan Pangan	
Lingkungan hidup												
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	%	53	11.261.250.000	56	12.051.250.000	59	13.561.250.000	61	14.281.250.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Indeks pencemaran lingkungan	Skala	140,7	11.261.250.000	142,8	13.051.250.000	144,8	14.561.250.000	146,9	16.281.250.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan	Persentase peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan	%	40	930.000.000	60	930.000.000	80	930.000.000	100	930.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Rehabilitasi Hutan/Lahan	Indeks tutupan hutan/lahan	Skala	60,8	550.000.000	60,8	580.000.000	60,8	610.000.000	60,8	640.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam	%	80	3.508.635.250	85	4.930.636.000	90	5.940.636.000	95	6.950.636.000	Dispendukcapil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Indeks Ketahanan Ekonomi	Skala	0,64	923.840.000	0,68	1.065.460.000	0,71	1.169.800.000	0,74	1.283.980.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Indeks Ketahanan Sosial	Skala	0,78	2.360.200.000	0,79	2.649.650.000	0,79	2.932.425.000	0,79	3.208.110.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Indeks Ketahanan Lingkungan / Ekologi	Skala	0,70	385.000.000	0,71	435.000.000	0,71	485.000.000	0,71	535.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintahan desa	%	77,3	2.573.500.000	78,5	2.837.850.000	80,0	3.106.935.000	90,0	3.373.120.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
Program Keluarga Berencana	Persentase KB Aktif	%	69	820.928.000	69	820.928.000	70	820.928.000	70	820.928.000	BPPKB
Perhubungan											
Program Pengembangan Transportasi Udara dan Perkeretaapian	Persentase peningkatan aksesibilitas transportasi udara dan perkeretaapian	%	31,3	750.000.000	37,5	780.000.000	43,8	810.000.000	50,0	850.000.000	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum di bidang transportasi darat	%	82	600.000.000	84	780.000.000	86	905.000.000	88	855.000.000	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan LPJU	Persentase panjang jalan terlayani LPJU	%	31	46.900.000.000	37	47.582.000.000	43	48.794.000.000	49	49.613.400.000	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika											
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik	%	62	2.515.000.000	65	2.680.000.000	68	2.790.000.000	70	2.820.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan	Informasi	250	525.000.000	275	575.000.000	300	650.000.000	325	680.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase aplikasi IT yang mendukung city branding dan layanan publik yang berfungsi baik	%	50	3.960.000.000	55	4.704.000.000	60	5.702.400.000	65	6.842.880.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Tatakelola Pengembangan e-Government	Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik	%	50	1.185.600.000	55	1.407.720.000	60	1.674.264.000	65	1.994.116.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	81	1.400.000.000	82	1.740.000.000	83	1.830.000.000	84	1.910.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi	%	0,40		0,50		0,60		0,70		
Program Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	14,28	1.032.957.500	15,86	1.080.000.000	17,45	1.115.000.000	19,03	1.160.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	13,22		15,50		15,69		16,04		
Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Persentase wirausaha mikro baru yang tumbuh	%	0,27	1.250.000.000	0,35	1.450.000.000	0,42	1.650.000.000	0,50	1.850.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro	Rasio pemerataan unit usaha mikro kecil dan menengah	Rasio	20,5	500.000.000	21,0	500.000.000	21,5	500.000.000	22,0	500.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mengalami perkembangan usaha	%	12,5	3.425.000.000	15,0	3.650.000.000	17,5	3.875.000.000	20,0	4.150.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Penanaman Modal											
Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi penanaman modal	%	81,5	175.000.000	86,0	275.000.000	90,5	375.000.000	95,0	475.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase peningkatan LKPM	%	13		16		17		17		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah minat Penanaman Modal	Rp.Trilyun	2	700.000.000	3	725.000.000	3	725.000.000	3	725.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian penyelesaian perizinan sesuai dengan SOP	%	80	400.000.000	85	425.000.000	90	475.000.000	95	525.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kepemudaan dan Olahraga											
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri	%	20	450.000.000	30	500.000.000	40	550.000.000	60	600.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan	Persentase pemuda terlatih	%	20	2.500.000.000	30	2.750.000.000	40	3.000.000.000	50	3.250.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah atlit yang berprestasi	Orang	75	3.800.000.000	100	5.700.000.000	125	6.900.000.000	150	7.500.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah insan olahraga yang berprestasi	Orang	55	200.000.000	60	300.000.000	65	400.000.000	75	500.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event	Kegiatan	10	12.250.000.000	11	12.650.000.000	11	13.350.000.000	12	13.450.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Statistik											
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	100	1.070.000.000	100	1.070.000.000	100	1.070.000.000	100	1.070.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persandian											
Program Pengamanan Informasi Daerah	Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara baik	%	100	395.000.000	100	395.000.000	100	395.000.000	100	395.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kebudayaan											
Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Event	22	10.532.388.000	24	11.532.388.000	26	12.532.388.000	28	13.532.388.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Perpustakaan											
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	%	87	877.268.500	89	1.271.435.250	90	1.371.006.075	90	1.571.006.105	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kearsipan											
Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis	Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola	%	80	307.621.000	80	510.181.500	90	721.735.950	90	921.735.950	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kelautan dan Perikanan											
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	Ton	27.272	4.375.000.000	28.469	4.675.000.000	29.666	4.975.000.000	30.863	5.275.000.000	Dinas Perikanan dan Pangan
	Jumlah luas pemanfaatan lahan budidaya	Ha	1462		1497		1532		1567		Dinas Perikanan dan Pangan
	Jumlah produksi benih ikan air tawar di kabupaten	Juta ekor	29		31		32		33		Dinas Perikanan dan Pangan
	Persentase jumlah pokdakan yang meningkat kelasnya	%	5		7		10		13		Dinas Perikanan dan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap	Ton	63.831	5.180.000.000	65.120	6.099.500.000	66.408	8.295.000.000	67.697	9.040.000.000	Dinas Perikanan dan Pangan
	Nilai produksi perikanan tangkap	Rp.Trilyun	1,50		1,65		1,82		2,00		Dinas Perikanan dan Pangan
	Persentase peningkatan PNBP sektor perikanan tangkap	%	10		10		10		10		Dinas Perikanan dan Pangan
	Persentase jumlah KUB yang meningkat kelasnya	%	5		8		8		9		Dinas Perikanan dan Pangan
Pariwisata											
Program Pengembangan Destinasi dan Jaringan Kemitraan Pariwisata	Lenght of stay	Hari	3	10.532.388.000	4	10.532.388.000	4	10.532.388.000	4	10.532.388.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	%	20	4.000.000.000	30	5.000.000.000	40	6.000.000.000	50	7.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pertanian											
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase kelompok yang memanfaatkan teknologi peternakan tepat guna	%	9	3.466.700.000	11	4.536.065.000	13	5.888.895.000	14	7.776.978.000	Dinas Pertanian
	Produksi daging	Ton	9.352		9.620		9.889		10.157		Dinas Pertanian
	Produksi telur	Ton	11.687		12.062		12.438		12.813		Dinas Pertanian
	Produksi susu	Ton	818		829		839		850		Dinas Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Produksi Ternak	Jumlah kelompok dan usaha peternakan yang tumbuh	Kelompok	605	1.850.000.000	615	2.300.000.000	625	2.650.000.000	635	3.150.000.000	Dinas Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka kejadian penyakit	%	4,50	5.745.000.000	4,25	6.754.000.000	4,00	7.763.000.000	4,00	9.582.000.000	Dinas Pertanian
	Angka kematian ternak	%	0,3		0,3		0,3		Dinas Pertanian		
	Usaha produk hewan yang bersertifikasi PRA/NKV	Unit	4		5		6		7		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lainnya per Hektar	Kwintal/ Hektar	65,30	17.470.000.000	65,87	19.019.000.000	66,15	21.138.700.000	66,23	22.862.570.000	Dinas Pertanian
	Persentase sarana dan prasarana tanaman pangan yang dimanfaatkan	%	100		100		100		Dinas Pertanian		
	Jumlah sertifikasi produk tanaman pangan	Dokumen	2		3		4		5		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura unggulan daerah	%	3,33	20.500.000.000	3,41	24.050.000.000	3,49	28.855.000.000	3,57	30.940.500.000	Dinas Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD	
			2017		2018		2019		2020			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan daerah	%	3,33		3,41		3,49			3,57		Dinas Pertanian
	Jumlah sertifikasi produk perkebunan dan hortikultura	Dokumen	3		4		5			6		Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	Persentase peningkatan produksi tembakau	%	3,33	9.200.000.000	3,41	10.120.000.000	3,49	11.132.000.000		3,57	12.245.200.000	Dinas Pertanian
	Jumlah sertifikasi tembakau	Dokumen	1		2		3			4		Dinas Pertanian
Perindustrian												
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM	%	6,09	4.160.000.000	6,62	4.815.000.000	7,21	5.395.000.000		7,86	5.975.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri	Persentase cakupan pengembangan sentra industri	%	55	355.000.000	60	410.000.000	65	495.000.000		70	550.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase peningkatan jumlah IKM yang bermitra dalam klaster	%	5,0		7,5		10,0			12,5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil	Rasio ketimpangan pendapatan IKM wilayah kecamatan (ketimpangan versi bank dunia)	%	16,00	2.755.000.000	16,25	3.000.000.000	16,50	3.250.000.000	16,75	3.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri	Persentase peningkatan sertifikasi standardisasi dan HKI	%	50	532.000.000	50	822.000.000	50	1.112.000.000	50	1.402.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Transmigrasi											
Program Pengembangan Wilayah dan Penempatan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	%	0,41	535.000.000	0,42	535.000.000	0,43	535.000.000	0,45	535.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemerintahan Umum											
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase angka konflik suku, agama, ras dan antar golongan	%	0	920.092.300	0	1.012.102.410	0	1.113.312.851	0	1.224.643.916	Bangkesbangpol
Penunjang (Perencanaan)											
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	82,5	960.000.000	85,0	1.340.000.000	90,0	1.725.000.000	90,0	1.910.000.000	Bappeda

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan sebagai policy brief	%	80	3.525.000.000	80	3.625.000.000	80	3.625.000.000	80	3.825.000.000	Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan kesra dan pemerintah yang dimanfaatkan sebagai policy brief	%	80	3.080.000.000	80	3.080.000.000	80	3.080.000.000	80	3.080.000.000	Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Sarpras Wilayah dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan sebagai policy brief	%	80	3.900.000.000	80	4.150.000.000	80	4.700.000.000	80	5.450.000.000	Bappeda
Penunjang (Keuangan)											
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelayanan Kepada masyarakat dalam pencairan SP2D	%	89	1.360.000.000	91	1.370.000.000	93	1.380.000.000	95	1.390.000.000	BPKAD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penunjang (Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan)											
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	%	80	6.525.000.000	80	7.325.000.000	80	8.325.000.000	80	9.325.000.000	BKPP
	Persentase peningkatan SDM aparatur melalui pelaksanaan Diklat										BKPP
Penunjang (Penelitian dan Pengembangan)											
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai policy brief	%	80	1.960.000.000	80	2.380.000.000	80	2.600.000.000	80	2.995.000.000	Bappeda
Penunjang (Fungsi lain sesuai peraturan perundangundangan)											
Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peringkat LPPD	Peringkat	10	900.000.000	10	900.000.000	10	900.000.000	10	900.000.000	Setda
Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase peningkatan aset tanah pemkab bersertikat	%	70	25.000.000.000	75	25.500.000.000	80	26.000.000.000	85	26.500.000.000	Setda

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi	%	85	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000	Setda
Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, efektif dan efisien	%	100	1.612.000.000	100	1.612.000.000	100	1.612.000.000	100	1.612.000.000	Setda
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Persentase SKPD yang nilai AKIPnya Baik/B hasil evaluasi Inspektorat (TIM) dari SKPD yang dievaluasi	%	75,0	570.000.000	78,6	570.000.000	82,1	570.000.000	85,0	570.000.000	Setda
Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik	Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SKPD	%	80	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000	Setda

Tabel 8.5 Capaian Kinerja Program Prioritas II dan Kerangka Pendanaan

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN WAJIB											
Kesehatan											
Program Peningkatan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan usia lanjut	%	55	50.000.000	56	60.000.000	57	70.000.000	58	80.000.000	Dinas Kesehatan
Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan	Persentase Puskesmas melaksanakan upaya kesehatan kerja	%	26	50.000.000	32	50.000.000	38	50.000.000	44	50.000.000	Dinas Kesehatan
Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Olahraga	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga	%	20	50.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000	35	50.000.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita	Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	86	175.000.000	87	200.000.000	88	225.000.000	89	250.000.000	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi (K By)	%	96		96		97		97		Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Blambangan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	75	64.909.412.000	76	74.105.000.000	77	84.311.000.000	78	87.892.800.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Genteng	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	75	72.126.735.000	76	76.970.000.000	77	78.560.000.000	78	81.560.000.000	Dinas Kesehatan

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019		2020			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Rumah Sakit											
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan (RSUD Blambangan)	Persentase pembinaan lingkungan sosial lingkup kesehatan	%	85	10.000.000.000	87	10.000.000.000	89	10.000.000.000	90	10.000.000.000	Dinas Kesehatan	
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan (RSUD Genteng)	Persentase pembinaan lingkungan sosial lingkup kesehatan	%	85	5.565.000.000	87	6.385.000.000	89	7.165.000.000	90	7.916.000.000	Dinas Kesehatan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase / gorong-gorong yang dibangun dalam kondisi baik	M	15.000	225.000.000	15.000	236.250.000	15.000	248.062.500	15.000	260.465.625	DPU Pengairan	
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang jaringan irigasi diperbaiki	Km	35	103.940.780.800	39	104.299.033.600	43	106.657.286.400	47	110.015.539.200	DPU Pengairan	
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi dalam kondisi baik	Km	400	54.050.000.000	400	71.751.090.000	400	73.129.060.000	400	80.974.225.950	DPU Cipta Karya TR	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang direhab dalam kondisi baik	Unit	5	5.000.000.000	5	7.500.000.000	5	9.125.000.000	5	11.881.250.000	DPU Cipta Karya TR
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	Sistem informasi/database jalan dan jembatan yang berfungsi baik	Aplikasi IT	4	500.000.000	4	1.250.000.000	4	1.512.500.000	4	2.038.004.184	DPU Cipta Karya TR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi baik	Unit	6	10.400.000.000	6	10.920.000.000	6	11.466.000.000	6	12.039.300.000	DPU Cipta Karya TR
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah fasilitas publik strategis yang dibangun berfungsi baik	Unit	2	2.250.000.000	2	2.362.500.000	2	2.480.625.000	2	2.604.656.250	DPU Cipta Karya TR
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang sesuai standar	Orang	20	473.250.000	20	473.250.000	20	473.250.000	20	473.250.000	DPU Cipta Karya TR
	Jumlah penyedia jasa konstruksi yang sesuai kualifikasi	Perusahaan	200		200		200		200		DPU Cipta Karya TR
Program Pembangunan Trotoar	Panjang trotoar berfungsi baik	M	8.000	5.535.000.000	8.000	5.811.750.000	8.000	6.100.000.000	8.000	6.500.000.000	DPU Cipta Karya TR
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase areal pemakaman yang berfungsi baik	%	1,5	6.260.000.000	1,5	6.570.500.000	1,5	6.896.525.000	1,5	7.238.851.250	DPU Cipta Karya TR

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Sumber Daya Air	Ketersediaan dokumen data base sumber daya air	%	50	158.125.000	55	160.000.000	60	161.000.000	65	162.000.000	DPU Pengairan
Program Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis	%	60	495.000.000	61	544.500.000	62	598.950.000	63	658.845.000	DPU Pengairan
Program Pengendalian Banjir	Persentase daerah bebas banjir	%	90	2.875.000.000	91	3.018.750.000	92	3.471.562.500	93	3.645.140.625	DPU Pengairan
Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	%	60	904.400.000	70	962.620.000	75	1.022.751.000	80	1.084.888.550	DPU Pengairan
Program Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau (Degradasi DAS)	%	65	3.616.110.000	70	6.199.165.000	75	7.582.220.000	80	8.965.275.000	DPU Pengairan
Program Penataan Lingkungan	Persentase sanitasi lingkungan perumahan yang berfungsi baik	%	15,8	2.800.000.000	17,0	2.830.000.000	17,0	2.870.000.000	18,0	2.900.000.000	DPU Pengairan
Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman											

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penataan Perumahan	Jumlah perumahan sesuai ketentuan	Lokasi	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Jumlah kasiba yang berijin	Lokasi	5		5		5		5		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Pengendalian Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh yang tertangani	Ha	10	3.900.000.000	10	4.100.500.000	10	4.250.375.000	10	4.500.093.750	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Pengembangan Rusun dan PSU	Jumlah rusun dan PSU berfungsi baik	Lokasi	1	550.000.000	1	575.000.000	1	601.250.000	1	628.812.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi dasar yang dibangun berfungsi baik	Unit	5	600.000.000	5	620.000.000	5	641.000.000	5	663.050.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kentretaman dan Ketertiban											
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Keindahan dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	93	950.000.000	94	1.010.000.000	95	1.070.000.000	96	1.130.000.000	Sat Pol PP

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Satuan Linmas	Rasio Linmas Per desa	Linmas/desa	38	1.281.000.000	39	2.170.000.000	40	3.440.000.000	41	4.960.000.000	Sat Pol PP
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase patroli ketertiban	%	95	3.750.000.000	96	3.860.000.000	97	3.970.000.000	98	4.080.000.000	Sat Pol PP
Program Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana	Persentase peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana	%	61,4	930.000.000	71,7	950.000.000	82,0	970.000.000	90,0	990.000.000	BPBD
	Desa tangguh yang telah terbentuk	Desa	2		2		2		2		BPBD
Program Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana	Persentase penanganan darurat bencana	%	70	939.000.000	75	954.000.000	80	972.000.000	85	992.000.000	BPBD
	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar	%	60		65		70		75		BPBD
Program Pemulihan Pasca Bencana	Persentase pemulihan dampak bencana	%	45	920.000.000	55	920.000.000	65	920.000.000	70	920.000.000	BPBD
Sosial											
Program Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)	Persentase PSKS yang tersertifikasi	%	1,79	425.000.000	2,11	525.000.000	2,43	625.000.000	2,75	725.000.000	Dinas Sosial

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perlindungan Sosial	Persentase PMKS prioritas yang mendapat jaminan hidup dasar meningkat	%	9,52	3.105.000.000	9,82	3.805.000.000	10,03	3.805.000.000	10,11	3.805.000.000	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	%	9,11	575.000.000	9,82	775.000.000	10,40	975.000.000	11,01	1.175.000.000	Dinas Sosial
Program Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pemeliharaan	Jumlah pahlawan yang diusulkan menjadi pahlawan nasional	orang	5	230.000.000	10	230.000.000	15	230.000.000	20	230.000.000	Dinas Sosial
Tenaga Kerja											
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	76,19	850.000.000	77,51	850.000.000	78,97	850.000.000	79,17	850.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase TKI bermasalah	%	0,96	710.000.000	0,96	710.000.000	0,96	710.000.000	0,96	710.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pangan											
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Skor PPH Konsumsi	Nilai/ Angka	70	645.000.000	71	664.500.000	74	785.000.000	76	830.000.000	Dinas Perikanan dan Pangan
Lingkungan hidup											

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Akreditasi laboratorium lingkungan	Parameter	12	930.000.000	16	930.000.000	19	930.000.000	22	930.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Program Pendataan dan Informasi Kependudukan	Persentase database kependudukan yang valid dan update	%	87	68.750.000	89	72.000.000	91	76.750.000	93	79.000.000	DisPenduk Capil
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan	%	87	68.750.000	89	72.000.000	91	75.750.000	93	79.100.000	DisPenduk Capil
	Jumlah inovasi pelayanan kependudukan yang dikembangkan	Inovasi	1		1		1		1		DisPenduk Capil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Bayi lahir procot pulang bawa akta	%	0,35	445.000.000	0,40	458.000.000	0,45	540.000.000	0,50	590.000.000	DisPenduk Capil
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase layanan informasi dan KRR	%	85	623.300.000	85	623.300.000	85	623.300.000	85	623.300.000	BPPKB

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Persentase remaja yang bermasalah dengan sex bebas, Napza termasuk HIV/AIDS	%	0,24	344.625.000	0,23	344.625.000	0,22	344.625.000	0,21	344.625.000	BPPKB
Program Pengendalian Penduduk	Angka laju pertumbuhan penduduk	%	0,36	351.145.000	0,35	351.145.000	0,34	351.145.000	0,33	351.145.000	BPPKB
Program Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri	%	70	291.990.800	72	291.990.800	74	291.990.800	76	291.990.800	BPPKB
Perhubungan											
Program Pengembangan Transportasi Laut	Persentase peningkatan aksesibilitas transportasi Laut	%	12	760.000.000	14	905.000.000	16	1.210.000.000	18	1.510.000.000	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	77,5	1.400.000.000	80,0	1.650.000.000	82,5	1.750.000.000	85,0	1.950.000.000	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	%	84	1.150.000.000	86	1.300.000.000	88	1.500.000.000	90	1.700.000.000	Dinas Perhubungan
Program Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase potensi lokasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas angkutan jalan	%	77,5	3.325.000.000	80,0	3.475.000.000	82,5	3.525.000.000	85,0	3.700.000.000	Dinas Perhubungan

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase peningkatan sarana prasarana transportasi Darat	%	67,8	5.475.000.000	71,5	5.775.000.000	79,0	6.775.000.000	79,0	7.775.000.000	Dinas Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Indeks angka kecelakaan transportasi darat	%	40,38	3.680.000.000	37,61	3.680.000.000	35,03	3.680.000.000	32,62	3.680.000.000	Dinas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kualitas prasarana dan fasilitas transportasi Darat	%	100	925.000.000	100	925.000.000	100	925.000.000	100	925.000.000	Dinas Perhubungan
Kepemudaan dan Olahraga											
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah duta anti narkoba meningkat	Orang	70	200.000.000	100	250.000.000	150	300.000.000	180	350.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor meningkat	Orang	23	1.650.000.000	28	2.025.000.000	33	2.335.000.000	38	2.590.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan	%	80		85		90		95		Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan Kepramukaan	Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya	%	80	200.000.000	85	300.000.000	90	400.000.000	95	500.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standart	Lokasi	3	16.000.000.000	3	19.000.000.000	3	22.000.000.000	3	25.000.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kearsipan											
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase arsip/dokumen daerah dalam kondisi kondisi baik	%	87	307.621.000	89	510.181.500	90	721.735.950	90	900.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik	%	87	61.548.700	89	93.485.550	90	125.018.715	90	175.018.714	Dinas Perpustakaan
Perdagangan											
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah realisasi ekspor	US\$	105 juta	1.300.000.000	115 juta	1.445.000.000	126 juta	1.590.000.000	140 juta	1.735.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	%	8,52	667.000.000	9,32	725.000.000	10,12	787.000.000	10,92	853.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas	%	12,82	170.000.000	12,12	230.000.000	11,42	290.000.000	10,72	350.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	%	10,91	3.940.000.000	11,48	3.940.000.000	12,25	3.940.000.000	12,66	3.940.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Persentase tertib niaga barang kena cukai	%	92	76.000.000	96	82.000.000	100	89.000.000	100	97.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar sesuai SNI	%	2,04	4.100.000.000	5,10	4.560.000.000	8,16	5.020.000.000	11,22	5.480.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintahan Umum											
Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen Rancangan RKPD hasil Musrenbang Kecamatan	Dokumen	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	Kantor Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	20	375.000.000	21	375.000.000	22	375.000.000	23	375.000.000	Kantor Kecamatan
Program Pemasarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan	Persentase pengunjung perpustakaan di Kecamatan	%	1,0	375.000.000	1,2	375.000.000	1,5	375.000.000	1,7	375.000.000	Kantor Kecamatan
Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kasus	5	375.000.000	4	375.000.000	3	375.000.000	2	375.000.000	Kantor Kecamatan

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Fasilitas Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan	%	20	375.000.000	21	375.000.000	22	375.000.000	23	375.000.000	Kantor Kecamatan
Program Fasilitas Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Persentase desa/kelurahan sehat	%	75	375.000.000	80	375.000.000	85	375.000.000	90	375.000.000	Kantor Kecamatan
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase angka masyarakat yang menggunakan hak politiknya	%	65	3.200.000.000	67	3.200.000.000	70	3.200.000.000	72	3.200.000.000	BakesbangPol
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Angka potensi gangguan ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan	Kejadian	12	3.118.300.000	12	3.118.300.000	12	3.118.300.000	12	3.118.300.000	BakesbangPol
Program Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Angka potensi gangguan sosial budaya	Kejadian	12	134.300.000	12	134.300.000	12	134.300.000	12	134.300.000	BakesbangPol
Penunjang (Perencanaan)											
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase SKPD yang tercapai target programnya	%	90	1.125.000.000	90	1.125.000.000	90	1.125.000.000	90	1.125.000.000	Bappeda
Penunjang (Keuangan)											

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah	Persentase SKPD dalam menyusun RKA, DPA dan DPPA tepat waktu	%	89	5.110.000.000	91	5.110.000.000	93	5.110.000.000	95	5.110.000.000	BPKAD
Program Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase pemenuhan laporan keuangan yang tepat waktu	%	89	3.831.000.000	91	3.831.000.000	93	3.831.000.000	95	3.831.000.000	BPKAD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase peningkatan kinerja Aset Daerah	%	87	2.100.000.000	89	2.100.000.000	90	2.100.000.000	92	2.100.000.000	BPKAD
Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan potensi pendapatan daerah	%	13	1.560.000.000	14	1.872.000.000	15	2.246.400.000	16	2.695.680.000	Bapenda
	Persentase pengendalian administrasi dinas penghasil berbasis IT	%	17		18		19		20		Bapenda
	Persentase peningkatan pelaporan realisasi pendapatan yang tepat waktu	%	70		75		80		85		Bapenda
Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase kesesuaian obyek dan subyek pajak / retribusi daerah	%	90	1.360.000.000	92	1.564.000.000	94	1.798.600.000	96	2.068.390.000	Bapenda

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019		2020			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Persentase penetapan pajak dan retribusi yang ditagih	%	100		100		100		100			Bapenda
Program Intensiifikasi dan Ekstensiifikasi Pajak Daerah	Persentase realisasi PBB	%	74	2.250.000.000	74	2.700.000.000	75	3.240.000.000	75	3.888.000.000	Bapenda	
	Persentase realisasi BPHTB	%	45,0		45,5		46,3		47,0		Bapenda	
Penunjang (Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan)												
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelaksanaan seleksi CPNS daerah	%	50	1.230.000.000	50	1.375.000.000	50	1.380.000.000	50	1.400.000.000	BKPP	
	Persentase pelaksanaan ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan	%	50		50		50		50		BKPP	
	Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	%	70		70		70		70		BKPP	
	Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat PNS	%	70		70		70		70		BKPP	
	Prosentase pelaksanaan pembinaan karier PNS	%	76,3		77,5		80,0		80,0		BKPP	

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengendalian Sumberdaya Aparatur	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	%	80	370.000.000	80	370.000.000	80	370.000.000	80	370.000.000	BKPP
Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi	Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	81,3	150.000.000	82,5	150.000.000	85,0	150.000.000	85,0	150.000.000	BKPP
Program Penilaian dan Kapasitas Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan kapasitas kinerja aparatur	%	70	850.000.000	80	850.000.000	80	850.000.000	80	850.000.000	BKPP
Penunjang (Fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan)											
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN I	Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban I	%	100		100		100		100		Inspektorat Daerah
	Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan negara/daerah dan administrasi pada wilayah Irban I	%	58,8	2.433.048.000	62,5	2.671.959.700	66,3	2.934.832.200	70,0	3.223.842.000	Inspektorat Daerah

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019		2020			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Irban I	%	50		60		70		80			Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN II	Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban II	%	100		100		100		100			Inspektorat Daerah
	Persentase rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti : keuangan negara/ daerah dan administrasi pada wilayah Irban II	%	58,8	1.679.882.000	62,5	1.843.477.000	66,3	2.023.432.188	70,0	2.221.377.000		Inspektorat Daerah
	Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Irban II	%	50		60		70		80			Inspektorat Daerah
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai prolegda	%	62	12.724.800.000	63	12.724.800.000	64	12.724.800.000	65	12.724.800.000	0	Sekretariat DPRD

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab	
			2017		2018		2019		2020			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Persentase bimtek penyusunan UU yang berkualitas	%	100		100		100			100		Sekretariat DPRD
	Persentase penyebarluasan perda	%	100		100		100			100		Sekretariat DPRD
	Persentase perda yang disosialisasikan	%	100		100		100			100		Sekretariat DPRD
	Persentase rapat dan risalah persidangan yang berkualitas	%	83		83		84			84		Sekretariat DPRD
Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama antar wilayah yang terlaksana dengan baik	%	86,3	1.084.000.000	90,0	1.140.000.000	90,0	1.190.000.000	90,0	2.214.000.000		Setda
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Desa	%	15,0	865.000.000	31,6	865.000.000	48,3	865.000.000	65,0	865.000.000		Setda
Program Pembentukan Produk Hukum	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	550.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000		Setda

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Persentase produk hukum yang terpublikasi	%	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Setda
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase penyelesaian masalah hukum	%	87,5	2.563.000.000	90,0	2.600.000.000	92,5	2.650.000.000	95,0	2.690.000.000	Setda
Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Persentase kajian keagamaan dan kemasyarakatan yang dimanfaatkan	%	100	2.774.672.000	100	2.774.672.000	100	2.774.672.000	100	2.774.672.000	Setda
	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100		100		100		100		Setda
Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase kesesuaian dokumen pengajuan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Setda
Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang dimanfaatkan	%	85	75.000.000	85	75.000.000	85	75.000.000	85	75.000.000	Setda

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase informasi dan dokumen pelaksanaan pembangunan daerah yang memenuhi aspek kualitas	%	85	460.000.000	85	460.000.000	85	460.000.000	85	460.000.000	Setda
Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasikan	%	100	9.005.000.000	100	9.005.000.000	100	9.005.000.000	100	9.005.000.000	Setda
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Wakil KDH	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlaksana baik	%	90	5.925.000.000	90	6.200.000.000	90	6.350.000.000	90	6.850.000.000	Setda
Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Kesekretariatan Daerah	Persentase aset Sekretariat Daerah yang terkelola dengan baik	%	100	883.300.000	100	883.300.000	100	883.300.000	100	883.300.000	Setda
Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah	Persentase data dan informasi perekonomian daerah yang digunakan untuk policy brief	%	100	3.002.722.000	100	3.002.722.000	100	3.002.722.000	100	3.002.722.000	Setda
Program Pembinaan dan Penataan Kelembagaan	Persentase SKPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Setda

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Standar Kompetensi dan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang kompetensinya sesuai standar kebutuhan organisasi	%	32,5	500.000.000	50,0	500.000.000	60,0	500.000.000	70,0	500.000.000	Setda
	Persentase tingkat disiplin PNS	%	80		85		90		95		Setda
Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi agenda reformasi birokrasi sesuai road map reformasi birokrasi	%	41,3	530.000.000	47,5	530.000.000	53,8	530.000.000	60,0	530.000.000	Setda
Program Pengembangan Ekinerja	Persentase pegawai yang berkinerja baik	%	65	400.000.000	70	400.000.000	75	400.000.000	80	400.000.000	Setda
Program Pembinaan dan Penataan Ketatalaksanaan	Persentase SKPD yang telah menyusun SOP pelayanan sesuai per-UU-an	%	55	100.000.000	60	100.000.000	65	100.000.000	70	100.000.000	Setda
Program Pembinaan Inovasi Daerah	Persentase SKPD yang mempunyai inovasi kategori baik	%	15	150.000.000	20	150.000.000	25	150.000.000	30	150.000.000	Setda
Program Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan DPRD	Persentase kualitas aparatur untuk publikasi kinerja DPRD yang tercukupi	%	85	200.000.000	85	200.000.000	85	200.000.000	85	200.000.000	Sekretariat DPRD

Program Prioritas dan Bidang Urusan Pemerintahan Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN III	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban III	%	100	2.559.029.500	100	2.810.539.300	100	3.087.200.000	100	3.339.381.000	Inspektorat Daerah
	Persentase rekom temuan yang selesai ditindak lanjuti : keuangan negara/ daerah dan administrasi pada wilayah Irban III	%	58,8		62,5		66,3		70,0		Inspektorat Daerah
	Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Irban III	%	50		60		70		80		Inspektorat Daerah

Tabel 8.6 Kinerja Program Prioritas III dan Kerangka Pendanaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan									SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN WAJIB											
Penunjang (Fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan)											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan aparatur persediaan administrasi perkantoran	%	100	22.521.000.000	100	22.521.000.000	100	22.521.000.000	100	22.521.000.000	Setda
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Surat Menyurat	Persentase pelayanan dan pengelolaan surat menyurat yang tepat waktu	%	100	267.311.150	100	267.311.150	100	267.311.150	100	267.311.150	Setda
Program Dukungan Kelengkapan Penyelenggaraan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional	Persentase kegiatan korsik sebagai pendukung kegiatan upacara bendera dan hari-hari besar nasional serta seremonial yang diselenggarakan oleh Pemkab Banyuwangi	%	100	1.089.306.450	100	1.089.306.450	100	1.089.306.450	100	1.089.306.450	Setda

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan									SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH/WKDH	Persentase tingkat kepuasan aparatur terhadap persediaan administrasi perkantoran	%	90	14.319.858.900	90	14.669.858.900	90	14.919.858.900	90	15.119.858.900	Setda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH/WKDH	Persentase tingkat kepuasan terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	%	90	9.684.453.600	90	9.684.453.600	90	9.684.453.600	90	9.684.453.600	Setda
Program Dukungan Penyelenggaraan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional	Persentase penyelenggaraan upacara dan hari-hari besar nasional yang terselenggara dengan baik	%	90	500.000.000	90	600.000.000	90	650.000.000	90	750.000.000	Setda
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	85,0	460.622.492.894	87,5	486.031.735.949	90	514.241.177.875	92,5	542.125.699.662	Seluruh SKPD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan									SKPD Penanggung Jawab
			2017		2018		2019		2020		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	%	87,5	114.878.121.559	90,0	121.323.189.767	92,5	128.564.115.066	95,0	135.837.266.259	Seluruh SKPD



PANTAI PULAU MERAH - PESANGGARAN



Sebagaimana di atur pada surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, perlu dilampirkan program pada tahun 2016.

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
Dinas Pendidikan			180,713,909,689
	10115	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7,731,315,000
	10116	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	124,123,585,966
	10117	Program Pendidikan Menengah	36,295,811,723
	10118	Program Pendidikan Non Formal	677,000,000
	10119	Program Pendidikan Luar Biasa	429,065,000
	10120	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7,923,200,000
	10122	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,286,120,000
	10123	Program Dukungan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi	68,000,000
Dinas Kesehatan			116,563,381,800
[102] Kesehatan	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,416,600,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,536,600,000
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70,000,000
	10215	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,030,000,000
	10216	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	88,130,989,800
	10217	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
	10219	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	10220	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	400,000,000
	10221	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1,798,000,000
	10222	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2,941,000,000
	10225	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	9,491,192,000
	10231	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	50,000,000
	10233	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	80,242,100
	10234	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	133,757,900
RSUD Belambangan			61,115,000,000
[102] Kesehatan	10224	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	15,000,000
	10235	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD	61,100,000,000
RSUD Genteng			66,626,000,000
[102] Kesehatan	10226	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	30,000,000,000
	10235	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD	36,626,000,000
PU Bina Marga Cipta Karya			326,780,213,308
[101] Pendidikan	10117	Program Pendidikan Menengah	1,450,000,000
[103] Pekerjaan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,764,809,320
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9,090,913,600
	0003	Program peningkatan disiplin aparatur	50,000,000
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	81,728,000
	10315	Program pembangunan jalan dan jembatan	88,036,833,333

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	10316	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	10,056,550,000
	10318	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	146,085,354,055
	10322	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	1,400,000,000
	10323	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	900,000,000
	10329	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	2,250,000,000
	10330	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	30,194,025,000
	10331	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	225,000,000
	10337	Program Pembangunan Fasilitas Publik	20,089,000,000
	10338	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Publik	100,000,000
[104] Perumahan	10416	Program Lingkungan Sehat Perumahan	325,000,000
[105] Penataan Ruang	10517	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	375,000,000
[107] Perhubungan	10718	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	12,500,000,000
[108] Lingkungan Hidup	10824	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	806,000,000
PU Pengairan			128,286,928,000
[103] Pekerjaan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,910,400,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,496,945,000
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	165,000,000
	10317	Program pembangunan turap/talud/bronjong	6,580,000,000
	10324	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	115,269,083,000
	10326	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1,728,000,000
	10333	Program Pembangunan sistem informasi/data base Sumber Daya Air	137,500,000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			11,443,259,950
[103] Pekerjaan Umum	10324	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	274,322,000
[105] Penataan Ruang	10315	Program Perencanaan Tata Ruang	1,267,600,000
	10316	Program Pemanfaatan Ruang	701,000,000
	10317	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	315,200,000
[106] Perencanaan Pembangunan	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,036,812,200
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	295,140,000
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60,010,800
	10615	Program pengembangan data/informasi	641,182,550
	10618	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	88,000,000
	10619	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	65,988,000
	10620	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Jumlah pembangunan daerah	100,014,400
	10621	Program perencanaan Jumlah pembangunan daerah	1,621,106,200
	10622	Program perencanaan Jumlah pembangunan ekonomi	1,369,817,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	1,550,000,000
	10624	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1,057,066,800
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			12,208,400,000
[107] Perhubungan	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,199,710,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	360,000,000
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50,000,000
	10615	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	322,350,000
	10616	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	110,000,000
	10617	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	2,672,340,000
	10618	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	700,000,000
	10619	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1,610,000,000
	10620	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	409,000,000
[125] Komunikasi dan Informatika	12515	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1,615,000,000
	12518	Program kerjasama informasi dengan mas media	160,000,000
Badan Lingkungagn Hidup			2,977,380,000
[108] Lingkungan Hidup	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	685,535,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	73,500,000
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30,000,000
	10815	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	281,250,000
	10816	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	510,830,000
	10817	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	655,500,000
	10819	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	390,730,000
	10820	Program peningkatan pengendalian polusi	350,035,000
Dinas Kebersihan dan Pertamanan			66,805,224,250
[103] Pekerjaan Umum	10331	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	700,000,000
	10336	Program Peningkatan Trotoar	5,535,000,000
[104] Perumahan	10419	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	440,000,000
	10420	Program pengelolaan areal pemakaman	6,210,000,000
[107] Perhubungan	10719	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	31,305,000,000
[108] Lingkungan Hidup	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,193,224,250
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	370,000,000
	10815	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9,231,312,000
	10824	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	8,820,688,000
Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil			3,000,000,000
[110] Kependudukan dan Catatan Sipil	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,157,433,100
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	725,835,050
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30,000,000
	11015	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1,086,731,850
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB			3,300,000,000
[111] Pemberdayaan Perempuan	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	843,332,950
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	282,626,250
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25,000,000
	11115	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	67,000,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	11116	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	456,330,000
	11117	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	302,850,000
	11118	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	47,400,000
[112] Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	11215	Program Keluarga Berencana	638,445,000
	11216	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	195,920,125
	11217	Program pelayanan kontrasepsi	58,650,000
	11218	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	106,370,675
	11220	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	17,500,000
	11221	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	184,175,000
	11223	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	40,000,000
	11224	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	34,400,000
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			3,992,308,650
[113] Sosial	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,141,151,500
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	303,563,700
	11315	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	547,259,700
	11316	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	181,621,700
	11319	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	117,000,000
	11321	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	85,810,000
	11322	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	85,000,000
[114] Tenaga Kerja	11415	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	464,120,000
	11416	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	340,706,450
	11417	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	565,470,000
[208] Transmigrasi	20815	Program pengembangan wilayah transmigrasi	160,605,600
Dinas Koperasi dan UMKM			4,074,932,000
[115] Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,075,219,600
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	225,000,000
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0
	11515	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	236,813,450
	11516	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	921,219,700
	11517	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1,061,830,000
	11518	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	554,849,250
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			7,968,000,000
[117] Kebudayaan	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	973,600,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	591,000,000
	11715	Program Pengembangan Nilai Budaya	1,900,000,000
	11717	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,492,000,000
[204] Pariwisata	20415	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1,505,400,000
	20416	Program pengembangan destinasi pariwisata	706,000,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	20417	Program pengembangan Kemitraan	800,000,000
Dinas Pemuda dan Olah Raga			11,048,170,500
[118] Pemuda dan Olah Raga	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,300,652,500
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	309,000,000
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0
	11815	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	87,500,000
	11816	Program peningkatan peran serta kepemudaan	318,925,000
	11817	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	1,770,000,000
	11819	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	55,000,000
	11820	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	7,207,093,000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			3,000,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	973,582,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	227,792,000
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	74,300,000
	11922	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1,724,326,000
Badan Kedatuan Bangsa dan Politik			3,855,700,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	613,687,150
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	220,047,450
	11915	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,046,850,500
	11917	Program pengembangan wawasan kebangsaan	858,959,900
	11918	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	185,589,000
	11919	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	422,775,000
	11920	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	47,950,000
	11921	Program pendidikan politik masyarakat	367,391,000
	11924	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	92,450,000
Satuan Polisi Pamong Praja			5,810,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,263,064,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	120,000,000
	11915	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3,066,985,000
	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	650,000,000
	11919	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	709,951,000
Sekretariat Daerah			78,446,849,650
[102] Kesehatan	10224	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	96,549,950
[105] Penataan Ruang	10516	Program Pemanfaatan Ruang	111,500,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10615	Program pengembangan data/informasi	574,000,000
	10616	Program Kerjasama Jumlah pembangunan	200,000,000
	10621	Program perencanaan Jumlah pembangunan daerah	508,600,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	10622	Program perencanaan Jumlah pembangunan ekonomi	200,000,000
[107] Perhubungan	10717	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	79,750,000
[108] Lingkungan Hidup	10824	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	275,000,000
[109] Pertanahan	10916	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	22,152,700,000
	10917	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	50,000,000
[113] Sosial	11315	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1,425,980,000
[115] Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11517	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	309,528,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11917	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2,391,226,150
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12,913,088,900
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10,124,500,000
	0003	Program peningkatan disiplin aparatur	4,355,099,600
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	884,999,600
	12016	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	5,355,000,000
	12017	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2,860,820,000
	12020	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	200,000,000
	12023	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	297,109,200
	12026	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1,262,098,000
	12027	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	840,000,000
	12030	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1,042,526,000
	12031	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum	1,081,000,000
	12032	Program Pengembangan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	822,200,000
	12034	Program Pelayanan Publik	206,768,250
	12035	Program Budaya Kerja	66,904,500
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1,529,448,500
	12218	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	110,000,000
[123] Statistik	12315	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	175,000,000
[125] Komunikasi dan Informatika	12515	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	741,360,000
	12517	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	84,500,000
	12518	Program kerjasama informasi dengan mas media	4,965,900,000
[206] Perdagangan	20615	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	118,892,000
	10618	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	34,801,000
Sekretariat DPRD			18,980,000,000
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,088,900,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,933,100,000
	0003	Program peningkatan disiplin aparatur	168,000,000
	0005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	225,000,000
	12015	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	12,515,000,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	12018	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	50,000,000
[125] Komunikasi dan Informatika	12515	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	215,000,000
	12518	Program kerjasama informasi dengan mas media	785,000,000
Dinas Pendapatan			14,240,000,000
[108] Lingkungan Hidup	10824	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	200,000,000
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,073,582,550
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,435,816,850
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	661,486,900
	12017	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2,869,113,700
	12034	Program Pelayanan Publik	0
Inspektorat Kabupaten			4,962,466,950
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,039,992,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	259,600,000
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	73,264,150
	12020	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3,353,100,100
	12021	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	180,000,000
Badan Kepegawaian dan Diklat			6,575,000,000
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,029,099,400
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	476,383,000
	0006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	202,490,500
	12029	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	2,543,045,000
	12030	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1,323,982,100
Kecamatan Banyuwangi			552,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan Jumlah pembangunan daerah	25,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	40,000,000
[108] Lingkungan Hidup	10815	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	50,000,000
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	357,000,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20,000,000
	12034	Program Pelayanan Publik	40,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10,000,000
Kecamatan Giri			472,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan Jumlah pembangunan daerah	20,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	24,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	12016	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	7,500,000
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	283,600,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91,900,000
	12034	Program Pelayanan Publik	25,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	5,000,000
Kecamatan Glagah			549,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan Jumlah pembangunan daerah	25,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	54,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	20,000,000
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	308,000,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,000,000
	12034	Program Pelayanan Publik	30,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15,000,000
Kecamatan Kalipuro			501,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan Jumlah pembangunan daerah	24,500,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	59,800,000
[113] Sosial	11320	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	10,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	20,000,000
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	245,000,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89,200,000
	12034	Program Pelayanan Publik	30,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	7,500,000
Kecamatan Licin			488,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan Jumlah pembangunan daerah	36,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	41,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	20,000,000
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	276,000,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80,000,000
	12034	Program Pelayanan Publik	25,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10,000,000
Kecamatan Wongsorejo			520,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan Jumlah pembangunan daerah	20,000,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	25,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	15,000,000
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	270,000,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150,000,000
	12034	Program Pelayanan Publik	30,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10,000,000
Kecamatan Kabat			531,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan Jumlah pembangunan daerah	25,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	25,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	25,000,000
[120] Pemerintahan Umum	0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	274,250,000
	0002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138,750,000
	12034	Program Pelayanan Publik	30,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3,000,000
Kecamatan Rogojampi			548,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	24,575,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	67,050,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	22,825,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	294,200,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	94,420,000
	12034	Program pelayanan publik	33,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	9,050,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	2,880,000
Kecamatan Songgon			529,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	15,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	33,500,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	47,450,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	311,375,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	43,050,000
	12034	Program pelayanan publik	35,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	31,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan	12,625,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
		perpustakaan	
Kecamatan Singojuruh			507,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	25,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	24,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	15,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	232,500,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	158,000,000
	12034	Program pelayanan publik	35,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	7,500,000
Kecamatan Srono			549,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	10,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	60,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	25,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	257,380,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	123,070,000
	12034	Program pelayanan publik	40,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	12,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	21,550,000
Kecamatan Muncar			529,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	20,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	25,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	20,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	334,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	78,000,000
	12034	Program pelayanan publik	35,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	12,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	5,000,000
Kecamatan Cluring			547,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	20,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	44,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18,860,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	341,860,450
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	67,185,200
	12034	Program pelayanan publik	30,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	15,094,350
Kecamatan Purwoharjo			546,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	20,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	45,000,000
[113] Sosial	11320	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	5,600,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	25,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	313,620,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	89,280,000
	12034	Program pelayanan publik	30,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	7,500,000
Kecamatan Tegaldlimo			531,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	20,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	34,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18,200,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	270,100,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	132,000,000
	12034	Program pelayanan publik	30,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	8,200,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	3,500,000
Kecamatan Gambiran			528,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	20,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	44,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	13,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	299,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	102,000,000
	12034	Program pelayanan publik	30,000,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	5,000,000
Kecamatan Bangorejo			512,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	20,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	40,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	17,500,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	310,500,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	74,500,000
	12034	Program pelayanan publik	30,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	12,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	7,500,000
Kecamatan Siliragung			531,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	20,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	35,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	20,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	331,450,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85,000,000
	12034	Program pelayanan publik	24,550,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	5,000,000
Kecamatan Pesanggaran			537,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	22,250,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	34,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	25,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	319,660,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	71,190,000
	12034	Program pelayanan publik	29,900,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	25,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	10,000,000
Kecamatan Genteng			621,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	25,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	62,000,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
[117] Kebudayaan	11715	Program pengembangan nilai budaya	69,273,600
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	16,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	322,420,400
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	68,306,000
	12034	Program pelayanan publik	40,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	3,000,000
Kecamatan Tegalsari			506,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	20,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	30,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	19,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	308,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	73,000,000
	12034	Program pelayanan publik	30,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	20,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	6,000,000
Kecamatan Sempu			509,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	17,500,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	52,000,000
[113] Sosial	11320	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	5,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	19,500,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	286,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85,000,000
	12034	Program pelayanan publik	30,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	4,000,000
Kecamatan Glenmore			531,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	13,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	31,500,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	9,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	380,500,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	87,000,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10,000,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	0
Kecamatan Kalibaru			509,000,000
[106] Perencanaan Pembangunan	10621	Program perencanaan pembangunan daerah	20,000,000
	10623	Program perencanaan sosial dan budaya	24,000,000
[119] Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	11916	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	17,050,000
	11917	Program pengembangan wawasan kebangsaan	22,950,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	293,812,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64,000,000
	00006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4,000,000
	12034	Program pelayanan publik	43,500,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	19,688,000
Kelurahan Tamanbaru			182,400,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	87,111,400
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	44,888,600
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	25,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	25,400,000
Kelurahan Kertosari			206,800,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	159,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,500,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	17,500,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	26,800,000
Kelurahan Lateng			157,200,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	80,500,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	30,500,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	15,500,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	30,700,000
Kelurahan Penganjuran			151,968,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	83,768,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	14,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	25,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	29,200,000
Kelurahan Temenggungan			124,200,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	71,088,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8,912,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	25,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	19,200,000
Kelurahan Sobo			140,200,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	78,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	8,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	20,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	34,200,000
Kelurahan Pakis			136,800,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	73,500,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	20,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	17,500,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	25,800,000
Kelurahan Pengantigan			150,800,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	91,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9,500,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	22,500,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	27,800,000
Kelurahan Kampung Mandar			128,600,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	84,500,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7,500,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	14,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	22,600,000
Kelurahan Kepatihan			136,400,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	75,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	25,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	21,400,000
Kelurahan Karangrejo			150,600,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	79,368,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12,632,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	25,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	33,600,000
Kelurahan Sumberrejo			176,600,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	96,800,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	42,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	11,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	26,800,000
Kelurahan Singotrunan			160,400,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	87,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	26,500,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	14,500,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	32,400,000
Kelurahan Panderejo			168,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	126,500,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	13,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	12,500,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	16,000,000
Kelurahan Kampung Melayu			138,200,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	81,560,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	23,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	14,440,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	19,200,000
Kelurahan Kebalenan			148,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	80,500,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	16,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	15,500,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	36,000,000
Kelurahan Singonegaran			211,073,588
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	120,400,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	43,273,588
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	13,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	34,400,000
Kelurahan Tukang Kayu			166,600,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	83,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	24,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	25,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	34,600,000
Kelurahan Boyolangu			141,800,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	79,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	22,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	13,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	27,800,000
Kelurahan Mojopanggung			143,400,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	81,750,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	18,750,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	19,500,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	23,400,000
Kelurahan Penataban			138,600,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	88,610,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15,390,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	11,000,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	23,600,000
Kelurahan Giri			144,800,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	98,500,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	11,500,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	25,800,000
Kelurahan Gombengsari			157,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	100,100,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7,900,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	10,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	39,000,000
Kelurahan Klatak			159,400,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	93,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	15,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	46,400,000
Kelurahan Kalipuro			168,200,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	65,990,250
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	46,009,750
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	15,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	41,200,000
Kelurahan Bulusan			156,400,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	84,100,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	27,550,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	11,350,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	33,400,000
Kelurahan Banjarsari			137,600,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	89,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	25,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	23,600,000
Kelurahan Bakungan			130,200,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	84,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15,000,000
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	13,000,000
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	18,200,000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			13,543,614,549
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	2,117,998,800
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	377,151,200
	00006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,150,581, 250

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	12017	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9,558,553,299
	12018	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	339,330,000
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu			1,994,000,000
[116] Penanaman Modal	11615	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	400,000,000
	11616	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	25,000,000
[120] Pemerintahan Umum	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	1,283,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	185,000,000
	12034	Program pelayanan publik	101,000,000
Kantor Ketahanan Pangan			2,025,773,300
[121] Ketahanan Pangan	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	253,000,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	192,500,000
	00006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,520,000
	12116	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	1,477,578,300
	12117	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	92,175,000
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			4,802,514,725
[122] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	948,943,450
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	503,834,650
	00006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25,000,000
	12215	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	592,140,000
	12216	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	143,280,000
	12217	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1,238,080,000
	12218	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	479,236,625
	12219	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	872,000,000
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			2,205,128,250
[124] Kearsipan	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	936,082,100
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	197,450,000
	12416	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	55,173,000
	12417	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	54,604,750
	12418	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	155,441,000
[126] Perpustakaan	12615	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	806,377,400
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan			20,930,855,568
[201] Pertanian	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	1,439,176,650
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	965,893,350
	00006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35,500,000
	20115	Program peningkatan kesejahteraan petani	2,703,124,468
	20116	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	3,175,930,000
	20117	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	3,005,100,000

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	20118	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1,758,047,400
	20119	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2,076,653,100
	20120	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	760,575,000
	20125	Program peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau	3,675,355,600
[202] Kehutanan	20215	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	204,310,000
	20216	Program rehabilitasi hutan dan lahan	891,010,000
	20217	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	143,400,000
	20220	Program perencanaan dan pengembangan hutan	96,780,000
Dinas Peternakan			5,120,000,000
[201] Pertanian	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	967,385,000
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	418,103,000
	00006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000
	20115	Program peningkatan kesejahteraan petani	93,000,000
	20121	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	437,230,000
	20122	Program peningkatan produksi hasil peternakan	2,103,230,000
	20123	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	118,005,000
	20124	Program peningkatan produksi peternakan	963,047,000
Dinas Kelautan dan Perikanan			5,969,820,000
[205] Kelautan dan Perikanan	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	988,402,900
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	260,000,000
	00006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	633,320,000
	20515	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	
	20517	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	219,829,400
	20520	Program pengembangan budidaya perikanan	2,781,710,500
	20521	Program pengembangan perikanan tangkap	472,774,950
	20523	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	479,692,250
	20526	Program peningkatan kualitas dan akses jaringan perikanan	84,090,000
	20528	Program perencanaan dan pengembangan kawasan kelautan dan perikanan	50,000,000
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan			11,646,860,000
[203] Energi dan Sumberdaya Mineral	20317	Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan	361,629,200
[206] Perdagangan	00001	Program pelayanan administrasi perkantoran	1,302,761,050
	00002	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	314,890,000
	00006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30,000,000
	20615	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	400,750,000
	20617	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	316,161,500

Urusan Pemerintahan	Kobe Rekening	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	20618	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	717,788,000
	20619	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	3,692,360,000
[207] Perindustrian	20716	Program pengembangan industri kecil dan menengah	3,692,360,000
	20717	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	722,200,250
	20718	Program penataan struktur industri	47,640,000
	20719	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	48,320,000





BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program Bab VIII, selanjutnya menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan

berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Banyuwangi diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuwangi. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9.1: Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

No	Uraian	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	skala	67.70	67.93	68.13	68.31	68.47	68.61	68.75
2	Tingkat Kemiskinan	%	9.29	9.06	8.80	8.55	8.31	8.07	7.84
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.13*	6.48	6.53	6.57	6.61	6.64	6.67
4	Indeks Gini	skala	0.29	0.285	0.282	0.280	0.278	0.277	0.275
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.55	2.07	1.89	1.71	1.53	1.35	1.17
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	skala	85.18	85.43	85.66	85.86	86.04	86.20	86.34
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skala	65.31	65.93	66.54	67.16	67.77	68.39	69.00
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	77.95	78.16	78.74	79.23	79.68	80.08	80.44

Perumusan indikator sasaran (*Impact*) dituangkan tabel sebagai berikut:

Tabel 9.2: Proyeksi Capaian Indikator Sasaran (*Impact*) Tahun 2016-2020
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2016-2020

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
		Kinerja pada awal periode RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MISI 1							
1.1	Indeks Pendidikan	0,56	0,58	0,59	0,6	0,61	0,62	0,63
1.2	Persentase PAUD Formal Berakreditasi A	15,54%	15,54%	17,54%	19,54%	21,54%	23,54%	23,54%
1.3	Rasio Lembaga Pendidikan Terakreditasi A	24:76	30:70	38:62	44:56	51:49	58:42	65:35
1.4	Cakupan KB Aktif	65%	68%	68%	69%	69%	70%	70%
1.5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	75,64%	76%	78%	80%	82%	85%	85%
1.6	Indeks Kesehatan Keluarga BWI	n/a	0.684	0.688	0.691	0.696	0.700	0.704
1.7	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup	96,2	110	100	98	97	96	96
1.8	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	n/a	13%	40%	60%	80%	100%	100%
1.9	Tingkat Kesehatan Rumah Sakit	n/a	70	72	74	76	78	80
1.10	Persentase Keamanan Pangan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
1.11	Persentase angka PMKS	13,5	13,3	13,1	12,8	12,5	12,3	12,1
1.12	Indeks Gotong Royong	n/a	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021	
		Kinerja pada awal periode RPJMD		2015	2016	2017	2018	2019		2020
		2015	2016							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.13	Indeks Rasa Aman	0,49	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,53		
1.14	Persentase Resiko Bencana Pada KRB	12,5%	12,5%	61,4%	71,7%	82%	90%	90%		
2	MISI 2									
2.1	Indeks Gini	0,29	0,285	0,282	0,280	0,278	0,277	0,275		
2.2	Tingkat pengangguran terbuka	2.55	2.07	1.89	1.71	1.53	1.35	1.17		
2.3	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	1,42 TRILIYUN	1,75 TRILIYUN	1,8 TRILIYUN	1,85 TRILIYUN	1,9 TRILIYUN	1,95 TRILIYUN	2 TRILIYUN		
2.4	% Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB	6,97*	7	7,03	7,06	7,09	7,12	7,15		
2.5	% Pertumbuhan sektor Pertanian dalam PDRB	3,17*	3,25	3,33	3,41	3,49	3,57	3,57		
2.6	% UKM terhadap UMKM	9,92	10	11	12	13	14	15		
2.7	% Koperasi berkualitas	5,77	7,88	8,86	9,84	10,82	11,8	12,78		
2.8	% Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	7,13*	7,28	7,52	7,84	8,24	8,73	9,31		
2.9	Spending Of Money	n/a	300 Milyar	320 Milyar	350 Milyar	370 Milyar	400 Milyar	400 Milyar		
3	MISI 3									
3.1	% Panjang Jalan Kondisi Baik Dengan Kecepatan > 20 Km	94,35%	96,49%	98,43%	98,43%	98,43%	98,43%	98,43%		
3.2	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas	43,35%	43,35%	40,38%	37,61%	35,03%	32,62%	32,62%		
3.3	% Ketersediaan Air Pada Musim Hujan dan Musim Kemarau (Degradasi DAS)	75%	75%	80%	81%	82%	83%	83%		
3.4	Proporsi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik dan Teknis	85%	85%	90%	91%	92%	93%	93%		
3.5	Peningkatan Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi Baik	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit		
3.6	Jumlah Masyarakat Miskin Yang Terlayani Sanitasi Dasar	300 KK	300 KK	500 KK	500 KK	500 KK	500 KK	500 KK		
3.7	% kecukupan luasan RTH Publik	0,3246	0,3725	0,4	0,425	0,45	0,475	0,5		
3.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,08	66,08	66,53	67,16	67,76	68,39	68,39		
4	MISI 4									
4.1	Indeks desa membangun (IDM)	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75		
4.2	Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	300 Orang	300 Orang	350 Orang	400 Orang	450 Orang	500 Orang	500 Orang		
4.3	Persentase pemuda mandiri	n/a	5,2%	5,4%	5,6%	5,8%	6%	6,2%		
4.4	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	66,5	67	67,2	67,6	67,9	68,25	68,25		

No.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021	
		Kinerja pada awal periode RPJMD							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.5	% Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Serta Trafficking	70%	70%	72%	75%	77%	79%	79%	
5	MISI 5								
5.1	Nilai/Predikat AKIP	B	A	A	A	A	A	A	
5.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,95	78,16	78,74	79,23	79,68	80,08	80,44	
5.3	% Terpenuhinya Aspek Kualitas Dalam Dokumen Perencanaan	80%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	
5.4	% Kebijakan Berdasarkan Policy Brief	n/a	40%	50%	60%	70%	80%	80%	
5.5	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
5.6	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	30-32.5	32.5-33.0	33-33.6	33.5-34	34-34.7	34.75-35	
5.7	% Cakupan Jangkauan TIK	60%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
5.8	% Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Mengimplementasikan IT Baik	60%	65%	68%	70%	75%	80%	80%	





BAB X

Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Banyuwangi periode 2016-2021.

10.1. Pedoman Transisi

Tahun 2021 merupakan tahun transisi pemerintahan Bupati Abdullah Azwar Anas dan Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko. Untuk itu diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2021, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

PD) Tahun 2021 yang harus disusun pada Tahun 2020.

Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktifitas dan capaian program pembangunan daerah. Program pembangunan pada Tahun 2021 melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu setiap perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2021 tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam

kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya Dokumen RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Oleh karena itu seluruh PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi wajib menyusun Renstra Tahun 2016 – 2021 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016–2021 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan oleh kepala PD dan disahkan oleh Bupati.
2. Renstra PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD menetapkan program tersendiri dengan mengacu kepada program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang telah disesuaikan dalam RPJMD ini.
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah.

5. Dalam hal program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021, Bappeda Kabupaten Banyuwangi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD beserta indikatornya kedalam Renstra PD serta ketercapaian dalam pelaksanaannya.